

Buku

by Buku 1

Submission date: 03-Dec-2022 03:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 1970086803

File name: Buku.pdf (2.58M)

Word count: 33670

Character count: 218387

JUDUL BUKU :

**PERJUMPAAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN PERSIS DENGAN NILAI-NILAI
NASIONALISME KULTURAL INDONESIA**



Abd. Jabar Abdul
Muhajir Abdurham
Yusuf Abdurrachman Luhulima

DAFTAR ISI

Halaman Depan - i
Daftar Isi - ii
Kata Pengantar - iii

Bagian I

PENDAHULUAN

- A. Pengertian Tujuan dan Ruang Lingkup Pesantren – 1
- B. Sejarah Keberadaan Pesantren di Indonesia – 3
- C. Peran Pesantren dalam Proses Transformasi Islam dan Kebangkitan Indonesia - 6
- D. Peran Pesantren Bagi NKRI – 12
- E. Kedudukan dan Hubungan Pesantren dengan Pemerintah – 16

BAGIAN II

NASIONALISME KEBANGSAAN INDONESIA

- A. Nasionalisme, Bangsa dan Perspektif Para Ahli – 23
- B. Unsur-Unsur Nasionalisme – 27
- C. Nilai-Nilai Nasionalisme – 29
- D. Nasionalisme Indonesia Masa Lalu dan Masa Kini – 31

BAGIAN III

ISLAM NASIONALISME DAN TANTANGANNYA DI MASA DEPAN

- A. Peran Islam Bagi Kebangkitan Semangat Nasionalisme Indonesia – 34
- B. Pergerakan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia – 44
- C. Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Sarekat Islam (SI) – 47
- D. Budi Utomo – 50
- E. Antara Sarekat Islam Dengan Budi Utomo – 52
- F. Tantangan Nasionalisme dan Pentingnya Nasionalisme Kultural - 54
 - 1. Tantanagan Nasionalisme -54
 - 2. Pentingnya Nasionalisme Kultural – 58

BAGIAN IV

PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN PERSIS DAN PERANYA BAGI NKRI

- A. Pengertian Pendidikan Islam – 68
- B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pesantren Persis – 75
- C. Visi, Misi dan Tujuan Pesantren Persis – 83
- D. Sistem Pendidikan Pesantren Persis – 90
- E. Penerapan Pendidikan Islam Pesantren Persis – 98

BAGIAN V

PERSENTUHAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN PERSIS DENGAN NILAI-NILAI NASIONALISME KULTURAL INDONESIA

- A. Titik Temu Pendidikan Islam Pesantren Persis dengan Nilai-Nilai Nasionalisme - 103
- B. Peran Pesantren Persis dalam Membangun wawasan Diniyah dan Kebangsaan

BAGIAN VI

PENUTUP

A. Simpulan Hasil Penelitian Reproduksi Pesantren Persis – 115

B. Rekomendasi – 118

- DAFTAR PUSTAKA - 120

KATA PENGANTAR

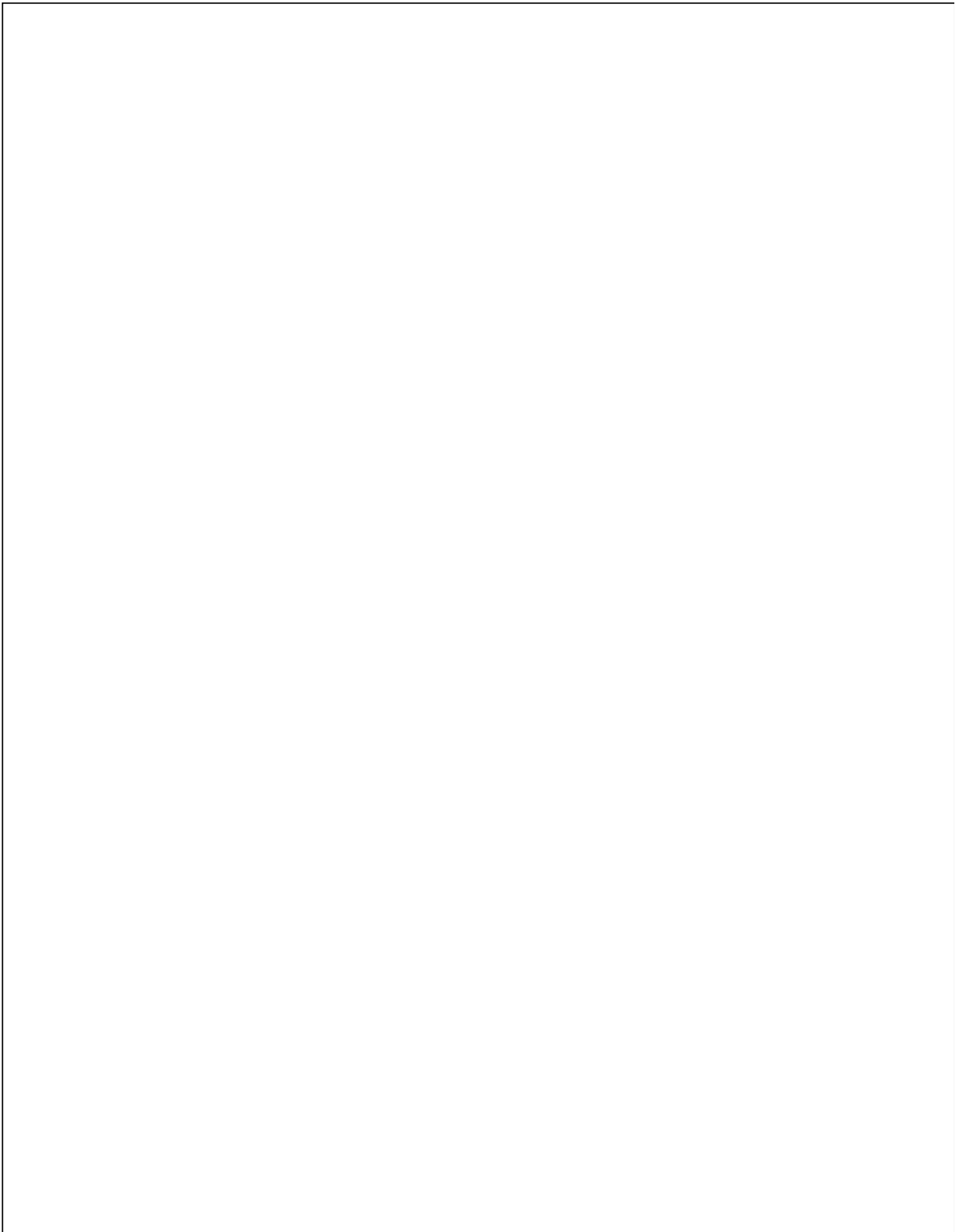
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Dialah pencipta langit dan bumi beserta seluruh apa yang ada di dalamnya. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad saw, kepada keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Nabi kekasih Allah, manusia agung dan mulia yang telah menyelamatkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya penerangan.

Beribu-ribu rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas selesainya penyusunan buku ini. Tanpa rahmat dan pertolonganNya penyusunan buku yang berjudul Perjumpaan Pendidikan Islam Pesantren Persis Dengan Nilai-Nilai Nasionalisme Kultural Indonesia ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Buku ini bertolak dari hasil penelitian penulis terhadap pendidikan Islam Pesantren Persis yang dinilai sangat reproduktif dalam membangun nasionalisme kultural Indonesia, mempersiapkan santri sebagai muslim yang kaffah dan anak bangsa yang berkepribadian baik dan unggul.

Buku ini, tentunya masih jauh dari sempurna, dalam penyusunannya tak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan di dalamnya, karena itu kritik dan saran untuk perbaikan amatlah diperlukan. Akhirnya penulis tak lupa sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu selesainya penyusunan buku ini, terutama kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah memberikan support dan pendampingan hingga selesainya penyusunan buku ini.

Ambon, Oktober 2020

Penulis





BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Pesantren⁶

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya tempat para santri¹. Sedangkan menurut Sujdoko Prasadjo bahwa: “Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang Kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama’ abad pertengahan, dan para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut². Dengan demikian, dalam lembaga pendidikan Islam yang di sebut pesantren tersebut, sekurang-kurangnya memiliki unsur: Kyai, santri, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri serta kitab-kitab klasik sebagai sumber atau bahan pelajaran.

Terkait dengan kemunculan Pesantren, setidaknya ada dua pendapat yang berkembang mengenai hal ini. Pertama, lembaga pesantren dikatakan bermula dari pengajian-pengajian tarekat seiring dengan penyiaran agama Islam di Indonesia yang berlangsung sejak abad XV. Masuknya Islam ke Indonesia (nusantara) sendiri diduga sudah terjadi sejak abad ke VIII. Dalam kegiatan tarekat, amalan-amalan zikir dan wirid menjadi menu utama dalam dakwah, yang kerap diselingi dengan penyampaian nasehat agama. Dari pengajian tarekat semacam inilah lembaga pesantren memantapkan eksistensinya.

Pendapat kedua menyebutkan bahwa kemunculan pesantren tidak dapat dilepaskan dari akulturasi budaya Islam dengan tradisi *mandala* atau *patapan* (pertapaan) yang telah lebih dahulu berkembang di zaman Hindu-Buddha. Semua tentu sudah maklum bahwa Hindu-Buddha pernah menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Anggapan ini

¹ . Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, h. 286.

² . Sudjoko Prasadjo, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001, h. 104.

didasari pada fakta bahwa di Negara-negara Islam umumnya tidak ada lembaga pendidikan seperti pesantren. Sebaliknya, di Negara-negara yang penduduknya menganut Hindi-Buddha seperti India, Myanmar, Kamboja, dan Thailand dapat ditemukan lembaga pendidikan ala pesantren yang menggunakan system *mandala*, dimana guru dan murid hidup dalam satu tempat selama proses mengajar-belajar.

Sekalipun istilah “pesantren” mulanya hanya lazim dikenal di Jawa, namun system pembelajaran dengan ciri dan karakteristik yang sama juga terdapat di daerah-daerah lain di nusantara. Di Aceh, orang menyebutnya dengan *dayah*. Di Minangkabau dikenal dengan *surau*. Sedangkan di semenanjung Malaya dan Kamboja disebut *pondok*. Dalam perkembangan selanjutnya, baik di Aceh, Minangkabau, maupun di daerah-daerah lain di Indonesia, istilah “pesantren” semakin jamak digunakan untuk merujuk suatu system pembelajaran Islam yang khas, dimana setiap murid atau santri tinggal di pondok dalam pengawasan kyiai dan pengasuh pondok selama 24 jam nonstop³.

Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat. Karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya. Semuanya memberi penilaian tersendiri bahwa system pesantren adalah merupakan suatu yang bersifat “asli” atau “indigenos” Indonesia, sehingga dengan sendirinya bernilai positif dan harus dikembangkan⁴.

B. Sejarah Keberadaan Pesantren di Indonesia

Jauh sebelum kaum kolonial Belanda berhasil menancapkan kukunya di bumi Nusantara dengan misinya yang ganda antara imperialis dan kristenisasi, sudah ditemukan Pesantren yaitu pada abad ke 17 Masehi, di Jawa Timur terdapat Pesantren Sunan Bonang

³. Olman Dahuri dan M. Nida' Fadlan, pesantren-pesantren berpengaruh di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h.86

⁴. Nurcholil Majid, *Bilik-bilik pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 103.

di Tuban, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Sidomukti Giri dan sebagainya⁵. Bahkan menurut Mahmud Yunus, sebelum itu telah ada sebuah Pesantren di Hutan Glagah sebelah selatan Jepara yang didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1475 M.⁶

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal di Indonesia sebelum adanya kolonial Belanda, maka setelah pemerintahan colonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut system persekolahan yang berkembang di dunia barat, dunia pendidikan di Indonesia pada abad ke 20 terpecah menjadi dua golongan, yaitu: 1. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama, dan 2. Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja.

³ Dengan terpecahnya dunia pendidikan menjadi dua corak yang sangat berbeda, tentunya tidak akan mendatangkan keuntungan bagi perkembangan masyarakat Indonesia untuk masa yang akan datang, bahkan akan merugikan masyarakat Muslim sendiri. Di satu sisi dipandang perlu untuk mengetahui perkembangan dunia luar (teknologi), di sisi lain juga diperlukan adanya pemahaman keagamaan yang telah ditanamkan jauh hari sebelum Belanda datang dengan pendidikan pesantren.

Dengan terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat umum untuk memasuki sekolah-sekolah yang diselenggarakan secara tradisional oleh kalangan Islam, dan mendapat tantangan dan saingan berat dengan didirikannya sekolah Belanda yang dikelola secara modern oleh Belanda yang berisikan materi tentang ketrampilan duniawi dan hanya orang-orang dari kalangan tertentu yang bisa mengikutinya, sedangkan untuk kalangan bawah tidak bisa mendapatkan pendidikan, sehingga ada sebagian di antara rakyat Indonesia yang masih tidak bisa baca-tulis, karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Dalam hal ini muncul kesadaran dari ulama-ulama Islam yang pada waktu itu juga menyadari bahwa system pendidikan tradisional dan langgar tidak lagi sesuai dengan iklim

⁵ . HA. Timur Djaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta: Darmaga, 1980), h. 17.

⁶ . Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hida Agung, 1985), h.27.

³ pada masa itu. Maka dirasakanlah akan pentingnya memberikan pendidikan secara teratur di madrasah atau sekolah. Muhammad Abdu dan Rasyid Ridha dengan pembaharuan di bidang social dan kebudayaan berdasarkan tradisi Islam al-Qur'an dan al-Hadits yang dibandingkan kembali dengan ilmu-ilmu barat⁷.

Hal ini merupakan satu langkah maju dan berpartisipasi di madrasah-madrasah Islam dengan terus mengadakan pembaruan, dengan memasukan ilmu-ilmu pengetahuan Barat ke dalam kurikulum, maka muncullah tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia yang mendirikan sekolah-sekolah Islam di mana-mana.

Adapun madrasah-madrasah yang didirikan di Indonesia:

1. Madrasah Adabiyah School.

Menurut penelitian Mahmud Yunus yang dikutip oleh Syamsul Nizar, ⁵ bahwa pendidikan Islam yang mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja, dan papan tulis ialah sekolah Adabiyah/Madrasah Adabiyah School di Padang. Sekolah ini didirikan oleh H. Abdullah pada tahun 1907 di Padang Panjang⁸.

Keberadaan sekolah Adabiyah ini tidak bertahan lama karena mendapat reaksi yang sangat keras dari masyarakat tradisional ketika itu. Akibatnya, dua tahun kemudian *Adabiyah School* terpaksa ditutup. Setelah melakukan study kelayakan pada madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah di Singapura sekaligus mendapatkan motivasi baru dari Syekh Taher Djalaludin, maka pada tahun 1909 H. Abdullah Ahmad kembali mendirikan sekolah jenis yang sama di kota Padang dengan nama Perguruan Adabiyah. Adabiyah hidup sebagai madrasah sekolah agama sampai tahun 1914, yang merupakan HIS pertama di Minangkabau.

2. Madrasah Diniyyah School

⁷ . Chadijah Ismail, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Padang: IAIN Press, 1999), h. 78.

⁸ Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikir Pendidikan Islam, Potret Timur-Tengah Era Awal dan Indonesia*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 94.

Tokoh lain dalam pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau adalah Zainuddin Labai Al-Yunisi tahun 1890-1924, mendirikan madrasah diniyyah school pada tahun 1915, sebagai sekolah agama pertama, yang dilaksanakan menurut system pendidikan modern yakni menggunakan alat tulis dan alat peraga.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Zainuddin Labai Al-Yunusi melalui diniyyah school adalah dengan menggunakan system klasikal dan memberikan pengetahuan umum di samping pengetahuan agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketertaikannya dengan sekolah Mesir modern, sebagaimana di analisis oleh Deliar Noer bahwa popularitas zainuddin Labai Al-Yunusi memahami dan mengembangkan berbagai pengetahuan yang ditopang oleh kemampuannya dalam berbahasa asing⁹.

3. Madrasah Muhammadiyah

KH. Ahmad Dahlan 1868-1923, yang mendirikan organisasi Muhammadiyah bersama dengan teman-temannya di kota Yogyakarta pada tahun 1912, yang bertujuan menyebarkan pengajaran Rasulullah kepada penduduk bumiputra dan memajukan agama Islam. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah adalah; 1) Baik budi, alim dalam agama, 2) Luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia dan 3) Bersedia untuk memajukan masyarakatnya. Ahmad Dahlan menggunakan pendidikan Islam dengan dua system yaitu: (1) Sekolah mengikuti pola gubernamen yang ditambah dengan pelajaran agama, (2) Madrasah yang lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama.

4. Sumatera Thawalib

Surau pertama yang memakai system kelas dalam proses belajar mengajar adalah Sumatera Thawalib Padang Panjang yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1921. Kemudian pada tahun yang sama diikuti oleh Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Musa. Cikal bakal madrasah Thawalib adalah surau jembatan besi dalam Taufiq Abdullah, yang didirikan oleh Abdullah Ahmad setelah kembali dari Mekkah. Sistem yang digunakan memakai system pendidikan yang

⁹ . Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, , Bandung: LP3ES, 1982, h. 49.

5 sama dengan surau-surau lainnya di Minangkabau, namun berkat dorongan dan berdiskusi, dilakukan perubahan dengan penyelenggaraan pendidikan berkelas, sekitar tahun 1912. Berbeda dengan diniyah School, Thawalib masih belum menambah materi pelajaran umum namun sudah menggunakan literature klasik dan modern¹⁰.

C. Peran Pesantren dalam Proses transformasi Islam dan Kebangkitan Indonesia

Tak dapat disangkal bahwa reproduksi pesantren dalam proses transformasi ajaran Islam menempati posisi yang amat strategis untuk membangun masyarakat berbasis Qur'ani, memahami dan melaksanakan syari'at Islam, hidup, damai, bahagia dan terbebas dari berbagai bentuk belenggu penindasan. Hal ini dapat dilacak dari keberadaan pesantren dan kontribusinya di Indonesia yang usianya setua masuknya Islam di tanah air.

Pesantren telah banyak melahirkan generasi yang tidak hanya berperan menolak berbagai bentuk penindasan, tetapi juga menjadi motor penggerak perlawanan terhadap para penjajah. Kebangkitan semangat nasionalisme dan kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dengan peran pesantren dan ulama. Jadi peran pesantren dalam membangun negeri ini sebenarnya sama dengan peran umat Islam itu sendiri.¹¹

7 Pesantren di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar, bagi kemajuan Islam maupun bagi bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari kiprah kyai dan santrinya dalam berbagai bidang kehidupan, baik pada masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah maupun pada masa pembangunan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak awal kedatangan Islam, terutama pada masa walisongo hingga masa penjajahan Belanda, masa kemerdekaan hingga kini, pondok pesantren telah menyumbang

¹⁰ . Op.cit. Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 302,

¹¹ Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia; Menguk Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis Sekuler*, Yogyakarta: Uswah (Kelompok Penerbit Pro U Media), Cetakan ke 2, 2009, h. 89.

banyak jasa yang tak ternilai harganya bagi Indonesia terutama kepada pengembangan agama Islam.¹²

Sebut saja Raden Fatah raja pertama Demak adalah santri pondok pesantren Sunan Ampel. Begitu pula Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus yang merupakan panglima perang Kerajaan Demak adalah generasi awal santri pondok pesantren yang perannya dalam penyebaran agama Islam sangatlah besar. Pada masa penjajahan, di pulau Jawa ada nama Pangeran Diponegoro, di Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol yang dijuluki *Harimau Nan Salapan*, di Aceh ada Teuku Umar dan Teuku Ciktidiro, di Makasar ada Syeh Yusuf yang kesemuanya berjuang mengorbankan jiwa dan raga menentang penjajah Belanda. Pada kurun waktu tahun 1900-an, muncul pula nama-nama besar seperti HOS. Cokroaminoto (pendiri Sarekat Islam), KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H. Hasyim Asyari (pendiri Nahdhatul Ulama), KH. Zam Zam, H.Muhammad Yunus dan A. Hasan. (pendiri Persis 1923) dan lain sebagainya. Pada masa kemerdekaan, muncul nama-nama seperti KH. Wahab Hasbullah, M. Natsir, KH. Wahid Hasyim, Buya Hamka, KH. Saifuddin Zuhri. Pada masa sekarang terdapat KH. Maemun Zubair dimana bisa kita lihat perannya dalam dunia politik maupun pengembangan agama Islam. Ada pula Gus Dur yang suka kontroversi, Hidayat Nur Wahid, Din Syamsyuddin, KH. Hasyim Muzadi, dan masih banyak lagi.¹³

Peran besar pesantren dalam proses transformasi Islam menyebabkan penyebarluasan Islam ke berbagai pelosok nusantara menjadi semakin cepat berkat kemampuan pesantren dalam membangun paradigma hidup muslim, membuat masyarakat kemudian mengembangkan semangat pembebasan dan perlawanan terhadap penjajah. Pemberontakan petani di banten tahun 1888 atau perang masyarakat Aceh melawan Belanda 1873 misalnya, tidak lepas dari peran kaum santri dan pesantren. Melalui gerakan hijrah ke pelosok-pelosok pedesaan, pesantren telah mengembangkan masyarakat muslim

¹² Wawan Wahyudin, *Kontribusi Pondok Pesantren bagi NKRI*, dalam Jurnal Kajian Keislaman Halaman Vol.3 No.1 Januari : 21-42 – Juni 2016, h. 12.

¹³ *Ibid.*

yang solid, yang pada gilirannya bereperan sebagai kubu pertahanan rakyat dalam melawan penjajah.¹⁴

Jasa umat Islam (pesantren) terhadap lahirnya kebangkitan semangat nasionalisme dan gerakan kemerdekaan Negara kesatuan RI sulit terbantahkan. Islam yang telah membumi di Nusantara sejak abad ke 7 Masehi, dengan universalitas ajarannya ternyata telah menjadi sumber energi rohani yang luar biasa dalam membangun dan mendorong semangat umat Islam memperjuangkan, membela dan menyelamatkan kemerdekaan Indonesia.¹⁵

George Mc Turner Khin dalam *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, mencatat sejumlah aspek yang menjadi pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Selain kesatuan teritorial, rasa persatuan Indonesia dibentuk oleh agama Islam, bahasa kesatuan, *volksraad* (majelis rakyat), dan surat kabar. Lebih dari 90 persen penduduk Indonesia menganut Islam. Menurut Kahin, saat itu jelas Islam merupakan faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme yang terpadu. Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa, ini benar-benar merupakan semacam symbol dalam (*In group*) untuk melawan pengganggu asing dan penindas suatu agama berbeda.¹⁶

M. Natsir dalam *Indonesisch Nationalism*, Pembela Islam No 36 Oktober 1931, sebagaimana dikutip Endang Saifuddin Anshari dalam "Piagam Jakarta 22 Juni 1945, menyatakan, Islam membentuk watak anticolonial sekaligus menjebatani perbedaan etnis dalam pembentukan nasionalisme. "Pergerakan Islam pulalah yang pertama-tama meretas jalan di negeri ini bagi kegiatan politik yang mencita-citakan kemerdekaan yang telah menebarkan benih kesatuan Indonesia.¹⁷

Fakta historis menunjukkan bahwa kekuatan dan keberhasilan umat Islam dalam membangun peradaban umat manusia sejak jaman Nabi, para sahabat dan ulama sesudahnya adalah karena didasari oleh adanya kedalaman keyakinan, keluasan

¹⁴ Irfan S. Awwas, *Op.Cite*. h. 89-90.

¹⁵ Abu Hurairah, KH. Ad-Dailamy, *Benteng Pertahanan Umat Islam*, Malang: Cetdas Cermat, 2014, h. 11.

¹⁶ Lihat, *Kebangkitan Nasionalisme Indonesia di Tangan Islam*, Republika.Co.id.

¹⁷ *I b l d.*

pemahaman, dan konsistensi umat dalam menjalankan ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Oleh karena Islam sebagai sistem nilai dan pandangan hidup yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak serta merta dipahami oleh setiap warga yang menganut ajaran Islam atau dengan kata lain berislam tidak cukup dengan sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga untuk kepentingan akselerasi pbumihian ajaran Islam sebagai suatu system nilai Ilahiyah bagi pembangunan tatanan masyarakat yang aman, damai, sejahtera adil, makmur, maka diperlukan transformasi konsep-konsep keislaman itu ke dalam pikiran umat (masyarakat Islam), dan proses tersebut dalam tradisi pendidikan keislaman di Indonesia telah berlangsung dengan amat efektif di dunia pendidikan pesantren.

Pesantren berperan aktif dalam mentransformasi konsep-konsep penting dalam Islam ke tengah-tengah masyarakat, dan berhasil mengubah pandangan hidup yang statis kepada yang dinamis, rasional dan teratur. Keberhasilan pesantren dalam membangun pandangan hidup muslim menyebabkan Islam berkembang dan menyebar cepat ke seluruh pelosok tanah air.¹⁸ Islam mengemban misi rahmatan lilalamin memompakan semangat pembaharuan, menjadi umat yang terbaik melalui gerakan pembebasan , jihad menegakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan pandangan hidup Islam masyarakat kemudian mengembangkan semangat pembebasan dan perlawanan terhadap penjajah, sehingga Islam kemudian memberi corak/warna baru terhadap gearakan politik perjuangan kemerdekaan RI.

Kemerdekaan Negara RI lahir melalui perjuangan yang amat panjang, menyedot banyak energi, tenaga, pikiran, jiwa dan raga bangsa. Di masa penjajahan, bangsa Indonesia menderita lahir batin dieksploitasi habis-habisan oleh kolonialisme asing. Roeslan Abdul gani menyebutkan, kolonialisme telah mengakibatkan terbongkarnya beberapa akar kebudayaan, dan kebangkitan nasionalisme Asia yang mengusung tiga aspek yaitu 1) aspek politis yang bersifat ingin menumbangkan dominasi politik bangsa asing yang menjajah; 2)

¹⁸Abu Hurairah, KH. Ad-Dailamy, *Benteng Pertahanan Umat Islam*, Malang: Cetdas Cermat, 2014, h. 90.

4 aspek sosial ekonomi yang bersifat ingin menghentikan eksploitasi ekonomi asing untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan sesuai cita-cita keadilan sosial; 3) aspek kultural yang bersifat menghidupkan kembali kepribadian bangsa, membangun dan menemukan kembali jati diri bangsa yang bermartabat, merdeka dan berdaulat.¹⁹

Secara kultural pernyataan kemerdekaan merupakan 8 pernyataan budaya, yaitu pernyataan untuk merubah sikap budaya (*cultural unlearning*) dari rakyat tertindas menjadi rakyat merdeka, dari anak negeri yang berkedudukan sebagai “*koelie* pribumi” menjadi tuang di negeri sendiri, yang pada masa jajahan terdiskriminasi sebagai kaum *inlander* (Pribumi - kelas terendah) di bawah kaum *European* (kulit putih – kelas teratas) dan kaum *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing – kelas di tengah) menjadi kaum yang setara.²⁰ Sesuai amanat UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jadi secara tegas uraian tersebut di atas memperlihatkan betapa besarnya peran dan kontribusi pesantren dalam proses transformasi dan pembumian syari’at Islam yang berimplikasi langsung bagi kebangkitan semangat nasionalisme, perjuangan meraih kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan RI, serta keterlibatan dalam proses pembangunan untuk mewujudkan cita-cita anasional Indonesia. Walaupun hingga saat ini masih saja ada pihak-pihak yang tak jarang mempresepsi bahkan memplesetkan pesantren sebagai institusi pendidikan yang eksklusif, radikal, intoleran dan cenderung melahirkan santri (muslim) garis keras atau kelompok anak bangsa yang seolah-olah tidak pro terhadap kemajuan bangsa, anti kemoderenan, tidak reformis, tidak pancasilais, sarang teroris dan sebagainya. Padahal pesantren dan kyai sejak awal

¹⁹ Lihat Roeslan Abdul gani, dalam Ismail Arianto dalam buku *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. HA. Kosasih Djahiri*, Editor Dasim Budimansyah dan Syaifullah Syam, Bandung: laboratorium PKn FPPIPS-UPI, 2006, h. 209.

²⁰ Sri Edi Swasono, *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*, Yogyakarta: UST-PRESS, Cetakan Pertama, 2014, h. 1.

perjuangan kemerdekaan telah memberikan kontribusi besar bagi lahirnya semangat kebangkitan nasional dan kemerdekaan Indonesia.

Menapikan dan mendiskreditkan peran pesantren dan kyai bagi eksistensi NKRI dan kemajuan bangsa sama halnya dengan upaya membenturkan ulama, pesantren dan umat Islam dengan pancasila dan Negara RI. Secara tegas hal ini bisa dinyatakan sebagai bentuk penistaan terhadap nilai-nilai perjuangan para pejuang kemerdekaan, dan juga merupakan bentuk propaganda yang sama seperti yang sering dilancarkan oleh penjajah yang khawatir terhadap kekuatan pesantren dalam merekatkan persatuan bangsa, sehingga dilancarkanlah aksi propaganda untuk membenturkan para kyai dan pesantren dengan rakyat dan terutama dengan kalangan priyai dan birokrat feodal yang rakus kekuasaan dan menjadi penjilat penjajah (kekuasaan).²¹

Jadi sikap curiga dan membangun prasangka buruk terhadap peran pesantren, kyiai, ulama dan umat Islam adalah merupakan suatu bentuk pengkaburan dan penistaan terhadap realitas sosial yang ada dan nilai-nilai perjuangan para kyai, ulama dan founding father bangsa ini. Perdebatan filosofis di antara para tokoh pejuang mengenai bentuk dasar Negara Indonesia saat itu memang sulit dihindari, tetapi dengan semangat nasionalisme para kyai dan tokoh pejuang bangsa ini sehingga atas nama bangsa demi kesatuan dan kemerdekaan Negara RI, mereka melepas segala macam bentuk kepentingan dan ego kelompok, yang akhirnya berhasil membangun sebuah consensus nasional mengenai bentuk dasar Negara Indonesia merdeka yakni “Pancasila” dengan lima sila sebagaimana rumusan resminya tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dengan perkataan lain apabila tidak ada jiwa besar dan rasa nasionalisme yang tinggi, serta tekad yang kuat dari umat Islam (para ulama) sebagai penghuni mayoritas wilayah nusantara untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia merdeka, maka boleh jadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang dari Sabang sampai Merauke saat ini kita tidak akan merasakan menjadi sebuah Negara merdeka yang berdaulat.

Berbagai fenomena yang menjurus pada terjadinya segregasi sosial, benturan kepentingan dan keretakan hubungan persatuan dan kesatuan bangsa dalam dinamika

²¹ Lihat Abu Hurairah, KH. Ad-Dailamy *Op.Cite.* h.

kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik belakangan ini menunjukkan bahwa rasa nasionalisme Indonesia saat ini sedang mengalami ketergerusan, menghadapi tantangan yang cukup memprihatinkan.

Peneliti Politik dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Tri Nuke Pujastuti, menilai nasionalisme bangsa Indonesia semakin menurun dengan tingginya euforia kedaerahan, kelompok dan keagamaan yang semakin tinggi. “Ini adalah kemerosotan kebangsaan, padahal kita hidup dalam Negara pluralis yang berbeda suku, budaya, bahasa daerah dan agama serta perbedaan lainnya. Menurutnya bangsa ini seharusnya merenungkan diri untuk memperkuat wawasan kebangsaan daripada kepentingan daerah atau kelompok.”²²

D. Peran Pesantren Bagi NKRI

Munculnya SDI 1905 yang kemudian berubah menjadi SI 1912 dan Budi Utomo 1908 yang kesemuanya merupakan titik kulminasi dari rentang perjalanan sejarah pergerakan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kemunculan kedua organisasi ini bagaikan oase yang membawa angin sejuk bagi bangkitnya kesadaran akan arti pentingnya nasionalisme kebangsaan. Menyadarkan bangsa Indonesia bahwa perjuangan selama ini hanya mengandalkan kekuatan kedaerahan tanpa adanya persatuan sehingga sulit mencapai kemerdekaan.

Pada tahun 1926 diadakan Kongres Islam di Bogor, untuk menolak peraturan Hindia Belanda tentang pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Islam, yaitu ordinasi guru tahun 1925. Konggres Islam tahun 1926 ini menolak cara pengawasan tersebut karena menganggap cara pengawasan tersebut menganggap pemberitahuan secara periodic tentang kurikulum, guru-guru dan murid-murid sebagai beban berat terutama kepada masyarakat Pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan administrasi sekolah dengan sempurna²³.

²² Lihat Antara 8 Agustus 2006, Lipo.go.id diungga tanggl 26 Februari 2020.

²³ . Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, op.cit, h. 312.

20 tahun kemudian setelah Budi Utomo tepatnya tanggal 26-28 Agustus 1928 diselenggarakan kongres pemuda I dan II yang diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang berbulat tekad mengangkat sumpah menyatukan bangsa yang bhinneka menjadi satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bahasa dan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Benedicte Anderson sebagaimana dikutip Firdaus Syam mengemukakan, Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan penting dalam perjuangan ke arah pembentukan Indonesia yang setidaknya sampai masa Proklamasi 17 Agustus 1945 masih merupakan Imagined Community, komunitas yang dibayangkan.²⁴

Gerakan perlawanan terhadap colonial

1. Masa Kolonial Belanda

¹¹ Munculnya *Wahabisme*, dan kemudian *Pan Islamisme*, kedua model gerakan tersebut berpusat di Timur Tengah, sedikit banyak telah mendorong kalangan ulama di Jawa untuk mengetahuinya secara lebih jelas. Lebih-lebih ¹¹ setelah dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, yang memberikan kesempatan kepada para ulama di Jawa untuk mengadakan kontak langsung dengan dunia Arab (negeri pusat Islam). Akibat kontak langsung itu, berbagai perubahan segera melanda kehidupan orang-orang Islam di Jawa. Salah satu gejala yang muncul adalah mengalirnya arus gelombang kekuatan menentang kaum kafir atau penjajah. ¹¹ Kondisi-kondisi yang demikian itu memberikan peluang yang besar kepada kalangan ulama sebagai elit masyarakat untuk memegang kendali dan peranan penting dalam usaha menentang penguasa colonial Belanda. Dalam sejarah Jawa, tercatat hampir selama abad ke 19 sampai pada pertengahan abad 20 di pulau Jawa dijumpai suasana pergolakan social yang tiada henti-hentinya, seperti; huru-hara, kerusuhan social, kekacauan, pemberontakan rakyat.

Dari peristiwa penentangan social-politik terhadap penguasa colonial Belanda itu, berbagai laporan menyebutkan bahwa para pemimpin dan pemuka gerakan tidak lain

²⁴ Firdaus Syam, *Renungan bacharuddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema insani, 2009, h. 87.

adalah kalangan ulama, para haji, dan guru-guru ngaji. Bahkan tidak jarang pula, dalam gerakan penentangan melawan penguasa colonial Belanda, kalangan ulama menjalin persekutuan dengan kalangan bangsawan Jawa.

Untuk menghadapi tumbuhnya gejala-gejala social politik keagamaan itu, pihak penguasa colonial Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan militernya, tetapi menempuh pula jalan nonmiliter, yaitu dengan mengeluarkan kebijaksanaan politik baik di bidang ekonomi, pemerintahan, maupun bidang-bidang kehidupan social kemasyarakatan lainnya. Semua upaya yang dilakukan pihak penguasa Belanda itu bertujuan untuk mengokohkan kekuasaannya di Indonesia. Hal ini dapat berlangsung sesudah pihak colonial Belanda secara perlahan-lahan *tetapi pasti mampu menggeser kekuasaan penguasa pribumi*. Namun kalangan ulama dan para santrinya tidak pernah berhenti memberikan respons social politik keagamaan. Respons-respons dari kalangan ulama dan santrinya selalu merepotkan dan mengganggu ketenangan penguasa colonial Belanda²⁵.

2. Masa Jepang

Setelah dalam beberapa waktu bangsa Indonesia berharap Jepang akan membersihkan sisa-sisa kolonialisme, mereka dikejutkan dengan kebijakan Jepang yang melarang semua gerakan social dan politik pada 15 Juli 1942. Bahkan, beberapa pemimpin ditangkap. Sampai Januari 1943, polisi Jepang (*Kempetai*) mengambil tindakan yang sangat keras terhadap siapa saja yang dicurigai melakukan gerakan bawah tanah. Beberapa pemimpin juga di penjara untuk mengurangi pengaruh mereka. Mereka juga berusaha melaksanakan budaya Jepang kepada penduduk pribumi. Budaya mendapat perlawanan keras adalah keharusan bagi seluruh penduduk pribumi untuk membungkukkan badan setiap pagi ke arah Kaisar Jepang, Tenno Heika (*saikerei*). Sebagian besar umat Islam memandang hal ini sebagai penyembahan terhadap seseorang sehingga dipandang syirik, suatu dosa besar bagi orang yang beriman. Gerakan-gerakan protes terhadap kewajiban ini muncul dimana-mana pada awal pendudukan Jepang. K.H. Hasyim Asy'ari tidak terkecuali mendapat perlakuan yang semena-mena dari pemerintah pendudukan Jepang.

²⁵ . Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa; Peranannya di masa colonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 18-19.

Beliau dipenjara selama empat bulan. Pemimpin NU yang lain seperti K.H. Mahfudz Shiddiq juga dipenjara. K.H. Hasyim Asy'ari dituduh menjadi dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang. Tuduhan ini jelas dibuat-buat oleh Jepang. Alasan yang sebenarnya mungkin karena beliau menolak melakukan *saikerei*. K.H. Hasyim Asy'ari memang mengeluarkan *fatwa* yang mengatakan bahwa umat Islam dilarang melakukan *saikerei*.

Berita dipenjarakannya K.H. Hasyim Asy'ari tersebar cepat ke berbagai pesantren. Pada 1 Agustus 1942, para konsul NU (coordinator setiap wilayah) mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membela orang-orang NU yang ditahan Jepang. Usaha-usaha yang dilakukan kalangan pesantren akhirnya membuktikan pada pemerintahan Jepang bahwa pengaruh ulama dan pengikutnya di tingkat desa bisa sangat membahayakan. K.H. Hasyim Asy'ari akhirnya dilepaskan pada 18 Agustus 1942 setelah mengalami penyiksaan di penjara Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Beliau dikeluarkan setelah beberapa ulama seperti K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Abdul Wahid Hasyim memprotes tindakan Jepang tersebut dengan jalan bersedia di penjara bersama-sama dengan K.H. Hasyim Asy'ari. Selain itu, perubahan kebijakan Jepang pada umat Islam dengan lebih baik bisa jadi merupakan sebab lain dikeluarkannya K.H. Hasyim Asy'ari.

Demonstrasi yang digelar tersebut menyadarkan pemerintah Jepang betapa besar pengaruh Kiai Tebuireng yang menjadi referensi keagamaan seluruh kiai Jawa dan Madura itu. Lagi pula Jepang memandang bahwa tindakan tersebut bukan saja tidak menguntungkan, tetapi merupakan kesalahan fatal terutama dalam upaya rekrutmen kekuatan militer menghadapi tentara sekutu. Kiai Hasyim pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Mulai saat ini Jepang tidak mengganggu kiai dan pesantrennya.

Politik Jepang untuk menarik dukungan massa dengan cara menarik hati kaum Muslim, terutama para kiai, sangat berbeda dengan politik Belanda yang berusaha menghalangi perkembangan Islam menganak-emaskan saingan mereka baik dari kaum adat maupun priayi. Dalam Aziz sebagaimana yang dikutip oleh Lathifatul Khuluq mengatakan bahwa; "Jepang memandang Islam sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk memasuki kehidupan keagamaan bangsa Indonesia dan menyebarkan ide-ide dan keinginan

Jepang ke masyarakat Indonesia”. Melalui para kiai, Jepang dengan sangat efisien dapat menyebarkan ide dan tujuannya, khususnya untuk memobilisir sumber daya alam dan manusia dalam rangka persiapan menghadapi perang dengan sekutu.

Jadi, pada masa pendudukan Jepang kiai dan ulama muncul sebagai elemen baru dalam kehidupan politik nasional. Bahkan Menurut Selo Sumarja, sebagaimana yang dikutip oleh Mujamil Qomar, bahwa; sebagai upaya menjaring simpati kaum Muslimin di Indonesia, preferensi diberikan kepada pemimpin Islam (kiai pesantren), misalnya, dibentuknya Kantor Urusan Agama Indonesia, Masyumi, dan *Hizbullah*. Maka pesantren dan madrasah masih bisa mengoperasikan kegiatan belajar-mengajarnya secara lebih wajar dibanding kegiatan belajar pada lembaga pendidikan umum²⁶.

E. Kedudukan dan Hubungan Pesantren dengan Pemerintah

Di Indonesia kedudukan pesantren diakui oleh pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal. Keberadaan pesantren yang usianya setua masuknya Islam di tanah air memiliki peran yang amat strategis bagi kebangkitan umat Islam di tanah air secara khusus dan berkontribusi besar terhadap kebangkitan nasional Indonesia.

Dalam sebuah artikel¹ oleh YANWAR PRIBADI (penulis kolom) 12 April 2020 mengenai hubungan antara Negara dan Kiai Pesantren pada masa Orde Baru dijelaskan secara gamblang bahwa¹ hubungan antara Negara dan Islam pada masa Orde Baru sering kali bersifat ambigu dan kompleks. Di satu sisi keduanya dapat menunjukkan hubungan yang sangat mesra. Namun, di sisi lain, mereka juga sering kali terlibat dalam hubungan yang tidak harmonis. Yang jelas, apapun bentuknya, Islam pada masa Soeharto tersebut tidak jarang menampilkan kekuatannya yang menantang kewenangan Negara. Hal tersebut

²⁶ . Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transpormasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, tth), h. 13.

¹ sebenarnya tidaklah khas Indonesia, karena Islam juga kerap kali memberikan tantangan bagi Negara-negara Muslim dan non-Muslim lainnya di dunia.

a. ¹ Pesantren

Dalam sejarah Islam di Indonesia, pesantren umumnya dianggap sebagai Lembaga Pendidikan Islam tradisional. Sebagian pesantren mencari bentuk akomodasi dengan pemerintah yang berkuasa sembari menjaga jarak tertentu darinya. Pesantren bersifat tradisional dalam hal materi pendidikannya, yang utamanya adalah pendidikan agama; dalam hal proses belajar dan mengajarnya; dan dalam manajemen, yang utamanya di tangan ulama tradisional.

Setidaknya ada tiga peran penting pesantren di dalam masyarakat Muslim: *Pertama*, sebagai pusat transmisi pengetahuan agama; *kedua*, sebagai penjaga tradisi Islam, *ketiga*, sebagai pusat reproduksi ulama.

¹ Setelah Soeharto berkuasa, kebanyakan pimpinan pesantren mengembangkan pola pikir yang lebih dinamis dalam menjawab tantangan yang diajukan oleh pemerintah Orde Baru untuk memenuhi peningkatan tuntutan pekerjaan dalam sector bisnis dan pemerintahan, menyusul rencana-rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pesantren kemudian dimodernisasi, termasuk dalam hal system pendidikan; misalnya, dengan mengalokasikan 70% kurikulumnya untuk mata pelajaran umum. Akibatnya, banyak lulusan pesantren mampu bekerja dalam berbagai sector dan instansi-instansi pemerintah, dan juga dunia bisnis modern (Hasan 2009:5). Proses modernisasi juga terlihat jelas pada keikutsertaan orang-orang pesantren dalam dunia politik.

b. Kiai

Kiai adalah pelaku utama dalam hubungan antar warga dan Negara di banyak daerah pedesaan di Indonesia pada masa Orde Baru. Bersama dengan figure lain dari para pemimpin local, seperti kepala desa, dan pemimpin-pemimpin adat, mereka adalah para pialang budaya, ekonomi, politik, dan social, yaitu suatu fungsi yang membawa keuntungan-keuntungannya sendiri.

¹ Kiai pesantren adalah kiai yang memiliki dan/atau memimpin pesantren. Dibanding dengan jenis-jenis kiai lainnya, misalnya kiai dukun atau kiai hikmah dan kiai langgar atau kiai kampung, kiai pesantren umumnya dipandang sebagai yang tertinggi derajatnya. Kiai pesantren adalah agen-agen nyata dari kehidupan social, budaya, dan politik warga di tingkat akar rumput dan merupakan contoh paling ideal dari budaya santri. Mereka adalah apa yang diidentifikasi oleh Eric Wolf sebagai para pialang budaya (*cultural broker*), yaitu orang-orang yang menghubungkan system local dengan keseluruhan system yang lebih besar (Wolf 1956: 1075) dan yang menentukan apa yang tepat bagi warga setempat.

Di Jawa pada abad ke 19, kiai tarekat, kiai pesantren dan tokoh-tokoh agama lainnya, seperti guru ngaji, imam, dan juru kunci, dapat meningkatkan kedudukan mereka di pedesaan. Mereka dibutuhkan oleh warga dalam beragam upacara ritual yang sebagian diantaranya tetap dipertahankan hingga sekarang. Sementara itu, dibawa tekanan dari pemerintah colonial Belanda, para bangsawan setempat secara perlahan bergabung ke dalam pemerintahan colonial. Bagi para tokoh agama dan warga desa, hal ini menandakan bahwa para elit telah bergabung dengan penguasa kafir. Akibatnya, para pemimpin keagamaan dan orang-orang desa menjadi jengkel dan tidak puas, karena mereka memandang elite secara ideal sebagai pemimpin yang mandiri dan berpengaruh.

¹ Tidak seperti para bangsawan, tokoh-tokoh agama seperti kiai berhasil menjaga kemandirian mereka. Turunnya wibawa bangsawan membuat kiai dapat memperkuat kedudukan mereka di masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hierarki local yang secara langsung dan tidak langsung disebabkan oleh pemerintah colonial Belanda di Jawa dilihat sebagai factor utama bagi kiai dalam memperkuat kedudukan mereka sebagai pemimpin keagamaan. Namun, di Aceh situasinya agak berbeda karena ulama tampaknya hidup di luar dunia pedesaan dan karenanya bukan merupakan produk alamiah masyarakat pedesaan (Siegel 1969: 48).

c. Hubungan social politik

Keterlibatan kiai pesantren dalam politik pada masa Orde baru tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan sikap tradisional-konservatif dengan menjadi kiai

progresif dan tereformasi. Ada kecenderungan dimana kiai memberikan dukungan politik mereka untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sebagian kecil dari mereka secara terbuka mendukung Golkar. Namun, kebanyakan kiai tetap menjaga jarak dari partai-partai politik selama Orde Baru. Hanya sejumlah kiai tertentu yang secara terbuka ikut serta dalam politik. Cara-cara baru kiai dalam pendekatan politik, seperti mengajak santri yang lebih tua untuk memilih partai politik tertentu, hanya tampak di pesantren-pesantren dimana cara-cara ini sangat dihargai oleh para santri.

Stephen Lyon memberi kita perbandingan yang baik dalam kasus Pakistan. Di sana, ulama memiliki kedudukan yang unik dalam upaya mewarnai hubungan antara mereka dan Negara karena berbagai alasan. Mereka tidak mampu sepenuhnya berada di luar system Negara, sehingga mereka tidak dapat mencapai kemandirian yang memungkinkan mereka untuk benar-benar membangun otoritas legal-rasional dimana para penguasa memegang kekuasaan yang lebih besar daripada mereka sendiri (Lyon 2004: 222).

Menurut Salwa Ismail, secara historis ulama memainkan peran sebagai penasehat, dan keterlibatan mereka dalam politik dan pergulatan kekuasaan dibentuk oleh kedudukan mereka dalam hierarki social dan politik pada waktu tertentu. Namun, mereka berkontribusi pada definisi ruang public melalui pernyataan-pernyataan mereka tentang masalah-masalah kepentingan public, pemberian fatwa, dan melalui dakwah kepada penguasa maupun warga ((Ismail 2004: 153).

Di Indonesia pada masa Orde Baru, di desa dan wilayah-wilayah kecamatanlah kekuatan besar kiai terlihat, tidak hanya oleh warga tetapi juga oleh para pejabat Negara. Di satu sisi, para pejabat ditantang oleh kekuatan para kiai. Namun, disisi lain, mereka juga mendapatkan keuntungan dari kepemimpinan kiai di mata warga. Tanpa dukungan kiai, para pejabat Negara hanya memiliki sedikit kemampuan untuk melibatkan warga desa dalam penerapan program-program pembangunan selama masa Orde baru. Baik para pejabat tersebut maupun para kiai tentu saja menyadari keadaan tersebut. Inilah salah satu penting yang membuat hubungan antara Negara dan kiai- pesantren pada masa Orde Baru menjadi sangat kompleks dan ambigu.

¹ Para kiai pesantren terkemuka menyadari bahwa mereka dapat memperoleh pandangan masyarakat yang lebih akurat dengan cara bertemu dengan warga yang bukan hanya dari daerah mereka sendiri, tetapi juga dari daerah-daerah lain. Pada masa Orde baru, ketika hanya ada sejumlah kecil orang berpendidikan di desa yang memiliki akses radio, televisi, surat kabar, dan majalah, para kiai mampu menyebarluaskan berita-berita terkini kepada para tamu mereka. Dengan dibekali oleh informasi terkini, mereka dapat menyebarluaskan pengetahuan mereka mengenai dunia social-politik di luar tempat asal mereka kepada warga, yang tentu saja kadang-kala pesan-pesan tersebut disesuaikan dengan preferensi social-politik mereka.

Mereka juga menyadari bahwa dengan memperlihatkan kemandirian mereka, para kiai dapat membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Dengan menjauhkan diri mereka dari wilayah yang tidak agamis, para kiai memperoleh kepercayaan dari para pengikut mereka. Selama kiai bersikap mandiri, ia akan menikmati kepemimpinan diantara para pengikutnya.

Memiliki informasi tentunya penting dalam kehidupan social-politik bagi seorang kiai. Sebagai mana dikatakan oleh Anna Tsing, berita adalah informasi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi partisipan dalam kelompok public dan masalah politik. Orang menjadi subjek public dan politik karena ia membaca, menanggapi, dan membuat berita kembali. Namun, membuat berita dan menafsirkan berita melahirkan garis perbedaan dan eksklusi serta ruang partisipasi (Tsing 2003: 192). Kita harus ingat bahwa sebagai elit keagamaan, para kiai melalui pesantrennya dapat merangkul, menantang, dan mengubah ideology dan kebijakan Negara yang dipaksakan pada masa Orde Baru; inilah hal-hal yang yang tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan orang²⁷.

d. Dilema Pesantren Dan RUU Pendidikan Nasional

Para ulama dan pemimpin pesantren yang tergabung dalam Yayasan Pondok Pesantren Indonesia (YPPI) meminta agar RUU pendidikan nasional (RUU-PN) dicabut

²⁷. Yanwar Pribadi (penulis kolom), Google, Diakses 12 April 2020

kembali. Permintaan ini disampaikan dalam acara dengar pendapat dengan Fraksi Persatuan Pembangunan di Jakarta pada senin tanggal 22 Agustus 1988.

Alasan permintaan YPPI adalah karena RUU-PN tidak mengatur pendidikan agama, baik pendidikan agama yang berarti pemberian pelajaran agama di sekolah-sekolah umum maupun lembaga pendidikan agama. Dalam RUU-PN, pendidikan agama hanya disebut dalam pasal 11 (1) yang menjelaskan jenis-jenis pendidikan, bahwa “pendidikan yang termasuk dalam jalur formal dibagi menurut jenisnya dalam pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasaan, dan pendidikan keagamaan.

Namun alasan penolakan yang lebih mendasar bagi YPPI ialah bahwa RUU-PN sama sekali tidak menyebut pesantren, sehingga hal ini dapat menimbulkan tafsiran bahwa pesantren tidak diakui eksistensinya. Tambahan pula umumnya pesantren yang kini berjumlah sekitar 6.000 buah dengan santri lebih dari 1.000.000 orang sangat lemah dalam menyediakan fasilitas yang diatur dalam RUU-PN, sehingga ketentuan pidana RUU ini hendak dilaksanakan, maka pasti sebagian pesantren itu terancam bubar.

Dengan demikian, penolakan pesantren terhadap RUU-PN dapat dimengerti, karena pesantren telah berumur ratusan tahun tentu ingin pula berkipra secara nyata dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, bukannya justru membubarkan diri. Tapi mengatur pesantren dalam RUU-PN tidaklah mudah, sebab disamping pendidikannya sangat beragam, juga pesantren sekarang tidak lagi semata-mata merupakan lembaga pendidikan formal. Pesantren juga merupakan lembaga keagamaan (dakwah).

Lagi pula mengatur pesantren dalam UU dapat menimbulkan masalah baru bagi pesantren, yakni menciptakan ketergantungan pesantren pada pemerintah. Padahal salah satu watak dasar pesantren selama ini ialah watak kemandiriannya. Barangkali ini dilema yang dihadapi pesantren dewasa ini²⁸.

²⁸ . Sudirman Tebba, Islam Orde Baru politik dan keagamaan, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), h. 309-3010

BAGIAN II

NASIONALISME KEBANGSAAN INDONESIA

A. Nasionalisme, Bangsa dan Perspektif para Ahli

Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris “*nation*” yang dalam bahasa Indonesia berarti bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri.¹ Dalam pengertian ini nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai Negara, baik budayanya, masyarakatnya maupun tatanan yang ada di Negara tersebut.

Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada Negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada disepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda.²

Merujuk pada pandangan di atas, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Pengertian ini berbeda dengan *chauvanisme*. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan Negara. Namun pada paham *chauvanisme*, kecintaan kepada Negara sangat fanatic sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan Negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu paham *chauvanisme* ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, paham *chauvanisme* bisa merusak perdamaian dunia.

Hans Khon,³ menjelaskan bangsa merupakan golongan-golongan yang beraneka ragam dan tak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor obyektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya,

¹ R.Suyoto Bakri, *Kamus lengkap bahasa Indonesia* Edisi Terbaru, Pondok Cabe Ciputat Tangerang, 2009, h., 395.

² Hans Khon, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: Erangga, 1984, h.11.

³ *Ibid.*, h. 11-12

misalnya persamaan turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, dan tradisi, atau perasaan agama. Unsur terpenting lainnya yang membentuk bangsa adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang kita namakan nasionalisme, yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk dan yang mewajibkan dirinya untuk mengilhami segenap anggota-anggotanya. Nasionalisme menyatakan bahwa Negara kebangsaan adalah cita-cita dan satu-satunya bentuk sah dari organisasi politik dan bahwa bangsa adalah sumber daripada semua tenaga kebudayaan kreatif dan kesejahteraan ekonomi.

Thomas Hyllad Eriksen menyebut bangsa adalah sebuah komunitas yang diharapkan terintegrasi dalam hal budaya dan identitas diri secara abstrak dan anonim. Di jaman pergerakan kemerdekaan, semangat nasionalisme berhasil dijaga dan ditanamkan sehingga merasuk ke darah daging setiap orang Indonesia, tidak peduli di mana dia lahir dan dari suku apa orang tuanya berasal.⁴

Pada masa lalu kita pernah memiliki rasa nasionalisme paling tinggi karena disebabkan oleh tiga hal: *Pertama*; Bangsa Indonesia menghadapi musuh bersama (*common enemy*), yakni penjajah, adanya musuh bersama ini telah membentuk rasa solidaritas yang sangat tinggi untuk menghadapi dan mengusir musuh; *Kedua*; memiliki tujuan yang sama, yakni ingin mandiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka; *Ketiga*; merasa senasib dan sepenanggungan, semua merasa tertindas dan teraniaya oleh bangsa asing. Kehidupan terasa selalu diinjak-injak dan tidak dihargai. Atas dasar tiga hal tersebut sehingga segenap lapisan masyarakat bersatu, bersinegri dengan kemampuan masing-masing berjuang mengubah nasib bersama.⁵

Sartono Kartodirjo, menjelaskan bahwa proses kebangsaan dikaitkan dengan tiga pendekatan; *Pertama*; teori klasik; dimana suatu bangsa ada dan eksis karena adanya rasa bersama, adanya corak atau pengalaman bersama, ada perasaan senasib dan sepenanggungan. *Kedua*; Adanya *common enemies*, yaitu musuh bersama. Kalau masa lalu

⁴ Lihat Thomas Hyllad Eriksen, dalam Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, h.86.

⁵ *Ibid.* h. 88.

musuh bersama itu adalah kolonialisme. Sedangkan pada masa sekarang musuh bersama kita adalah kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan KKN. *Ketiga*; adanya semangat bersama, kemauan bersama dan tekad juang bersama.⁶

Secara defenitif nasionalisme seringkali dikonotasikan dengan aspek-aspek emosional, kolektif, dan idola serta memori historis. Nasionalisme selalu melibatkan dimensi emosi atau rasa, seperti seperasaan, sepenanggungan, seperantauan, dan senasib. Faktor memori historis adalah faktor kecenderungan yang dibangun untuk menumbuhkan persaan “bersatu” dalam sebuah konsep kebangsaan tertentu.⁷

Ernest Renan menyebut “*Nation*” (nasion) adalah jiwa dan prinsip spiritual yang menjadi ikatan bersama, baik dalam pengorbanan (*sacrifice*) maupun dalam kebersamaan (*solidarity*). Rumusan nasionalisme menurut Ernest Renan adalah keinginan untuk berasatu dan bernegara. Dalam hal ini nasionalisme adalah sebuah keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Dengan adanya persatuan itu maka kondisi Negara akan menjadi kuat dan tidak mudah diguncang dengan masalah dari dalam maupun dari luar, Tanpa adanya sikap nasionalisme, persatuan Negara tidak mungkin terwujud.

Sementara Benedict Anderson, sebagaimana dikutip Hamengku Buwono X, mendefinisikan nasion sebagai “sebuah komunitas politik terbayang” (*an imagined political community*). Nasion pada awalnya lebih dalam bentuk imajinasi pikiran belaka. Namun, nasion kemudian terbayangkan sebagai komunitas, dan diterima sebagai persahabatan yang kuat.⁸

Dalam semangat itulah, nasionalisme Indonesia muncul sebagai satu ikatan bersama melawan kolonialisme. Di sini nasion dan nasionalisme dipakai sebagai perasaan bersama oleh karena penindasan kolonialisme, dan oleh karena itu dipakai sebagai senjata ampuh untuk membangun ikatan dan solidaritas kebersamaan melawan kolonialisme.

⁶ Lihat Sartono Kartodirjo dalam Firdaus Syam, *Renungan Bachraddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Pertama, 2009, h.113.

⁷ Sultan Hamengku Buwono X, *Op.Cite.*,h. 85.

⁸ *I b I d.*, h. 85.

Selain pandangan di atas terdapat beberapa rumusan nasionalisme menurut para ahli,⁹ seperti;

1. Hans Kohn;

Nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini berupa kesadaran nasional bahwa sebuah masyarakat berada ditatanan Negara yang sama. Kesadaran inilah yang akan memperkokoh kondisi sebuah bangsa. Jika kesadaram ini hilang, maka rapuhlah bangsa tersebut. Namun jika kesadaran ini kuat, maka Negara akan menjadi digdaya.

2. L. Stoddard;

Jika nasionalisme adalah sebuah sikap dan rasa saling memiliki. Ini artinya setiap warga Negara merasa memiliki apa-apa yang ada di dalam Negara tersebut. Akibat adanya rasa memiliki ini, maka setiap warga Negara harus menjaga dan mempertahankan apa yang telah dimilikinya. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang apabila merasa memiliki pasti akan merasa untuk wajib menjaga.

3. Dr. Hertz;

Hertz adalah ahli yang menjabarkan pengertian nasionalisme secara lengkap. Dalam pandangan Hertz, nasionalisme dibagi menjadi beberapa pengertian. Menurutnya, nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk merdeka, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk memiliki cita-cita bersama. Simpulannya; nasionalisme adalah sebuah tekad yang ingin dicapai.

4. Louis Sneider;

Nasionalisme adalah perpaduan antara politik, ekonomi, sosial, dan juga intelektual. Menurutnya, jika sikap nasionalisme berkaitan erat dengan sikap berpolitik, berekonomi, bersosial, dan berintelektual. Sebuah Negara yang besar memang harus memiliki kekuatan dalam keempat aspek penting ini.

⁹ Lihat, <https://seputarilmu.com,2019/04>

5. Nasionalisme adalah sesuatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, kesamaan cita-cita dan tujuan. Yang dengan rasa bersama itu itu masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang terdalam kepada bangsa itu sendiri. Yuksinau.id. diungga tanggal 26 Februari 2020.
6. Dr. Hertz; Nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk merdeka, hasrat untuk mencapai keaslian dan hasrat untuk mencapai cita-cita bersama.

Dalam arti luas; nasionalisme adalah orang yang memiliki rasa bangga dan cniita kepada bangsa dan tanah airnya dengan tidak memandang rendah derajat bangsa lainnya. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang di landasi kesadaran memiliki kesamaan perasaan, kesamaan kebudayaan, kesamaan wilayah, kesamaan cita-cita, kesamaan tujuan dan hasrat untuk bersatu dan merdeka yang dengan kesadaran itu masyarakat menunjukkan kecintaan, kesetiaan dan kesediaan untuk rela berkorban kepada bangsa dan Negara.

B. Unsur-Unsur Pembangun Nasionalisme

Dr. Hertz mengemukakan empat unsur nasionalisme yaitu; 1) hasrat untuk mencapai kesatuan; 2) hasrat untuk mencapai kemerdekaan; 3) hasrat untuk mencapai keaslian; 4) hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.¹⁰ Hamengku Buwono X mengemukakan ada tiga unsur (faktor) yang menjadi pemicu munculnya rasa nasionalisme Indonesia di masa lalu yaitu; 1) adanya musuh bersama yang dihadapi (*common enemy*) yaitu penjajah dari bangsa asing; 2) memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mandiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka; 3) adanya rasa senasib sepenanggungan yang melahirkan rasa solidaritas bersatu dan tekad juang bersama sesuai kemampuan masing-masing berjuang mengubah nasib bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama.¹¹

¹⁰ Lihat, <https://bestudi.wordpress.com>”

¹¹ Hamengku Buwono X, *Op.Cite.*, h. 89.

Sejalan dengan Hamengku Buwono, Sartono Kartodirjo, sebagaimana uraian sebelumnya menjelaskan bahwa proses kebangsaan dikaitkan dengan tiga pendekatan; *Pertama*; adanya rasa bersama, adanya corak atau pengalaman bersama, ada perasaan senasib dan sepenanggungan. *Kedua*; Adanya *common enemies*, musuh bersama (penjajah bangsa asing). *Ketiga*; adanya semangat bersama, kemauan bersama dan tekad juang bersama. Kalau pada masa lalu musuh bersama itu adalah kolonialisme. Sedangkan pada masa sekarang musuh bersama kita adalah kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan KKN. Saat ini sebenarnya kita masih memiliki ketiga hal tersebut yaitu;

Pertama; kita masih punya musuh bersama, kalau dulu musuh bersama kita adalah bangsa asing yang menjajah kita bangsa Indonesia, sekarang musuh yang kita hadapi adalah bangsa sendiri berupa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kesenjangan sosial (disparitas sosial) yang tinggi, kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat dalam menghadapi otoritarianisme penguasa, para elit politik dan para pemilik modal, sehingga hakikat kemerdekaan, cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi tidak lebih banyak membawa pada kesjahteraan seluruh rakyat, kecuali lebih pada pemuasan hawa nafsu dan keserakahan menumpuk harta kekayaan sekelompok kecil anak bangsa yang berkuasa, dan yang dekat dengan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, sehingga berdampak pada Negara yang kaya sumber daya alamnya ini nyaris tergadaikan oleh hutang Luar Negeri.

Kedua; lemahnya integritas, kejujuran, kepekaan sosial, keteladanan dan komitmen penguasa dan elit politik dalam mengemban amanat rakyat dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) secara adil dan demokratis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga; Hakikat dan tujuan kita bernegara sebagaimana alinea IV Pmbukaan UUD 1945 yaitu; 1) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung maksud bahwa Negara ini wajib melindungi dan menjamin hak-hak semua warga Negara secara sama dan tidak boleh ada diskriminasi. 2) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ke 3) memajukan kesejahteraan umum. Kesederajatan, kecerdasan serta

kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan bersama bangsa ini masih harus terus diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Indikator bahwa kita masih senasib sepenanggungan adalah rakyat masih banyak berada dalam kategori miskin, bodoh, tertinggal dan masih berada di bawah cengkraman bangsa asing dengan lilitan hutang luar negeri yang semakin membengkak.

C. Nilai-Nilai Nasionalisme Indonesia

Sebagai paham kebangsaan nasionalisme merupakan suatu ajaran yang mengajarkan kepada warga bangsa untuk mencintai bangsa dan negara dengan berabagai hal yang terkait dengannya. Nasionalisme memiliki nilai-nilai fundamental yang menentukan eksistensi dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa amat ditentukan oleh kuatnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa itu. Bagi bangsa yang ingin maju dan kuat, maka hal mendasar yang tidak boleh dilupakan adalah membangun kesadaran nasionalisme bagi seluruh warga Negara bangsa dengan terus menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila diidentifikasi, maka nilai-nilai nasionalisme Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain sebagai berikut;¹²

1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara
2. Mengembangkan rasa cinta, mematuhi dan menghormati agama, adat dan budaya bangsa
3. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia
4. Mengembangkan rasa cinta, menghargai dan menggunakan produk dalam negeri
5. Mengembangkan kesadaran berbangsa, bernegara dan bertanah air Indonesia
6. Mengembangkan kesadaran memiliki rasa berasama sebagai satu bangsa, dan satu tanah air dalam bingkai Negara kesatuan RI.
7. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama anak bangsa

¹² Lihat Contoh-Contoh Nilai-Nilai nasionalisme dalam Gerakan, <https://facebook.com>

8. Mengembangkan kesadaran bersama memiliki cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara yaitu untuk kedamaian, kesejahteraan, kecerdasan, kemakmuran dan keadilan.
9. Memiliki kemauan dan tekad juang yang kuat untuk memajukan bangsa dan negara
10. Mengembangkan rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai suatu bangsa yang Bhinneka Tunaggal Ika
11. Mengembangkan rasa persaudaraan, kepekaan sosial, solidaritas, kedamaian, dan anti kekerasan dalam masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kesatuan
12. Memiliki rasa patriotisme, bertanggungjawab dan mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
13. Memiliki kemampuan awal bela Negara
14. Mengembangkan kesadaran bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara bangsa dan Negara terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan dari dalam maupun luar negeri
15. Mengembangkan cara berpikir positif dan bertindak produktif
16. Mengembangkan sikap saling mengharagai dan menghormati keragaman sesama anak bangsa
17. Mengembangkan sikap hormat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral, budaya adat dan agama
18. Mematuhi nilai-nilai moral, hukum dan peraturan yang berlaku
19. Menghormati dan mematuhi pemerintahan yang sah
20. Berinisiatif mengadakan perubahan demi kemajuan bangsa dan Negara
21. Menyaring masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
22. Menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini kepada generasi penerus bangsa
23. Mendukung tim-tim nasional dalam kompetisi di kancah internasional
24. Menjaga nama baik bangsa dan Negara
25. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
26. Belajar dengan giat demi kemajuan bangsa dan Negara

27. Menghayati dan mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945
28. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
29. Ikut serta dalam upaya pembelaan Negara
30. Memelihara ketertiban masyarakat dengan mematuhi peraturan yang berlaku
31. Mampu berkreasi dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa
32. Menjaga kerukunan di antara sesama warga bangsa
33. Memperingati dan menghayati hari kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa sejarah bangkitnya kesadaran nasionalisme Indonesia
34. Mampu menunjukkan identitas nasional dan kepribadian bangsa dalam pikiran, perkataan, tindakan dan karya
35. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama di antara sesama anak bangsa dan bangsa lain dengan prinsip saling menguntungkan.

D. Nasionalisme Indonesia Di Masa Lalu dan Masa Kini

Ismail Arianto menjelaskan bahwa dari perspektif historis⁴ lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia berpangkal pada dua hal yakni: *pertama* karena perlakuan kolonial Belanda yang mengakibatkan berbagai bentuk penderitaan rakyat. *Kedua*, lahirnya generasi baru pada awal abad ke 20 yakni pemuda yang telah mendapat pendidikan baik melalui pendidikan Belanda di dalam negeri, maupun di luar negeri seperti di Belanda dan Timur Tengah.¹³

Kalau mengenang sejarah kebangkitan bangsa, maka kita⁴ akan sampai pada suatu titik ditemukannya kesadaran akan harga diri yang mendorong para pemuda terdidik untuk berbuat sesuatu agar bangkit dari cengkraman kaum penjajah. Para pemuda menyadari bahwa kehidupan bangsa tidak akan berubah tanpa ada gerakan bersama. Kesadaran inilah

¹³ Lihat Ismail Arianto dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Editor: Dasim Budimansyah, Bandung: Laboratorium PKn FPIPS-UPI, 2006, h. 207.

yang ⁴ membangkitkan kemauan mereka mendirikan berbagai perkumpulan, baik yang bercorak sosial budaya, politik, maupun yang bercorak kedaerahan.¹⁴

Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Firdaus Syam mengutarakan bahwa perubahan sosial itu awalnya dipelopori oleh sejumlah kecil orang (kaum pemuda terpelajar), atau kelompok kecil yang kreatif (*Minority Creative*) yakni kaum muda yang memiliki kesadaran rohaniah yang dalam (*Things of Mind*), kemauan berpikir yang kuat (*Reasoning of Power*). Kedua unsur itu yang melahirkan dalam diri kaum muda terpelajar semangat, daya juang, kepercayaan diri yang tinggi serta keberpihakan kepada mereka yang tertindas atau mereka yang hak-hak keadilannya dirampas dalam hal apapun.¹⁵

Jiwa kepemudaan dengan kepeloporan menuntut untuk menemukan identitas diri menyatu dengan lingkungan tanpa melepaskan nilai keintelektualan yaitu peka terhadap keadaan sosial, keheroikan, berani menyampaikan pendapat, ketajaman perasaan telah menjiwai kehidupan intelektual muda, dalam pengertian sebagai orang yang memiliki nalar (*Reasoning Power*) yang baik tertarik ada hal-hal rohani (*Things of Mind*).¹⁶ Oleh sebab itu pemuda pada hakekatnya adalah orang (mereka) yang melekat dalam dirinya idealisme yakni menjunjung tinggi moral, maju sebagai pelopor, gigih, pantang mundur dalam perjuangan, serta tidak mudah tergelincir untuk kepentingan yang sempit, serta memiliki kemauan kuat untuk melakukan perubahan. Karena itu Soekarno pernah mengatakan, “Serahkan 10 orang pemuda kepadaku, niscaya aku ubah dunia”.

Kemerdekaan Negara RI lahir melalui perjuangan yang amat panjang, menyedot banyak energi, tenaga, pikiran, jiwa dan raga bangsa. Di masa penjajahan, bangsa Indonesia menderita lahir batin dieksploitasi habis-habisan oleh kolonialisme asing. Roeslan Abdul gani menyebutkan, kolonialisme telah mengakibatkan terbongkarnya beberapa akar kebudayaan, dan kebangkitan nasionalisme Asia yang mengusung tiga aspek yaitu 1) aspek

¹⁴ *I b I d.* h.208. Berbagai organisasi yang didirikan oleh kaum pemuda yang telah ikut ambil bagian dalam menyemarakkan pergerakan anti kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan antara lain: SDI,SI,NU, Muhammadiyah, Persis, Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, PPPI, dll..

¹⁵ Firdaus Syam, *Op. Cite.*, h. 78.

¹⁶ Selo Soemardjan, dalam Firdaus Syam, *I b I d.* h. 79.

4 politis yang bersifat ingin menumbangkan dominasi politik bangsa asing yang menjajah; 2) 4 aspek sosial ekonomi yang bersifat ingin menghentikan eksploitasi ekonomi asing untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan sesuai cita-cita keadilan sosial; 3) aspek kultural yang bersifat menghidupkan kembali kepribadian bangsa, membangun dan menemukan kembali jati diri bangsa yang bermartabat, merdeka dan berdaulat.¹⁷

Secara kultural pernyataan kemerdekaan merupakan 8 pernyataan budaya, yaitu pernyataan untuk merubah sikap budaya (*cultural unlearning*) dari rakyat tertindas menjadi rakyat merdeka, dari anak negeri yang berkedudukan sebagai “*koelie* pribumi” menjadi tuang di negeri sendiri, yang pada masa jajahan terdiskriminasi sebagai kaum 8 *inlander* (Pribumi - kelas terendah) di bawah kaum *European* (kulit putih – kelas teratas) dan kaum *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing – kelas di tengah) menjadi kaum yang setara.¹⁸ Sesuai amanat UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum

Di masa lalu Nasionalisme secara politik dan radikal yang tumbuh dan berkembang pada masa perjuangan kemerdekaan telah berhasil melakukan konsolidasi energi bangsa untuk mewujudkan Indonesia merdeka, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajah asing menjadi Negara merdeka yang berdaulat. Tetapi nasionalisme secara ekonomi dan budaya untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat serta bebas menentukan nasib masa depannya dalam membangun kedigdayaan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur, terasa masih jauh dari yang diharapkan. Lantas seperti apa nasionalisme masa kini atau nasionalisme kultural yang mesti dikembangkan saat ini akan diuraikan pada bagian berikutnya.

¹⁷ Lihat Roeslan Abdul gani, dalam Ismail Arianto dalam buku *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. HA. Kosasih Djahiri*, Editor Dasim Budimansyah dan Syaifullah Syam, Bandung: laboratorium PKn FPPIPS-UPI, 2006, h. 209.

¹⁸ Sri Edi Swasono, *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*, Yogyakarta: UST-PRESS, Cetakan Pertama, 2014, h. 1.

BAB III

ISLAM NASIONALISME DAN TANTANGANNYA DI MASA DEPAN

A. Peran Islam Bagi Kebangkitan Semangat Nasionalisme Indonesia

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa risalah Islam yang disampaikan Nabi Muhammad saw, adalah untuk membawa rahmat bagi sekalian alam.¹ Di pase kenabian manifestasi misi suci itu telah berhasil diperlihatkan Nabi Muhammad saw kepada dunia. Bahwa berkat cahaya Islam yang bersumber pada al-Qur'an suci dan ketaladan akhlak Muhammad saw yang paripurna dalam menyerukan kepada umat Islam utuk tampil sebagai umat yang terbaik menjadi saksi kepada sekalian manusia menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.² Menyerukan kepada manusia dan para pemimpin untuk menyampaikan amanat dan berlaku adil kepada sesama manusia, beriman kepada Allah, taat pada Allah dan Rasul serta taat kepada pemimpin.³ Sehingga dengan cahya Islam itu Arab (Makkah-Madinah) yang tadinya dikenal sebagai bangsa yang jahilia, penyembah berhala, judi, mabuk, penista harakat kaum wanita, sektarian (asabiyah), penuh angkara murka terbelakang berubah menjadi bangsa yang beratuhid, tamadun, beradab, maju, demokratis, elegan dan bersendi hukum.⁴

¹ "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam" (Q.s. al-Anbiya': 107)

² "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu". Q. s.al-Baqarah: 143, dan lihat Q.s. al-Imran: 104 "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

³ "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu..... Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)". Q.s. an-Nisa: 58-59.

⁴ Lihat, Muhammad Safii Antonio, *The super Leader Super manager, Teladan Sukses Dalam Hidup Dan Bisnis*, Jakarta: Tazkiyah Publishing dan ProLM. Centre, 2008, h. 145. Dan lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta, PT. Pustaka Litera PintarNusa, Cetakan ke- 40, 2011, h. 195.

Islam sebagai agama universal dan komprehensif, ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari urusan aqidah, ibadah, muamalat termasuk di dalamnya adalah urusan politik menjadi bagian penting yang diajarkan syari'at Islam, terutama dalam kaitan dengan pengembangan dakwah.⁵ Sejak awal pertumbuhan Islam, peran politik telah dimainkan Rasulullah melalui siasat ekspansi dakwah ke wilayah-wilayah di sekitar Mekah, seperti ke negeri Habasyah dan Madinah. Namun demikian, kebanyakan kaum muslimin hingga saat ini masih banyak termakan hasutan dan propaganda kaum sekuler yang memisahkan politik dengan agama, sehingga kaum muslimin mengalami kelemahan dalam kesadaran berpolitik, maka jadilah Islam terus terpinggirkan di kancah politik.

Misi sekuler yang dibawah kaum penjajah nampaknya berhasil mengecoh umat Islam sehingga ada kelompok yang meyakini bahwa agama itu tidak punya tempat dalam mengarahkan dan menata Negara, dengan “semboyan bahwa agama adalah urusan Allah (dalam arti agama itu hanyalah urusan perasaan seorang individu dengan Rab penciptaNya) sedangkan tanah air adalah urusan semua” (urusan dunia penuh kebatilan). Bahwa agama adalah sesuatu dan politik adalah sesuatu yang lain, dan hal itu telah berlaku dalam Islam sebagaimana telah berlaku terhadap agama Kristen.⁶

Yusuf Qardawi mengetengahkan bahwa tampaknya perlu penegasan sikap dalam menghadapi sekularisme, para pendukung dan berbagai argumentasinya. Hal itu dengan menegaskan kekomprehensifan Islam dan mengangkat sisi yang vital ini yang dilengkapi dengan hukum dan nilai-nilai Islam, yaitu sisi yang berkaitan dengan Negara, baik dari segi penataan maupun pengarahannya sesuai dengan hukum dan adab Islam. Kemudian dengan memproklamirkan bahwa hal itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem Islam, berlaku untuk segala zaman dan tempat serta untuk semua

⁵ Lihat, Q.s. an-Nahl: 89, “Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

⁶ Lihat Yusuf al-Qardhawiy, *Fiqh Negara*, Judul Asli, Min Faqh ad-Daulah al-Islam, Penerjemah, Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press., Cet. Pertama, 1997, h. 10.

manusia.⁷ dan al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu sebagaimana dalam surat an-Nahl: 89.yang tersebut di atas.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya "*As-Siyasah asy-Syar'iyah (Kebijaksanaan Syari'ah)*" sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, menegaskan "Perlu diketahui bahwa penunjukkan seseorang sebagai pemimpin merupakan salah satu tugas agama yang paling besar. Bahkan agama tidak akan tegak dan dunia tidak akan baik tanpa pemimpin tersebut. Kemaslahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan menata kehidupan sosial. Karena sebagian mereka memerlukan sebageian yang lain. Sedangkan kehidupan sosial itu harus ada yang memimpinya."⁸

Prof. M. Abdurrahman pada Kata Pengantar dalam bukunya Politik dalam Islam menjelaskan bahwa politik atau siyasah dalam bahasa Arab merupakan fenomena sejak awal adanya pemerintahan dalam Islam di Madinah yang didirikan oleh Rasul saw. Keberadaan pemerintahan dengan negaranya sekaligus menunjukkan bahwa antara Islam dan Negara tidak dapat dipisahkan karena implementasi syari'at Islam dengan berbagai aspeknya, lebih-lebih dalam bidang muamalat hanya dapat dilakukan jika menyertakan peraturan Negara. Maka lahirnya Piagam Madinah merupakan bukti atas pentingnya ada Negara tersebut.

Ulama Islam sejak awal telah memberikan perhatian terhadap masalah siyasah, para ahli Hadis seperti Imam al-Bukhari dan Muslim, mencantumkan secara khusus pada bab (kitab) Imarah (kekuasaan/kepemimpinan) dalam kitab Sahih-nya. Demikian pula para pakar Fiqh Siyasah seperti al-Fara, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah memiliki perhatian khusus atas persoalan Siyasah ini. Seperti ungkapan al- Mawardi yang menyatakan bahwa tugas amir adalah; "**Hirasatuddin wa Siyasatuddunya**", "memelihara agama dan mengatur dunia".⁹

⁷ *I b i d.*, h. 12.

⁸⁸ *I b i d.*, h. 20.

⁹ M. Abdurrahman, Politik Dalam *Islam Ibrah Tarkhiyah wa Nazhrah Waqi'iyah*, Bandung: FKPUIL, 2015, iii.

Di Indonesia paham sekularisme yang dilancarkan penjajah dan diadaptasi oleh kebanyakan kaum nasionalis sekuler, kelihatannya tidak saja cenderung berusaha memisahkan agama dengan politik atau agama dengan Negara, tetapi lebih dari itu ada kecenderungan ingin mengabaikan (menghilangkan) peran Islam dan tokoh-tokoh pejuang muslim (kyai dan ulama) yang mati-matian mengkonsolidasi umat membangkitkan semangat perjuangan membela bangsa dan tanah air dari cengkraman penjajah asing.

Jadi Islam dan umat Islam sesungguhnya telah menunjukkan peran besar terhadap bangkitnya semangat perjuangan berskala nasional, jauh sebelum lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 2 Mei 1908 yang kemudian dijadikan sebagai momentum kebangkitan nasionalisme Indonesia. Jadi peran besar kyai, ulama dan pondok-pondok pesantren yang dengan teguh mentransformasi ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim adalah menjadi bagian penting dan strategis dalam memicu bangkitnya kesadaran kolektif berskala luas di tengah masyarakat untuk bersatu padu berjuang dan berhasil menjadikan Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Namun demikian fenomena sosial politik memperlihatkan seolah-olah spirit Islam dan peran para ulama, tokoh (kyai) yang amat besar itu ingin dikesampingkan dengan gerakan-gerakan yang berpaham modernis lainnya.¹⁰

Sungguh disadari bahwa kekuasaan itu memang memiliki pengaruh yang amat besar dalam menentukan arah perjalanan sejarah, namun demikian rasanya tidak mudah untuk menapikan fakta historis, antropologis dan sosiologis bahwa umat Islam sebagai penghuni mayoritas wilayah nusantara ini dalam darah dan jiwa mereka telah mengalir roh Islam yang menggedor dan memompakan semangat perjuangan, pembebasan, ukhuwah dan solidaritas yang tinggi, anti kolonial (misionaris), berjuang melawan kezaliman penjajah, selamatkan bangsa dari penderitaan, pekik Allahu Akbar, merdeka terus dikumandangkan membakar semangat para pejuang kemerdekaan sampai berhasil menghalau penjajah dari bumi nusantara pilihannya hanya satu “merdeka atau mati

¹⁰ Lihat Remi Madiner, *Partai Masjumi Antara Gogaan demokrasi Dan Islam Integral*, Bandung: Mizan, Cetakan I, 2013, h. 5-7.

syahid”. Peran besar Islam dan umat Islam ini tentu tidak dapat digantikan, diperankan dan dialihkan kepada entitas bangsa lainnya yang ada di nusantara ini sampai kapan pun.

Sebagai misal kekuatan Islam yang melekat pada Sarekat Dagang Islam (SDI) tahun 1905 yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) 1912, oleh para ahli seperti Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa “SI telah berhasil menggerakkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dan menjadikan Islam sebagai symbol nasional”, Demikian halnya P.H. Promberg, mengatakan bahwa SI menggunkan tali agama sebagai pengikat, dan terhadap yang dicita-citakan adalah kemajuan bangsa Indonesia, dan Islam tidak jadi penghambat karenanya. Bahkan Korver memberikan kesimpulan terkait kontribusi organisasi SI terhadap nasionalisme Indonesia sebagai berikut. “Dengan memilih Islam sebagai identitasnya, Sarekat Islam memastikan diri sebagai sarana yang ampuh dalam cita-citanya menuju emansipasi; dan dalam usahanya di sini untuk menarik sebanyak mungkin orang Indonesia dari berbagai kepulauan. Mengingat dia di sini pada tingkat yang cukup tinggi juga berhasil, dapatlah kita menganggap Sarekat Islam (SI) sebagai gerakan yang telah memberikan kontribusi penting bagi penyatuan Indonesia.¹¹

Seorang Jurnalis Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, sebagai Dr. pertama di bidang matematika dan Sains, sebagaimana dikutip Firdaus Syam, bahwa ia menganggap posisi Indonesia sangat Istimewa dan sebagai intelektual yang menghargai makna historis dan kebangkitan Islam di Indonesia. Dalam konteks Sarekat Islam, dalam karyanya “Indonesia di Pasifik”, ia menempatkan organisasi ini sebagai wakil kebangkitan seluruh rakyat yang tertindas. Para kaum maju ini merupakan akar pergerakan nasional atau lazim disebut Kebangkitan Nasional.¹²

George McTurner Kahin ² mencatat sejumlah aspek yang menjadi pemicu munculnya nasionalisme di Indonesia. Selain kesatuan teritori, bahasa kesatuan, majelis

¹¹ Lihat Firdaus Syam, Renungan Bacharuddin Jusuf Habibie Membangun Peradab Indonesia: Setelah 10 dasawarsa kebangkitan Nasional. 10 Windu Sumpah Pemuda dan 10 Tahun Reformasi., Jakarta: Gema isnani, 2009, h. 61.

¹² *I b I d.*, h. 62.

rakyat (volksraad), dan surat kabar, rasa persatuan Indonesia itu dibentuk oleh agama Islam.² Lebih dari 90 persen penduduk Indonesia menganut Islam, kata Kahin saat itu, jelas merupakan faktor terpenting yang mendukung pertumbuhan suatu nasionalisme yang terpadu. "Agama Islam bukan hanya suatu ikatan biasa, ini benar-benar merupakan semacam simbol 'kelompok dalam' (*in group*) untuk melawan pengganggu asing dan penindas suatu agama berbeda."¹³

² Hampir senada, Prof WF Wertheim dalam *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* menekankan bahwa faktor perubahan ekonomi, perubahan sistem status, urbanisasi, reformasi agama Islam, dinamika kebudayaan yang semuanya terjadi dalam masa kolonial telah memberikan kontribusi perubahan reaksi pasif dari pengaruh Barat kepada reaksi aktif nasionalisme Indonesia.

Persi lain menyebutkan peran besar Islam terhadap kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah dipicu oleh hubungan atau persentuhan elit pribumi dengan pendidikan Barat di satu sisi dan jaringan ulama Makkah-Madinah (Timur Tengah) di sisi lain, yang telah membawa dinamika menarik bagi perjalanan nasionalisme Indonesia.

Berawal dari setidaknya empat ulama muda Minangkabau yang merintis gerakan Reformasi Islam di Sumatera Barat pada abad XIX setelah kembali dari menuntut ilmu di Mekkah yaitu; Syekh Muhammad Taher Jalaluddin (tahun 1900), Syekh Muhammad Jamil Jambek (tahun 1903), Haji Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah (tahun 1906), dan haji Abdullah Ahmad (tahun 1899). Mereka adalah murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Imam besar Mazhab Syafi'i di Masjid Makkah asal Minangkabau, seorang maha guru yang berpandangan reformis. Mereka berempat tinggal di Mekkah antara 5-10 tahun, kecuali Taher Jalaluddin yang juga belajar di Kairo selama empat tahun. Mereka kembali ke Sumatera Barat dengan membawa pemikiran

¹³ Lihat, Republika.co.id., *Nasionalisme Indonesia di Tangan Islam*.

baru Islam yang telah dirintis oleh ulama-ulama reformis Mesir , yakni Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh.¹⁴

Gerakan reformasi Islam yang telah dirintis di Sumatera Barat tersebut kemudian berlanjut dan menjalar ke Jawa dan berbagai daerah lain di Indonesia. Yang berbeda antara gerakan reformasi abad XIX dengan abad XX adalah intensitas dan organisasi gerakannya. Jika pada abad XIX reformasi lebih merupakan gerakan salafi ,melawan kaum adat, pada abad XX lebih menekankan pencarian etik modernitas dari dalam ajaran untuk melawan tradisionalisme dan kemunduran yang dialami oleh umat Islam., serta menghadapi Barat yang menjajah mereka.¹⁵

² Secara global, kaum Muslim menyambut antusias gagasan ini lantaran hampir sebagian besar kawasan dunia Islam mengalami penjajahan. Kebangkitan nasionalisme di dunia Islam bersamaan waktunya dengan kemunculan gerakan pembaruan pemikiran Islam, terutama yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh dan Rasyid Rida.

Dalam menghadapi imperialisme Barat, al-Afghani memfokuskan gerakan politiknya pada Pan Islamisme dengan berlandaskan pada suatu teori bahwa “umat Islam sedunia berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Negara-negara Islam yang seharusnya melindungi para warganya dan memberi mereka suatu kehidupan dan penghidupan yang baik berada dalam posisi tak berdaya karena menjadi korban ambisi penjajahan Barat.¹⁶

Untuk memperbaiki situasi itu, umat Islam harus bersatu padu agar dapat menggalang suatu kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi dan melawan dominasi penjajahan dan pelanggaran-pelanggaran Barat. Untuk mewujudkan upaya itu, Islam merupakan faktor yang sangat penting dan strategis. Ia merupakan satu-satunya ikatan

¹⁴ Lihat, *Indonesia Dalam Arus Sejarah 5 Masa Pergerakan Kebangsaan*; Redaksi Pelaksana; Dr. Restu Gunawan, Editor, Starlita, J.V. Barus, Pictor Pane dkk. PT. Ichtiar Baru Van Hove atas kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tahun 2012, h. 333

¹⁵ I b I d.

¹⁶ Faisal Ismail, *Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas SAEjarah*, Yogyakarta: PT. Tiayara Wacana Yogya, 2001, h. 17.

memersatu bagi kaum muslimin. Jika ikatan ini kuat, maka kekuatan solidaritas yang hebat dapat timbul yang memungkinkan terciptanya suatu Negara yang kuat dan stabil. Untuk mewujudkan tujuan itu Afghani mengajarkan bahwa setiap kelompok umat Islam harus bergerak dan memperkuat diri dengan menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok umat Islam lainnya yang sedang bangkit dalam gerakan solidaritas politik Pan Islam guna melawan Barat.¹⁷ Sebab Eropa-Barat dapat menguasai negara-negara Muslim, tidak lain karena umat Islam tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, umat Islam harus mencerdaskan diri dan meningkatkan taraf kehidupan. Pengaruh reformisme ini menggugah kesadaran umat Islam di negara-negara Muslim.

Prof. Ridwan Lubis dan Muhamad Hisyam dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam menuturkan, kesadaran kebangsaan itu mula-mula tumbuh di Turki. Gencarnya tekanan Eropa terhadap imperium Turki Utsmani yang kian melorot menyebabkan Turki berusaha mempertahankan diri. Sayangnya, negara ini terjebak pada sekularisme dan 'turkifikasi', men-Turki-kan segala sesuatu. Selanjutnya, nasionalisme tumbuh di Mesir pada masa pemerintahan Chediv Ismail pada akhir abad ke-19. Waktu itu, Inggris mulai ikut campur dalam urusan dalam negeri Mesir. Ketika intervensi ini disadari rakyat, muncul paham kebangsaan mereka.

² Islam membentuk watak antikolonial sekaligus menjembatani perbedaan etnis dalam pembentukan nasionalisme. "Pergerakan Islam pulalah yang pertama-tama meretas jalan di negeri ini bagi kegiatan politik yang mencita-citakan kemerdekaan yang telah menebarkan benih kesatuan Indonesia," kata M Natsir dalam *Indonesisch Nationalism*, *Pembela Islam* No 36 Oktober 1931, sebagaimana dikutip Endang Saifuddin Anshari dalam "Piagam Jakarta 22 Juni 1945. "Konsep nasionalisme dalam pengertian ikatan persatuan antaretnis untuk pertama kali dipakai dan memperoleh makna persatuan yang sesungguhnya oleh dan dari kalangan Islam," sambung Natsir. Serupa, Deliar Noer dalam *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1990-1942*

¹⁷ *Ibid.* h. 18.

2 menambahkan bahwa Islam identik dengan nasionalitas. Dapatlah dikatakan bahwa nasionalisme di Indonesia dimulai dengan nasionalisme Muslim.¹⁸

Fakta historis yang dapat ditunjuk misalnya adalah Sarekat Islam memiliki andil besar terutama dalam hal: *Pertama*, menjadikan nilai-nilai spritualisme agama Islam sebagai kekuatan perekat di nusantara yang kemudian menjadikan rakyat di sini memiliki budaya yang didasarkan kelompok etnik menyatu sebagai sebuah bangsa yaitu bangsa Indonesia; *Kedua*, Sarekat Islam sebagai organisasi yang memberikan kekuatan inspirasi membangun sikap mandiri bagi bangsa Indonesia, ini terlihat dari cita-cita untuk mengangkat martabat kalangan pribumi dalam kemampuannya bersaing di bidang perdagangan (ekonomi) dengan kaum lainnya; *Ketiga*, menjadikan SI sebagai suatu organisasi yang memperjuangkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya di kalangan muslim untuk mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesadaran politik, semangat nasionalisme pada akhirnya berujung sebagai organisasi pergerakan untuk melawan kolonialisme, dengan cara yang demikian populis (merakyat) dan berbasis Islam. Dalam kaitan ini B.J. Habibie mengemukakan bahwa, Sarekat Islam merupakan organisasi modern pada masa itu yang menjadikan iman dan taqwa (Imtaq) sebagai salah satu dasar penting dalam pembentukan semangat kebangsaan serta penggembelngan sumber daya manusia Indonesia yang andal.¹⁹

Jadi peran dan kontribusi Islam bagi kebangkitan semangat nasionalisme dalam membentuk Indonesia sebagai Negara merdeka sangat besar dan jelas. Dalam konteks ini Taufiq Abdullah menjelaskan bahwa dalam berhadapan dan menjalani berbagai peristiwa sejarah ada tiga asumsi dasar yang saling berkaitan, ikut membentuk wajah politik Islam. Ketiga asumsi ini memperlihatkan pengaruhnya sampai sekarang.

Pertama, seperti telah sering dikemukakan, Islam adalah suatu konsep keutuhan yang tidak memisahkan Negara dan masyarakat sebagai kenyataan yang kongkrit. Meskipun secara konseptual suasana keduanya bisa dibedakan – yang satu sebagai

¹⁸ Lihat, Republika.co.id. *Nasionalisme Indonesia di Tangan Islam*.

¹⁹ Firaus Syam, *Op.Cit.*, h. 70.

organisasi kekuasaan yang sah dan yang lain ikatan social yang dibimbing oleh nilai-nilai cultural – tetapi dalam kedua suasana itu manusia sebagai individu-individu harus membina hidupnya sesuai dengan kehendak Ilahi. Dari sudut doktrin, Negara dan masyarakat hanyalah wadah bagi terbinanya manusia yang taqwa. Perpisahan kedua konsep kesatuan social ini secara kongkrit, dan malah, penentuan corak hubungannya menjadi problem yang sering bercorak dilematis dalam tradisi pemikiran politik Islam, sebab tujuan akhir hidup adalah memenuhi tugas sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Kedua, pengalaman dan peranan historis Islam dan proses pembentukan Negara dan bangsa – mulai dari zaman kesultanan sebagai lembaga yang pertama tampil melawan gerak maju kolonialisme, perlawanan rakyat yang dipimpin para ulama SI, sampai kepada pembentukan lasykar-lasykar rakyat selama masa revolusi. Di atas semua itu ialah dorongan emosional atau daya efektif dari seruan *jihad* dalam mempertahankan kemerdekaan nasional. Pengalaman historis ini, yang sebagai “sejarah” bersifat fragmentaris, terintegrasi dalam suatu kesadaran sejarah yang utuh. Dalam kesadaran sejarah yang utuh ini, tampillah Islam sebagai penentang kolonialisme dan imperialism yang paling awal dan paling konsisten. Dalam kesadaran ini pula peranan Islam sebagai peletak dasar bagi terwujudnya integrasi nasional, baik dari sudut teritorial, politik, maupun kultural, memperlihatkan dirinya. Konsep *Ummah*, komunitas dari pada para pemeluk, bukan saja secara koseptual meniadakan batas-batas geografis dari kekuasaan tetapi juga menjadi factor dari berbagai komunitas local ke dalam kesadaran sejarah bersama yang utuh. Di samping itu perekaman akan pentingnya niat “karena Allah” (*lillahi ta’ala*) dalam sistem perilaku, bertambah pula memperkuat proses pewarnaan Islam terhadap peristiwa sejarah yang empiris.

Ketiga, kenyataan kuantitatif bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk Islam²⁰. Satu-satunya asas perjuangan kaum Muslimin adalah Islam itu sendiri. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia asas Islam telah terbukti dapat membangkitkan rasa persatuan dan semangat juang yang militan. Pada masa itu, Partai Sarikat Islam dan Muhammadiyah telah memiliki anggota ratusan ribu orang dan memiliki cabang di

²⁰ . Taufiq Abdullah, Islam dan Masyarakat, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), h.37-38

seluruh tanah air. Sebagaimana dikatakan Muhammad Nasir. “Pergerakan Islamlah yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah air, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia, yang menyingkirkan sifat kepulauan dan keprovinsian, yang mula-mula menanam bibit persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali ke-Islaman²¹.

B. Pergerakan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia

Berbicara mengenai kebangkitan semangat nasionalisme Indonesia, pada umumnya selalu dikaitkan dengan kelahiran organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Padahal kalau dirunut ke belakang kesadaran akan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, perasaan senasib, keinginan untuk bebas merdeka melepaskan diri dari belenggu penjajah bangsa asing, justru jauh sebelum Budi Utomo lahir, deru semangat dan gerakan perlawanan telah dirasakan tumbuh berkembang dalam jiwa mengiringi perjuangan masyarakat melawan kolonialisme asing di bawah komando tokoh, ulama dan pimpinan daerah masing-masing, sejak kolonialisme asing itu menancapkan aksi penindasan, kekejian, penghisapan ekonomi dan kekejaman terhadap pribumi.

Fakta-fakta historis memperlihatkan bahwa nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme telah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa selaku perintis kemerdekaan dari masing-masing daerah seperti; *Pertama*; perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah tahun 1817 di bawah pimpinan Kapitan Pattimura (Thomas Matulesy), dan dibantu oleh; Philip Latumahina, Thomas pattiwael, Antoney Reebok dan Christina Marta Tiahahu.

Kedua; Perlawanan rakyat Tidore-Ternate di bawah pimpinan Sultan Nuku Muhammad Amiruddin Saleh sebagai pejuang yang tidak dapat diajak kompromi oleh pemerintah kolonial Belanda demi mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Tidore. Pahlawan nasional yang satu ini disebut tidak pernah kalah dalam perjuangan melawan pasukan kompeni. Ia selalu berhasil dan mampu mengusir penjajah dari Maluku Utara

²¹ . A. Hasan, Islam dan kebangsaan, (Bandung: Segarsy, 2019), h.8

tahun 1783. Karena keberaniannya Belanda menjulukinya dengan Prins Rebel (Pangeran Pemberontak).

Ketiga; Perlawanan Sultan Hasanuddin (Ayaam jantan dari Timur) sebagai pemimpin perang rakyat Sulawesi/Makassar dalam melawan Belanda pada tahun 1660. Demikian halnya perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang berjuang mengangkat senjata melawan Belanda tahun 1825-1830 di Jawa Yogyakarta. Juga Teuku Umar tahun 1854 pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal dengan strategi gerilya, ia dibantu istrinya Cutnya Dhien melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak.

Hal yang sama dilakukan oleh Pangeran Antasari pimpinan kesultanan tertinggi Kesultanan Banjar memimpin perlawanan rakyat Kalimantan kepada Belanda tahun 1859. Demikian halnya Tuanku Imam Bonjol, sebagai ulama, pemimpin dan pejuang berperang melawan Belanda di Sumatera Barat yang dikenal dengan perang Padri 1803-1838. Demikian itu diantara para pahlawan yang telah merintis jalanya kemerdekaan selain Jenderal Soedirman, KH. Hasyim Asy'ari, Ki Hajar Dewantara, Bung Tomo, Sutan Sjahrir, RA. Kartini, Tan Malaka, Soekarno dan Bung Hatta.²²

Kebangkitan semangat nasionalisme sebagai kebangkitan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dari keseluruhan rangkaian perjuangan dalam rentang sejarah perjalanan bangsa mulai dari pergerakan perintis kemerdekaan bertempur melawan Belanda, pergerakan organisasi seperti Budi Utomo 20 Mei 1908, Sarikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905, Sarikat Islam (SI) tahun 1912, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kebangkitan Teknologi dan Reformasi, semuanya merupakan mata rantai dari kesadaran akan perlunya "kebebasan". Suatu kebebasan yang diiringi oleh adanya rasa tanggung jawab. Kebebasan yang dimaksud menurut B.J. Habibie, adalah kebebasan untuk membangun kehidupan bangsa yang demokratis, kebebasan yang menghormati hak asasi

²² Lihat Pahlawan Perintis Pejuang Kemerdekaan, <https://www.tokopedia.com> dan <https://m.detik.com>

manusia sekaligus menegakkan kewajiban asasi manusia yaitu manusia yang mandiri, bermartabat, berdaya saing tinggi untuk mempersiapkan diri memasuki abad globalisasi.²³

Ismail Arianto menjelaskan bahwa dari perspektif historis lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia berpangkal pada dua hal yakni: pertama karena perlakuan kolonial Belanda yang mengakibatkan berbagai bentuk penderitaan rakyat. Kedua, lahirnya generasi baru pada awal abad ke 20 yakni pemuda yang telah mendapat pendidikan baik melalui pendidikan Belanda di dalam negeri, maupun di luar negeri seperti di Belanda dan Timur Tengah.²⁴

Kalau mengenang sejarah kebangkitan bangsa, maka kita akan sampai pada suatu titik ditemukannya kesadaran akan harga diri yang mendorong para pemuda terdidik untuk berbuat sesuatu agar bangkit dari cengkraman kaum penjajah. Para pemuda menyadari bahwa kehidupan bangsa tidak akan berubah tanpa ada gerakan bersama. Kesadaran inilah yang membangkitkan kemauan mereka mendirikan berbagai perkumpulan, baik yang bercorak sosial budaya, politik, maupun yang bercorak kedaerahan.²⁵

Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Firdaus Syam mengutarakan bahwa perubahan sosial itu awalnya dipelopori oleh sejumlah kecil orang (kaum pemuda terpelajar), atau kelompok kecil yang kreatif (*Minority Creative*) yakni kaum muda yang memiliki kesadaran rohaniah yang dalam (*Things of Mind*), kemauan berpikir yang kuat (*Reasoning of Power*). Kedua unsur itu yang melahirkan dalam diri kaum muda terpelajar semangat, daya juang, kepercayaan diri yang tinggi serta keberpihakan

²³Lihat B.J. Habibie, dalam Firdaus Syam, *Renungan Bachrauddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema insani, 2009, h. 72.

²⁴ Lihat Ismail Arianto dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Editor: Dasim Budimansyah, Bandung: Laboratorium PKn FPIPS-UPI, 2006, h. 207.

²⁵ *I b I d.* h.208. Berbagai organisasi yang yang didirikan oleh kaum pemuda yang telah ikut ambil bagian dalam menyemarakkan pergerakan anti kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan antara lain: SDI,SI,NU, Muhammadiyah, Persis, Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, PPPI, dll..

kepada mereka yang tertindas atau mereka yang hak-hak keadilannya dirampas dalam hal apapun.²⁶

Jiwa kepemudaan dengan kepeloporan menuntut untuk menemukan identitas diri menyatu dengan lingkungan tanpa melepaskan nilai keintelektualan yaitu peka terhadap keadaan sosial, keheroikan, berani menyampaikan pendapat, ketajaman perasaan telah menjiwai kehidupan intelektual muda, dalam pengertian sebagai orang yang memiliki nalar (*Reasoning Power*) yang baik tertarik ada hal-hal rohani (*Things of Mind*).²⁷ Oleh sebab itu pemuda pada hakekatnya adalah orang (mereka) yang melekat dalam dirinya idealisme yakni menjunjung tinggi moral, maju sebagai pelopor, gigih, pantang mundur dalam perjuangan, serta tidak mudah tergelincir untuk kepentingan yang sempit, serta memiliki kemauan kuat untuk melakukan perubahan. Karena itu Soekarno pernah mengatakan, “Serahkan 10 orang pemuda kepadaku, niscaya aku ubah dunia”.

Kelahiran beberapa organisasi pergerakan seperti Sarikat dagang Islam (SDI) tahun 1905 kemudian berubah menjadi Sarikat Islam (SI) tahun 1912, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan momen-momen penting yang menunjukkan lahirnya kesadaran kebangkitan semangat nasionalisme bangsa yang dipelopori kaum muda terdidik untuk mengusung kebangkitan Indonesia merdeka.

Dalam konteks kepentingan merawat kelangsungan bangsa yang telah menegara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan saat ini dan di masa akan datang, maka nilai-nilai kejuangan yang pernah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa saat itu menjadi amat penting untuk dimaknai, dipetik dan direfleksikan kembali dalam membangun nasionalisme keindonesiaan saat ini.

C. Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Sarekat Islam (SI)

Sarekat Dagang Islam (SDI) yang digagas oleh H. Samanhoedi dengan Raden Mas Tirto Soerjo tahun 1905 muncul sebagai bentuk perlawanan atas monopoli

²⁶ Firdaus Syam, *Op. Cite.*, h. 78.

²⁷ Selo Soemardjan, dalam Firdaus Syam, *I b I d.* h. 79.

perdagangan dan superioritas orang-orang Tionghoa terhadap pribumi khususnya umat Islam dan ditambah lagi dengan isu penyebaran agama Nasrani oleh *Chistelijke Zending*, maka para ulama dan tokoh-tokoh pergerakan di kalangan Islam bergerak bersama melakukan penggalangan kekuatan untuk mempersatukan bangsa dan memajukan kekuatan ekonomi dengan dasar agama.²⁸

Agar ruang pergerakan menjadi lebih luas tidak sebatas pada persoalan ekonomi maka SDI kemudian dirubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sarekat Islam (SI) mengalami kejayaan. Sebagai seorang tokoh kharismatik H.O.S. Tjokroaminoto juga berhasil mendidik tokoh yang cukup menonjol dalam perjuangan politik Indonesia seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Alimin dan lain-lain.

Dari segi keanggotaan, Sarekat Islam menghimpun semua kalangan dari lapisan menengah ke bawah dalam berbagai bidang pekerjaan dan profesi. Karena organisasi ini dibangun atas dasar spirit ajaran Islam dan basis gerakannya adalah umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Nusantara, sehingga keanggotaannya meningkat amat cepat. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda sehingga dipraktekanlah politik klasik *Divide et Impera*. Sebagai dampaknya muncullah Revivalisme Islam di dalam tubuh SI yang tidak sedikit berujung pada terjadinya konflik di beberapa tempat di pulau Jawa. Akar masalahnya dapat dilacak setidaknya karena tiga hal yaitu, 1) Adanya persaingan dalam perdangan antara Tionghoa dengan Pribumi; 2) Adanya aktiviatas penegakkan nilai moral dan amar ma'ruf nahi munkar, antara lain pemberantasan pelacuran dan perjudian; 3) Adanya kebencian dan kekhawatiran terhadap Islam sebagai kekuatan pemersatu dan pembangkit kesadaran berbangsa sehingga dilancarkan politik adudomba.²⁹

Perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh Islam dalam bidang politik, sosial dan peradaban adalah tidak lain karena Islam sebagai agama telah mengajarkan

²⁸ C.S.T. Kansil & Juliantono, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1985, h. 22 & 25.

²⁹ Lihat ST. Sulatro dalam Firdaus Syam, h. 57.

prinsip-prinsip nilai fundamental kepada pengikutnya seperti; 1) Islam mengajarkan adanya kehidupan akhirat yang berkesinambungan dengan kehidupan duniawi. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi kehidupan akhirat, artinya kehidupan tidaklah berakhir di dunia tetapi berlanjut di akhirat, kebaikan yang dilakukan didunia akan dipetik hasilnya dalam wujud kebahagiaan syurga di akhirat, demikian sebaliknya setiap tindak lezalian, kemungkaran dan kefasikan akan berakibat pada kesengsaraan neraka di akhirat; 2) Islam mengajarkan pada pemeluknya bertanggung jawab atas nasibnya sendiri di dunia dan di akhirat. Hidup ini adalah amanat dan setiap insan diletakan dalam dua posisi yaitu sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan hanya kepada Allah, dan sebagai khalifah untuk memakmurkan kehidupan di bumi; 3) Islam mengajarkan aturan hidup bermasyarakat dan bernegara, meletakkan setiap individu manusia memiliki harkat dan derajat yang sama, tidak membeda-bedakan latar belakang suku, sosial budaya tetapi kemuliaan manusia diletakan pada tingkat keimanan dan ketaqwaan yang mewujudkan dalam bentuk prestasi sosial kemanusiaan yang mendunia.

Orientasi dan cakupan gerakan Sarekat Islam (SI) mencakup; 1) memajukan semangat dagang di kalangan bumi putra; 2) memberikan bantuan kepada anggota perkumpulan yang mendapat kesulitan; 3) memajukan pendidikan rohani dan kepentingan material Bumi Putra; 4) menghilangkan salah pengertian mengenai agama Islam dalam memajukan kehidupan keagamaan; 5) menempuh segala macam cara dan menggunakan semua jalan yang diperkenankan dan tidak bertentangan dengan ketentraman umum serta adat istiadat yang baik.³⁰

Sarekat Islam (SI) termasuk organisasi yang menggunakan konsep bangsa dalam pengertian etnis dan bebas dari rasa kedaerahan. Hal ini telah membuka jalan ke arah nasionalisme dan merupakan bibit persatuan Indonesia. Dalam organisasi ini orang merasa dan menemukan wadah persaudaraan di antara kaum senasib di tanah air yang telah dapat dipertautkan. Karena itu, bagi kalangan Islam atas dasar kenyataan sejarah, menjadi landasan persatuan tanpa melandaskan diri dengan agama. Mereka beranggapan

³⁰ Firdaus Syam, *Op.Cit.* h. 60.

bahwa Islam sesungguhnya lebih sesuai untuk dijadikan dasar dan landasan persaudaraan untuk membangun bangsa.³¹

Sarekat Islam merupakan suatu perkumpulan yang memberikan kontribusi besar terhadap penyatuan Indonesia sekaligus memberi andil besar bagi pertumbuhan kesadaran nasional dan kebangkitan Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip Firdaus Syam menyebutkan bahwa SI telah berhasil menggerakkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dengan menjadikan Islam sebagai symbol nasional'. Hal yang sama dinyatakan oleh P.H. Promberg bahwa SI menggunakan tali agama sebagai pengikat, dan terhadap yang dicita-citakan adalah kemajuan bangsa Indonesia, dan Islam tidak jadi penghambat karenanya.

Selanjutnya Korver memberikan kesimpulan bahwa dengan memilih Islam sebagai identitasnya; Sarekat Islam memastikan diri sebagai sarana yang ampuh dalam cita-citanya menuju emansipasi; dan dalam usahanya di sini untuk menarik sebanyak mungkin orang Indonesia dari berbagai kepulauan . mengingat dia di sini pada tingkat yang cukup tinggi juga berhasil, dapatlah kita menganggap Sarekat Islam sebagai gerakan yang telah memberikan kontribusi penting bagi penyatuan Indonesia.³²

D. Budi Utomo

Tanggal 20 Mei 1908 lahir Budi Utomo yang selanjutnya dikenang sebagai hari kebangkitan nasional. Suatu ketika dr. Wahidin Sudirohusodo menyampaikan gagasan kepada teman-teman yuniornya di kampus STOVIA³³ Jakarta tentang keinginannya untuk mendirikan suatu usaha atau gerakan yang bertujuan meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Gagasan itu direspon positif oleh Sutomo dan kawan-kawanya dengan membentuk perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo.

³¹ Lihat Taufik Abdullah dalam Firdaus Syam, *I b I d.* h.61.

³² Firdaus Syam, *I b I d.*

³³ Di Kampus STOVIA pula kemudian lahir Jong Java 1915, Jong Sumatera Bond 1910, Jong Minahasa 1918. Jadi selain melahirkan pemuda-pemuda terpelajar yang memelopori merintis kemerdekaan, tempat ini juga menjadi tempat lahirnya organisasi-organisasi pdrgerakan kemerdekaan dan pemuda yang merintis perjuangan Indonesia. Lihat Firdaus Syam, *I b I d.* h.51.

Beberapa anak muda terdidik yang memiliki pikiran progresif bergabung dalam perkumpulan ini umumnya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semuanya ingin melakukan pendobrakan untuk memperbaiki kondisi pribumi yang menyedihkan yaitu hidup serba santai, malas dan berleha-leha.

Ketua perkumpulan Budi Utomo adalah Sutomo, dikenal sebagai seorang yang memiliki kepribadian yang baik hati, jujur, sederhana, bicara seadanya, tidak suka pamer (popularitas), terbuka pada perbedaan, menerima kebenaran seburuk apapun, tidak suka korupsi, komitmen pada orientasi gerakan yaitu, kerja sama dan bersatu untuk mencapai tujuan.

Budi Utomo memiliki tujuan yaitu pada jangka pendek adalah memberikan perhatian utama kepada unsur pribumi dalam masyarakat Jawa, dengan harapan kelak dikemudian hari melihat organisasi ini tumbuh menjadi perhimpunan yang lebih universal sehingga akan menciptakan persaudaraan nasional tanpa pandang suku, kelamin atau kepercayaan.

Dalam mengungkap perjuangan nasional, Budi Utomo lebih menekankan pada gerakan pendidikan dan kebudayaan daripada gerakan politik. Asvi Marwan Adam mengutarakan Budi Utomo pada dasarnya merupakan lembaga yang mengutamakan aspek kebudayaan dan pendidikan serta jarang memainkan peran politik yang aktif. Berbeda dengan Adrian Vickers, berpandangan bahwa lahirnya Budi Utomo bisa dipertimbangkan sebagai hari jadi Indonesia karena organisasi modern yang pertama ini menggunakan bahasa Melayu serta menggemakan rasa cinta tanah air dengan mendorong konsolidasi dan gerakan bangkitnya kaum terdidik (cendekiawan).³⁴

Robert Van Niel sebagaimana dikutip Firdaus Syam, menilai kelahiran Budi Utomo pada awalnya tidak bercita-cita untuk membangun suatu bangsa. Namun kehadiran Budi Utomo menjadi penting karena inilah organisasi modern pertama di Indonesia yang tampil dengan mengikuti garis-garis Barat.

³⁴ Lihat Firdaus Syam, *Ib Id.* h.54.

Karena karakter dan bersifat moderat serta jauh dari radikalisme itu, sehingga pemerintah kolonial Belanda menerima kehadiran Budi Utomo meskipun tetap diawasi. Gubernur jenderal J.B. Van Heutz, menilai Budi Utomo sebagai organisasi yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermamfaat bagi negeri dan rakyat, asalkan sejak pertama pimpinan organisasi tersebut berada ditangan yang baik.³⁵

Keistimewaan organisasi Budi Utomo dibanding yang lain adalah karena; 1) sikap dan cara pengorganisasian bersifat moderat, terbuka dan jauh dari radikalisme; 2) bersifat kooperatif dan mau bekerja sama; cara pengorganisasian mulai mengadaptasi cara kerja organisasi modern; 3) sasaran yang ingin dicapai bersentuhan dengan hajat hidup rakyat banyak; 4) konsentrasi gerakan pada memajukan pendidikan dan kebudayaan (martabat bangsa).

E. Antara Sarekat Islam dengan Budi Utomo

Kalau dilihat dari latar ideology dan basis gerakan, kedua organisasi ini sebenarnya memiliki ideology dan basis gerakan yang berbeda. SI berideologi Islam dan menjadikan Islam sebagai kekuatan perekat persatuan yang diawali dengan mempersatukan umat Islam karena kesatuan aqidah kemudian menyebar dan berkembang menjadi pemersatu bangsa. Basis gerakannya adalah masyarakat Islam dari seluruh lapisan/kalangan mulai dari kalangan atas, menengah hingga rakyat kecil, sehingga praktis SI saat itu lebih populer dan familiar ketimbang Budi Utomo. Karena Budi Utomo tidak menjadikan Islam sebagai ideology gerakan organisasi, tetapi lebih pada pembangunan budaya dan pendidikan yang pada mulanya adalah lebih memberi perhatian pada kaum pribumi dari kalangan masyarakat Jawa, kemudian diharapkan organisasi ini bisa berkembang menjadi perhimpunan yang bersifat universal yang bisa menciptakan persatuan tanpa memandang suku, bangsa dan agama.

Tetapi secara prinsip kehadiran kedua organisasi ini merupakan respon konkrit terhadap kondisi bangsa yang tak berdaya atas kekejaman penjajah yang telah menyebabkan terbongkarnya akar-akar kebudayaan bangsa yang adiluhung, bersatu,

³⁵ *ibid.*

berbudaya dan bertuhan, berubah menjadi bangsa yang pemalas, penerabas, berpecah-belah dan mau menang sendiri. Berangkat dari proses sejarah perjuangan yang panjang dan perenungan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dialami bangsa dalam menghadapi penjajah, maka kehadiran SI dan Budi Utomo dapat dipandang sebagai moment strategis bertemunya ideology Islam dan kebangsaan yang selanjutnya memicu kesadaran bangkitnya perhimpunan dan pergerakan dari berbagai daerah untuk memperkokoh persatuan nasional sehingga lahir sumpah pemua 28 Oktober 1928 yang berbuah manis dengan diraihnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jadi tidak elok rasanya bila kita mempertentangkan apakah Budi Utomo atau Sarekat Islam yang paling mengemuka dalam menentukan titik awal momentum kebangkitan nasionalisme Indonesia. Yang paling terpenting menurut penulis adalah bagaimana kita bisa menangkap bara api semangat yang telah diusung dan diperlihatkan kedua organisasi pergerakan tersebut bagi anak bangsa saat ini untuk menapaki hari-hari depan Indonesia yang lebih baik. Sebab mempertentangkan keduanya boleh jadi kita bisa terjebak pada subyektifitas persepsi dan sudut pandang orang memandang kedua organisasi pergerakan tersebut.

Soekarno, Hatta, dan Ki hajar dewantara, misalnya dalam amanatnya mengenai kebangkitan nasional mengatakan bahwa Budi Utomo merupakan pelopor bagi pergerakan di Indonesia. Namun diantara sejarawan cenderung kehilangan minatnya terhadap Budi Utomo terutama setelah tahun 1912 ketika muncul organisasi lain yang lebih berpengaruh seperti *Indische Party* atau yang lebih penting lagi setelah SI lahir.³⁶

Bahkan Akira Nagazumi, sejarawan Jepang yang meneliti Budi Utomo, menulis; “Oleh karena tidak pernah benar-benar membangkitkan dukungan massa secara politik, maka di antara organisasi nasional Indonesia yang pertama, Budi Utomo dipandang kurang penting dibanding SI. Namun lepas dari itu semua, menurut Asvi Marwan Adam, bagi pemerintah colonial Belanda, jelas Budi Utomo yang dipandang penting. Dari sudut pandang colonial, Budi Utomo itu sesuai dengan langkah politik yang dijalankan Belanda

³⁶ Firdaus Syam, Op.Cit., h. 71.

yakni “Politik Etis” yang dicanangkan pada awal abad ke-20, yang lebih menginginkan keterlibatan untuk meningkatkan pendidikan, tapi tanpa terjun ke dunia politik praktis. Sebaliknya Sarekat Islam, oleh colonial Belanda lebih dipandang sebagai gerakan yang berbahaya, sehingga pengakuan pemerintah colonial terhadap eksistensi SI yang bercorak keislaman ini hanya bersifat local. Kolonial melakukan pembatasan ruang gerak bagi SI karena dianggap sebagai ancaman akibat pengaruh SI yang meluas saat itu.³⁷

Yang pasti organisasi Sarekat Islam (SI) dan Budi Utomo, merupakan dua organisasi yang telah merintis suatu pembentukan perkumpulan yang modern, yang bila dikombinasikan maka dapat dikatakan keduanya merupakan pelopor kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia di masa itu yang berbasis pada Iman dan Taqwa (Imtaq), serta Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Iptek), dengan begitu kebangkitan nasional merupakan “titik awal” penting dalam membangun peradaban Indonesia kini dan di masa akan datang. .

F. Tantangan Nasionalisme dan Pentingnya Nasionalisme Kultural

1. Tantangan Nasionalisme

Proses perubahan di era Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang amat cepat membuat Indonesia ikut amenghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya gempuran budaya asing yang terfasilitasi dengan media dan teknologi internet dapat secara bebas leluasa hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan berpotensi mendominasi serta mempengaruhi kebudayaan local.

Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang mengancam kedaulatan bangsa, seperti bermunculannya ideology yang berseberangan dengan ideology Negara, leberalisme, komunisme, marxixme, radikalisme dan terorisme, persoalan pulau-pulau terluar dan persoalan batas wilayah antar Negara. Belum lagi kompleksitas persoalan kewargaan dalam negeri berupa, kemiskinan, disparitas sosial yang tinggi, korupsi,

³⁷ Lihat Syafrizal Rambe, dalam Firdaus Syam, *Op.Cit.* h. 72.

euforia, egoisme dan persaingan yang bersifat kedaerahan dan kelompok yang belum kunjung berhenti, intoleransi dan kekerasan, lemahnya penegakan hukum, menipisnya sikap keteladan elit bangsa dan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemimpin bangsa. Pendeknya, sekelumit permasalahan bangsa di atas sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam soal nasionalisme.

Menurunya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Hasil survey Denny JA menunjukkan bahwa sejak 2005-2018 jumlah warga yang pro-Pancasila semakin berkurang setidaknya-tidaknya 10% di level pendidikan formal, khususnya kelompok muda, jumlah pro-Pancasila juga menurun. Hasil penelitian LSI 2019 cukup memberikan sedikit angin segar karena jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nasionalisme masyarakat mengalami kenaikan sebesar 66,4 % warga yang masih mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia 19,1 % warga yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok penganut agama tertentu, dan 11,9% warga mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku tertentu. Meskipun hasil survey menunjukkan perkembangan nasionalisme cukup positif di tahun 2019, tapi kita tidak boleh lupa bahwa 33,6 % warga yang tidak mengutamakan nasionalisme bukanlah angka yang kecil, artinya nasionalisme masih berada dalam tantangan.³⁸

Ketua kelompok Peneliti Kebudayaan dan Multikulturalisme LIPI, Thung ju Lan, dalam dialog kebangsaan bertajuk “Nasionalisme ala Millennial: Sebuah Disrupsi” yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2018 di Jakarta, mengemukakan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perubahan struktur yang ada di masyarakat, seperti inovasi percepatan mata rantai ekonomi maupun kemudian dan

³⁸ <https://nasional.kompas.com>

kebebasan berekspresi. Di lain sisi kehadirannya juga menunjukkan adanya beragam tantangan membagi masyarakat, termasuk dalam interpretasi nasionalisme”³⁹

Hasil penelitian Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI yang dilakukan dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, memperlihatkan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi memang memungkinkan terciptanya ruang public baru, namun kemampuan untuk menjangkaunya masih terbatas pada kelas sosial tertentu. “Komunitas-komunitas online lebih mendasarkan pada ikatan-ikatan primordialisme baik etnisitas maupun agama, daripada mendiskusikan nasionalisme. Hasil penelitian itu juga mengungkapkan media sosial seolah-olah membagi masyarakat dalam kotak-kotak yang acapkali memberikan ruang untuk saling menyebarkan kebencian.

Indonesia juga sering disebut sebagai “Republik Media Sosial” dengan peringkat teratas di beragam media sosial global, seperti face book , twitter, dan instagram. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini telah turut menyebabkan pergeseran yang sangat cepat dan bahkan mengejutkan atau sering disebut “disrupsi”. Dan kecenderungan yang paling rentang terjadi melanda anak muda (generasi millennial), generasi 1980-an – 2000-an.

Peneliti Politik dari Pusat Penelitian Politik LIPI, Tri Nuke Pujastuti. menilai nasionalisme bangsa Indonesia semakin menurun dengan tingginya euforia kedaerahan, kelompok dan keagamaan yang semakin tinggi. “Ini adalah kemerosotan kebangsaan, padahal kita hidup dalam Negara pluralis yang berbeda suku, budaya, bahasa daerah dan agama serta perbedaan lainnya. Menurutnya bangsa ini seharusnya merenungkan diri untuk memperkuat wawasan kebangsaan daripada kepentingan daerah atau kelompok. Adalah sangat lemah jika memperjuangkan kepentingan bangsa berpijak pada kepentingan kelompok, jauh lebih kuat kalau yang diperjuangkan itu adalah nilai-nilai universal seperti HAM yang telah menjadi bagian inti dari konstitusi Negara. Menurutnya nasionalisme esensinya bukanlah dikotomi antara sesuatu yang dari luar atau sesuatu yang dari dalam sendiri, tetapi apakah sesuatu itu bermamfaat atau tidak

³⁹ Lihat ThungJun Lan, *lipi.go.id* Memaknai Nasionalisme dalam Sudut Pandang Millennial.

bagi bangsa, kalau tidak mensejahterakan atau malahan membuat bangsa ini makin terpuruk, seharusnya ditolak saja.⁴⁰

Sejarawan Anhar Gonggong dalam Firdaus Syam, menyoroti perbedaan mendasar generasi (pemuda) tempo dulu dengan sekarang adalah generasi tempo dulu dalam menghadapi masalah; mereka lihat dan hadapi masalah dengan cermat, selanjutnya mereka melakukan sesuatu untuk memecahkan persoalan yang dihadapi, dan dalam melakukan sesuatu memiliki tekad kuat harus berhasil yaitu menjadikan bangsa yang majemuk ini bersatu dan berjuang menegakan bangsa baru Indonesia merdeka.

Sementara pemuda masa kini, harus mencari identifikasi baru tentang dirinya di tengah kemajemukan melalui proses dialogis yang terus menerus, bukan dengan paksaan. Tantangan lainnya menurut sejarawan ini adalah melawan kemiskinan, kebodohan, dan warisan-warisan masa lalu yang menyebabkan kita tidak bisa bergerak maju, berkembang sebagai bangsa yang demokratis.

Menurutnya keragaman itu jangan dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebagai suatu proses kekuatan jika kita mau berinteraksi secara dialogis, untuk itu kita harus berdialog dengan; sejarah agar kita memahami apa sebenarnya yang telah dicapai dan apa yang belum, serta apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Demikian juga kita perlu berdialog dengan budaya agar kita mengetahui akar budaya masyarakat. Sebab pemuda yang kreatif lahir dari pergulatan menemukan dirinya sendiri secara maksimal. Pemuda yang kreatif selalu peka terhadap segala gejala perubahan di dalam masyarakat.⁴¹

Tempo dulu gerakan-gerakan perubahan lebih banyak dipelopori oleh generasi muda yang kreatif, militan dan berideologi besar. Tetapi fenomena kalangan muda anak bangsa masa kini telah mengalami pergeseran posisi dan peran. Menurut Firdaus Syam, pemuda Indonesia (anak bangsa) saat ini kurang lagi mengedepankan konsepsi yang matang dan ideal dalam perjuangannya. Kenapa demikian ? menurut Firdaus Syam

⁴⁰ Antara Lipi.go.id diungga tanggal 26 Februari 2020.

⁴¹ Firdaus Syam, *Op. Cite.* h. 112.

tampaknya karena sikap pragmatis yang lebih dikedepankan.⁴² Sikap pragmatisme ini meliputi;

- Suka menggampangkan masalah.
- Tidak menghargai prestasi.
- Cenderung pada hal-hal yang sifatnya instan, sesaat, temporal (jangka pendek)
- Patronatif
- Tidak mandiri dan parsial
- Akibatnya soal intelektualitas dan idealisme tampak terpinggirkan dalam format gerakan warga dalam kehidupan politik kebangsaan.

2. Pentingnya Nasionalisme Kultural (Nasionalisme Masa Kini)

Kecintaan, dan pengorbanan yang dibalut oleh rasa bersama dan tujuan bersama sebagai prinsip dasar nasionalisme Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan secara politik dan destruktif telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, melepaskan diri dari belenggu penjajah asing, mendirikan Negara yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tetapi nasionalisme secara kultural dan konstruktif untuk membangun kultur jati diri dan kepribadian sebagai bangsa yang bermartabat, mandiri dalam membangun diri dan masa depan bangsanya untuk mewujudkan cita-cita perjuangan nasional terasa masih jauh dari yang diharapkan terlebih di era global saat ini.

Sartono Kartodirjo mengemukakan, nasionalisme memang mengalami corak yang berbeda di masa lalu dan dewasa ini. Nasionalisme masa lalu cenderung bercorak emosional, tidak rasional, sloganistik, heroik, reaktif dan konfrontatif. Nasionalisme Baru (masa kini), lebih bercorak realistis, mengedepankan pertimbangan rasional, bersifat komprehensif, solutif, memomorsatukan aspek kualitas sumber daya manusia,

⁴² *Ibid.*

dan kemampuan untuk berkompetisi, khususnya di arena global di tengah derasnya arus globalisasi dunia.⁴³

Dalam tulisan Opini di Media Indonesia 12 Juli 2020 menjelaskan bahwa Nasionalisme merupakan roh yang menentukan kemajuan bangsa, seiring dengan perkembangan zaman maka nasionalisme perlu didefinisikan sesuai konteks kekinian agar tidak menjadi jargon belaka. Kemerdekaan Indonesia 70 tahun silam merupakan produk nasionalisme para pejuang kemerdekaan. Mereka merefleksikannya dengan bersatu mengangkat senjata melawan penjajah, dan berdiplomasi secara piawai di panggung internasional untuk mendapatkan dukungan Negara lain tujuannya hanya satu yaitu kemerdekaan Indonesia.⁴⁴

Nasionalisme yang mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan, tidak sama dengan nasionalisme yang muncul di Eropa dan Barat. Nasionalisme Indonesia merupakan kristalisasi keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi Negara yang merdeka, dibungkus perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa tertindas. Sementara nasionalisme Barat merupakan produk masyarakat peralihan, dari agraris ke industri. Sebagai Negara industri baru, mereka membutuhkan eksistensi dan logistic untuk mendukung kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu penjajahan menjadi metode yang dipilih oleh mereka. Ratusan tahun Indonesia dibelenggu penjajahan asing, menjadi sisi gelap nasionalisme dengan pemahaman yang berbeda.⁴⁵

Roeslan Abdul Gani mengemukakan, kolonialisme tidak hanya mengakibatkan hilangnya kemerdekaan politik, penderitaan dan kesengseraan di bidang sosial ekonomi, tetapi juga telah menyebabkan terbongkarnya beberapa akar kebudayaan. Olehnya itu nasionalisme Indonesia seperti halnya nasionalisme Asia mengusung tiga aspek yaitu *Pertama*; aspek politis yang bersifat menumbangkan dominasi politik bangsa asing yang menjajah. *Kedua*; aspek sosial ekonomis yang bersifat menghentikan eksploitasi ekonomi asing untuk membangun suatu masyarakat baru yang bebas dari kemelaratan,

⁴³ Lihat Sartono Kartodirjo dalam Firdaus Syam , *Op. Cite*,h. 114.

⁴⁴ <https://m.mediaindonesia.com>

⁴⁵ *I b l d.*

dan kesengsaraan sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. *Ketiga*; aspek kultural yang bersifat menghidupkan kembali kultur, jati diri (karakter) dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan perubahan zaman.⁴⁶

Menurut Ismail Arianto, nasionalisme itu pada hakikatnya merupakan himpunan dari kekuatan yang bersifat destruktif dan konstruktif. Sebagai kekuatan yang destruktif maka nasionalisme bertujuan menghancurkan kolonialisme asing dan menghentikan penghisapan imperialisme asing atas tubuh perekonomian bangsa. Sebaliknya sebagai kekuatan yang konstruktif nasionalisme bertujuan untuk membangun Negara nasional merdeka yang demokratis, membangun jati diri dan kepribadian bangsa (*nation and character building*) dengan berisikan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.⁴⁷

Sri Edi Swasono⁴⁸ menjelaskan, secara kultural “pernyataan kemerdekaan merupakan pernyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk merubah sikap budaya (*cultural unlearning*) dari rakyat tertindas menjadi rakyat merdeka, dari anak-negeri yang berkedudukan sebagai “*koelie pribumi*” menjadi “tuan di negeri sendiri”.

Pernyataan budaya itu mengandung makna kehendak (kemauan) untuk merubah diri sendiri, yang di masa jajahan terdiskriminasi sebagai kaum *Inlander* (Pribumi-kelas terendah) di bawah kaum *European* (Kulit Putih-kelas teratas) dan kaum *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing-kelas di tengah) menjadi kaum yang setara. Dengan kemerdekaan, Indonesia menyatakan “tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (pasal 27 UUD 1945)

Pernyataan kemerdekaan juga merupakan “pernyataan keberdaulatan”, yaitu pernyataan melepaskan diri dari ketergantungan, mampu menentukan sendiri apa yang terbaik bagi diri sendiri, tanpa ragu melaksanakan “Indonesianisasi”, mendesain sendiri wujud dan arah masa depan bangsa dan Negara sendiri. Menentukan destiny sendiri.

⁴⁶ Lihat Roeslan Abdul Gani dalam Ismail Arianto, *Op. Cite.*, h. 209.

⁴⁷ *Ismail Arianto, I b l d.*

⁴⁸ Sri-Edi Swasono, *Kebangsaan Keraktyatan dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Cet. 2 Mei, 2014, h.1.

Kita harus menyadari keberdaulatan kita dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan untuk meningkatkan dan menjaga ketahanan nasional (*national resilience*).

Lebih lanjut Sri-Edi Swasono, mengemukakan Negara Republik Indonesia didirikan berdasar doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan. Doktrin kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, yaitu multikulturalisme dan pluralisme yang disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan, tanpa mengabaikan kepentingan individu dan tanggung jawab global.

Berikutnya adalah doktrin kerakyatan berkaitan dengan keutamaan “Daulat Rakyat”, bahwa kepentingan rakyat adalah hak sosial rakyat, dalam hal mana kekuasaan berasal dari rakyat, pemerintahan Negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa tahta (kekuasaan) adalah untuk rakyat. Dengan demikian posisi primus rakyat adalah sentral substansial dalam sistem demokrasi pancasila yang kita anut.⁴⁹

Realitas kondisi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dengan penduduk 250 juta jiwa, memiliki kurang lebih 300 etnis, 742 bahasa dan dialeg daerah tersebar di 17.500 pulau. Dengan kondisi semacam ini kesatuan (integrasi) nasional tidak dapat dicapai hanya dengan nasionalisme politik. Karena itu dibutuhkan semacam *common ground* yang bisa menjadi landasan untuk membangun harmoni dalam masyarakat. Demikian dipaparkan oleh dosen Antropologi UGM, Prof. Irwan Abdullah.⁵⁰ Menurutnya dalam konteks mencari *common ground* itu, keragaman bisa menjadi pilihannya. Sebab selain bisa menjadi pemicu timbulnya konflik antargolongan, keragaman juga bisa menjadi potensi terciptanya harmoni. Kesatuan politik dari sejumlah besar anggota berbagai kelompok yang berbeda tidak menjamin integrasi. Keragaman menawarkan suatu potensi untuk terciptanya harmoni, menjadi dasar bagi

⁴⁹ *I b I d.*, h. 2.

⁵⁰ Lihat <https://www.konfrontasi.com,ker,>

identitas kolektif yang melahirkan nasionalisme kultural, dan bukan sekadar nasionalisme politis.

Prof. Irwan menyayangkan masih minimnya perhatian dari para akademisi terhadap potensi ini. Dia juga menyayangkan semakin berkurangnya ketertarikan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi prinsip pemersatu bangsa. Irwan menyoroti keragaman dan persatuan bangsa, diantaranya terkait relasi antar-etnis yang sarat dengan stereotip, dominasi etnis tertentu, dan kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang.

Pernyataan serupa disampaikan Dr. Arqom Kuswanjono, menjelaskan semangat nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila menjadi amat penting sehingga baik Yamin, Soepomo, maupun Soekarno meletakkan kesatuan dan nasionalisme pada urutan pertama dalam rumusan mereka tentang dasar Negara. Kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme.

Suko Sudarso Pimpinan Nasionalis Kultural menegaskan kaum nasionalis kultural bersama Islam kultural merupakan soko guru *civil society* dan benteng demokrasi RI yang sudah bangkit kembali bersama rakyat bawah menapak ke depan. Bangkrutnya nasionalisme struktural (politik) dan Islam struktural (politik) akibat korupsi mereka yang membudaya, mendorong kebangkitan kaum nasionalis kultural dan Islam kultural (NU, Muhammadiyah) yang berdiri di luar pagar kekuasaan untuk merevitalisasi dan merevolusikan gerak maju peradaban menuju pemerintahan yang bersih, amanah dan adil. "Nasionalisme kultural dan Islam kultural adalah harapan bagi masa kini dan masa depan.

Suko Sudarso, menekankan pentingnya memilih untuk membangun karakter dan jati diri bangsa, ketimbang meributkan persoalan rebutan duit, kekuasaan, rebutan proyek, isu SARA dan status keagamaan yang sempit. Ia menegaskan pentingnya setiap manusia secara sungguh-sungguh berusaha untuk mengurangi nafsu yang ada dalam diri manusia. Nafsu yang dimaksud antara lain adalah nafsu berkuasa, serakah mencari harta,

mau ,menang sendiri, dan tidak mau berbagi. Ini akan mengulangi penyakit Orde Baru dan tragedy Orba.⁵¹

Salah satu tantangan besar bangsa di era globalisasi ini adalah masyarakat dipaksa untuk bersaing secara langsung dengan orang-orang asing. Sebab boleh saja orang asing masuk ke Indonesia tapi yang jadi soal jangan sampai kehadiran mereka justru mengurangi fungsi dan peran kita dalam mengatur dan menentukan perjalanan hidup masyarakat bangsa ini dengan alasan sumber daya atau daya saing kita lemah.

Fenomena sosial yang tampak dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan pengaruh negative ideology global yang melanda bangsa terlebih kalangan muda terpelajar kita masa kini cenderung menjadi “birokratis” dan menjadi “skrup” ideology penjajah yang menindas bangsanya sendiri. Isu HAM, demokratisasi, kebebasan, keterbukaan dan pasar bebas sebagai wujud keinginan perubahan (*modernization*) dalam masyarakat, bila tidak disikapi secara kritis, responsive dan antisipatif dengan kemampuan kita memilih dan memilah.

Tanpa kemampuan itu, boleh jadi Indonesia kedepan menurut Sartono Kartodirjo hanya menjadi tempat pembuangan “sampah” dalam arti luas baik sampah fisik, sains dan teknologi, sosial, budaya dan politik. Kemudian sebagai bangsa, selain menjadi penonton hebat (pandai menjadi komentator) dan meniru, barangkali kita hanya menjadi “bangsa kuli” dari Negara luar yang lebih maju dan kuat. Dari segi sumber daya manusia di masa datang, dalam konteks persaingan global, bukankah dari segi kualitas pendidikan, dunia pendidikan kita telah tertinggal jauh dari Negara tetangga (dulu mereka masih belajar kepada kita) bahkan kini pendidikan kita posisinya telah berada di bawah Vietnam (Negara yang berakhir perang melawan Amerika tahun 1975).⁵²

Kata kuncinya dalam membangun wawasan nilai kebangsaan kalangan muda terpelajar harus mampu memilih dan memilah mana yang membawa kepada perubahan (modern) sebagai unsur penting untuk suatu kemajuan, dan sebaliknya mana yang

⁵¹ Lihat <https://www.konfrontasi.com/tokoh>

⁵² Lihat Sartono Kartodirjo dalam Firdaus Syam Op.Cit. h. 114.

membawa kepada pembaratan (*western*), yang menggiring masyarakat kepada westomania, penyakit yang keranjingan segala sesuatu yang datang dari Barat. Hanya wawasan kebangsaan berlandaskan filosofis, jati diri bangsa yang mampu mengimbangi erosi mental, erosi cara berpikir, dan erosi intelektual.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, menurut Soedjatmoko, harus ada nilai-nilai unggulan budaya yang menjadi perhatian untuk dikembangkan, yakni nilai-nilai budaya bangsa yang positif, bukan yang negative termasuk juga dalam menyerap nilai-nilai budaya dari luar sebagai kenyataan dari proses globalisasi budaya bangsa-bangsa yang terus berlangsung, demikian cepat berubah, dan sangat bervariasi serta ada kecenderungan terjadinya disorientasi terhadap budaya bangsa sendiri.⁵³

Hal lain yang menunjukkan perlunya reorientasi dan urgensi nasionalisme kultural di **masa** kini adalah adanya kompleksitas dan runyamnya permasalahan internal yang dihadapi bangsa ini. Firdaus Syam⁵⁴ menjelaskan bahwa, tampak dalam kehidupan sehari-hari idealism dari bagian terbesar masyarakat Indonesia, kini terkuras oleh fenomena dan tuntutan hidup yang segera harus dipenuhi karena sulitnya meraih kesempatan hidup yang lebih layak di segenap aspek kehidupan, termasuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Kemiskinan bangsa Indonesia kini telah demikian akut, fakta angka 17,75 % (39,05) juta penduduk Indonesia dikategorikan miskin (berdasar kategorisasi BPS). Bila didasarkan pada standar Bank Dunia yakni pendapatan individu perhari kisaran dua dolar, maka jumlah orang miskin di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta dan 40 % penduduk Indonesia berada di batas kemiskinan yang dapat dengan mudah masuk menjadi miskin (Republika, 19 Sep. 2006) Belum lagi masalah keterbelakangan dan kebodohan.

Hidup kembang kempis “atau tutup lubang” gali lubang”. Mungkin ini yang dimaksud Herbert Marcuse telah menjadi manusia yang berdimensi tunggal” atau

⁵³ Firdaus Syam, *Ib Id.*, h. 116.

⁵⁴ *Ib Id.* h. 115

mengutip Renoué-Genon “seorang manusia yang tersusutkan”. Shoundel menyebutnya seorang manusia yang tidak berujung pangkal “yang memproduksi demi konsumsi dan mengonsumsi demi produksi”.

Tekanan budaya yang hedonis, materialism dan pragmatism itu telah membuat kalangan muda kita terjebak, jeratannya amat kuat sehingga sulit untuk menghindar, dan paling banter mencari jalan keluar dengan pola hidup “jalan pintas” menganut budaya tisu dan meraih kenikmatan hidup yang fatamorgana. Manusia yang terpenjarakan atau terkungkung oleh gemerlapan hidup karena daya tarik mereka, kemampuan “menyihir” dari iklan di media, apakah itu iklan berdimensi sosial ekonomi, seni budaya sampai kepada iklan politik; indah dalam cover dengan gaya bahasa yang canggih (*sophisticated*), namun sebenarnya kekuatan maknanya telah hilang.

Masyarakat kita menjadi penonton dan berkhayal; dari persoalan pergaulan hidup, gaya hidup dan cara berpikir yang bebas, “kerasukan” obat setan dan mistisisme sampai kepada politik kotor, bisnis, demonstrasi, sebagai alat mencapai kepentingan kekuasaan. Di dalamnya adalah kaum muda yang sebenarnya produktif dan kreatif, akan tetapi dari bagian terbesar mereka tanpa kehilangan ‘elan dan vitalitasnya. Terjadi kemandegan untuk menjawab carut marut cara kerja para penguasa, pengusaha sampai teknokratik dalam mengurus negeri ini sampai Orde Reformasi yang awalnya penuh pengharapan . Kalangan muda lagi-lagi terjebak dalam euphoria dan kepentingan politik sekelompok elit berteman lebih dekat pada politisi dan pengusaha ketimbang negarawan dan Begawan kampus. Wawasan kebangsaan kita seperti mati langkah dalam menjawab problematika masyarakat bangsa saat ini.

Sartono Kartodirjo, memandang kebanyakan masyarakat (kalangan muda) Indonesia dewasa ini, telah mengalami pergeseran-pergeseran posisi dan peran. Sebagai otokritik, pemuda dewasa ini kurang mengedepankan konsepsi yang matang dan ideal dalam perjuangannya, justru lebih mengedepankan sikap-sikap pragmatis, sehingga format gerakan pemuda cenderung terjebak pada aspek-aspek yang sifatnya prgmatis,

kurang mengedepankan kualitas serta kematangan konsepsional, serta meminggirkan aspek-aspek intelektualitas dan idealism.⁵⁵

Sebab itu dalam menyongsong zaman baru, zaman menuju “membangun perdaban Indonesia” di masa depan. Masyarakat (Pemuda) Indonesia harus bercermin pada para pendahulu kita yang benar-benar idealis, konsepsional dan berakhlak mulia, menghormati norma-norma budaya bangsa yang positif. Hal lain dalam menghadapi globalisasi, adalah perlu ditumbuhkan semangat dan strategi nasionalisme baru, yaitu nasionalisme kultural dan konstruktif, bukan nasionalisme Lama yang sifatnya destruktif dan politis, yang terasa sudah tidak relevan dalam menjawab tantangan zaman. Masyarakat (pemuda) masa kini harus memulai, berani melakukan dialog, dan jangan membiasakan diri bersikap birokrat dan feodalis warisan masa lalu. Kini pemuda harus merubah sikap yang sesungguhnya, yakni; dinamis, memiliki konsep perjuangan yang matang, trampil, kompetitif dan memiliki integritas dan keberanian mengambil langkah-langkah terobosan yang sifatnya positif dan konstruktif sebagai wujud kepekaan, kepedulian untuk ikut bertanggung jawab dalam mengatasi dan memecahkan problem yang dihadapi masyarakat bangsa.

⁵⁵ *Ibid.*

BAGIAN VI.

HASIL PENELITIAN REPRODUKSI PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN PERSIS DALAM MEMBANGUN NASIONALISME KULTURAL KALANGAN SANTRI PERSIS

A. Simpulam

1. Perspektif ulama Persis terhadap pembangunan nasionalisme kultural kalangan santri Persis di Jawa Barat menunjukkan peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi pembangunan peradaban, dan penciptaan stabilitas kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat indikasi yang kuat tentang adanya titik kesamaan spirit dan tujuan perjuangan antara tokoh-tokoh (ulama) Persis dengan para pejuang bangsa dalam upaya membangun kesadaran nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Jadi nasionalisme secara politik yang mendapat asupan dari berbagai kalangan telah berhasil mengusir penjajah mengantarkan Indonesia merdeka. Tetapi nasionalisme secara kultural belum sehebat nasionalisme secara politik. Nasionalisme kultural memberikan sinyalemen terhadap perlunya penghayatan mendalam atas nilai-nilai pancasila, sekaligus memberi pesan akan pentingnya memaknai kemerdekaan secara kultural untuk membangun kembali jati diri bangsa yang bermartabat, maka dalam konteks ini kehadiran Persis yang mengusung semangat pembaharuan pemikiran Islam untuk beraqidah, beribadah, dan berumalah secara benar sesuai al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan kontribusi berharga dalam menciptakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara ini menjadi pancasilais, maju, damai, sejahtera adil dan makmur.
2. Persentuhan konsep pendidikan Islam pesantren Persis dengan nilai-nilai nasionalisme kultural Indonesia menunjukkan adanya titik singgung sangat erat. Pendidikan Persis itu kan berakar dari tokoh-tokoh nasionalis religius dan ulama harismatik dimaana visi dan gerakannya beririsan kuat antara gagasan pemurnian (pembaharuan) pemikiran Islam dengan semangat nasionalisme untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau diidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam pesantren Persis yang berkorelasi atau paling tidak bisa memberi asupan dan

penguatan terhadap nilai-nilai nasionalisme kultural adalah meliputi; 1) nilai aqidah, 2) nilai akhlak, 3) nilai ibadah, 4) nilai muamalah, 5) nilai kecerdasan, 6) nilai kejujuran, 7) nilai kebenaran, 8) nilai keteladanan, 9) nilai kepercayaan (amanah), 10) Nilai keikhlasan dan ketulusan, 11) nilai cinta kasih; 12) nilai kesetiaan; 12) nilai kejujuran, 13) nilai kebangsaan; 14) nilai pengorbanan; 15) nilai kerukunan; 16) nilai persatuan; 17) nilai solidaritas, 18) nilai kepedulian; 19) nilai tanggung jawab, 20) nilai ketanggapan dan resposibilitas, 21) nilai kemajuan, 22) nilai peradaban, 22) nilai kestiakawanan, 23) nilai kebersamaan, 24) nilai kesetaraan, 25) nilai kesederhanan, 26) nilai kesabaran,, 27) nilai kemandirian. Jadi simpelnya ada nilai Ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kemasyarakatan (musyawarah), dan ada nilai keadilan sosial.

3. Tingkat reproduksi pendidikan Islam pesantren Persis dalam membangun nasionalisme kultural kalangan santri Persis di Jawa Barat menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Karena pendidikan Islam pesantren Persis memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan dalam mewujudkan insan sebagai muslim yang kaffah dan anak bangsa yang berkepribadian baik dan unggul. Hal ini dapat terjadi karena dilandasi; *Pertama*; ideologi Jamiyiah, visi pesantren Persis dan karakter gerakannya yang konsisten pada pemurnian pemikiran Islam kepada sumbernya yang asasi yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan istiqamah menjdikannya sebagai dasar pijakan dalam kehidupan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. *Kedua*; Penggunaan kurikulum yang cocok dengan kekhasan pesantren yang dipadu dan dikorelasikan dengan perkembangan zaman yang di barengi oleh kemampuan asatiz-asatiza dalam menjadikan (menerapkan) kurikulum sebagai roadmaf proses pembelajaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai pesantren. *Ketiga*; Kualitas guru (asatiz) lolyalitas, disiplinnya orientasi jihad tarbawinya, kemauanya yang kuat untuk mengemban misi risalah mencetak mubalig berbasis qur'ani dan mencontohi Sunnah Nabi. *Keempat*; Tuntunan dan keteladanan pengelola pesantren dan para guru (asatiz-asatiza), bai'at santri, pembiasaan dengan akhlak terpuji, dan lingkungan pesantren yang tamaddun, humanis dan toleran., semuanya berpadu

menjadi sistem dan tata nilai budaya yang hidup dalam keseharian di lingkungan pesantren Persis.

Hasil analisis dengan pendekatan macro struktur dan micro struktur dari teori reproduksi sosial Felix Bourdieu menunjukkan pendidikan Islam pesantren Persis memiliki tingkat reproduksi yang tinggi dalam membangun nasionalisme kultural kalangan santri Persis di Jawa Barat.

Felix Bourdieu, menyatakan, interaksi manusia dalam masyarakat selalu berada pada dua kutub utama; satu kutub menitikberatkan analisis makro-struktur dan yang kedua adalah pada pendekatan micro struktur. Makro struktur menekankan segala perilaku dan tindakan manusia sudah diatur dan ditentukan oleh struktur. Struktur di sini bisa dianalogikan sebagai kelembagaan pesantren Persis dengan perangkat pendukungnya yang menentukan tindakan dan perilaku santri, jadi santri di sini seolah-olah tidak memiliki andil atas tindakan dan perilakunya. Jadi manakala ada pernyataan dan pengakuan santri, tokoh Persis (informan) dan masyarakat yang memberikan respon positif bahwa santri atau alumni pesantren Persis itu adalah kultural, berbudi baik dan berbagai karakter positif lainnya dalam tindakan dan perilakunya di lingkungan pesantren atau masyarakat, tidak terpapar oleh tindakan-tindakan amoral maka itu artinya pesantren Persis itu memiliki tingkat reproduksi yang sangat baik (tinggi).

Sementara pendekatan Mikro-struktur memandang manusia sebagai pelaku tindakan-tindakan yang dilakukannya memiliki andil atau will dalam melakukan tindakan-tindakannya. Jadi dalam hal ini santri memiliki andil dan peran dalam menentukan sikap dan perannya yang tentunya sejauh kemampuan dan kekuatannya mengadaptasi sistem dan tata nilai budaya yang ada di lingkungan pesantren Persis. Di sini faktor yang paling menentukan adalah motivasi, sistem dan treatment yang memungkinkan santri terbangun kesadarannya terhadap kebutuhan untuk berprestasi dan hidup penuh makna. Di sini letaknya titik temunya dengan visi pendidikan Islam pesantren Persis untuk memanusiakan manusia agar dapat mengembangkan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah (pemimpin) yang mengelola bumi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, maka perlu direkomendasikan kepada;

1. Pimpinan dan pengurus jamiyiah Persis untuk terus tingkatkan semangat juang dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan suci dan mulia Persis yang telah dirintis dan terus diwarisi oleh generasi penerus Persis melalui gerakan dakwah, pendidikan dan sosial keumatan agar kiranya semangat pembaharuan yang diusung Persis berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup umat Islam tidak hanya terkonsentrasi pul di Jawa Barat tetapi harus merambah ke seluruh wilayah nusantara.
2. Pimpinan pondok pesantren Persis dan para asatiz-asatiza untuk terus meningkatkan pengabdian dalam mempersiapkan santri menjadi mujahid-mujahid dakwa tarbawi dan pembaharu pemikiran Islam untuk kelak terbangunya masyarakat muslim yang kaffah dalam aqidah, ibadah, dan muamalah yang sesuai tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.
3. Kepada Pemerintah agar lebih memberikan perhatian dan respon positif dan dukungan terhadap pengembangan pesantren Persis sekaligus menjadikan Persis sebagai bagian integral kekuatan *civil society* yang menjadi mitra dan patner pemerintah dalam membangun *Good Governance* yang terpercaya, kuat dan memberdayakan.
4. Kepada berbagai kalangan masyarakat, agar mengedepankan prasangka positif terhadap berbagai dinamika pemikiran dan gerakan anak-anak bangsa dalam ikhtiarnya membangun bangsa dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan bangsa dan tentunya harus tetap konsisten pada nilai-nilai pancasila, agama, persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Kepada peneliti lain, untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap isu-isu pesantren dan keagamaan dalam kaitannya dengan persoalan kebangsaan dalam kerangka meretas jalan membangun harmoni antara masyarakat beragama, dan dengan pemerintah sekaligus memangkas prasangka-prasangka negative, dan

kotroversi terhadap isu-isu radikalisme yang mengganggu harmoni dan kenyamanan hidup bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Isfahany, al-Raghib, *Mu'jam L-Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, Tt. Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Ar-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005.
- Abdul Gani, Roeslan Dalam Ismail Arianto dalam buku *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. KosasihDjahiri*, Editor: Dasim Budimansyah & Syaifullah Syam, Bandung: Laboratorium PKn FPPIPS-UPI, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2006.
- Alwasulah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka jaya, Cetakan keempat, Jakarta: 2008.
- Awwas, Irfan S., *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia Menguak Perjuangan Umat Islam dan Penghianatan Kaum Nasionalis Sekuler*, Yagyakarta: Uswah {Kelompok Penerbit Pro U Media}, Cetakan ke 2, 2009.
- Amanah, Nur dan Mashadi Said, *Implementasi Pendidikan kejujuran dan Tanggung jawab di Pesantren Al Hidayah Kabupaten Bandung*, dalam Muhammad Murtdlo, *Pendidikan Karakter di Pesantren*, CV. Baroena Daya, 2017.
- Anis Mata, HM, *Dari Gerakan Ke Negara Sebuah Konstruksi Neara Madinah yang Dibangun dari Bahan Dasar Sebuah Gerakan*, Jakarta Timur: Fitrah Rabbani, 2006.
- Bachtiar, Tiar Anwar, *Sejarah Pemikiran Dan Gerakan Politik Persis*, Bandung: Persipers, 2019
- B.J. Habibie, dalam Firdaus Syam, *Renungan Bachrauddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema insani, 2009.
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2010.
- Danim, Sudarwan, *Agenda Pembaruan Sistem pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nizar, Samsul, *Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Medya Pratama, 2001

- Hamengku Buwono X, Sultan, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007.
- H. Lauer, Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: PT. Pembangunan dan Erlangga, Cetakan ke-IV, 1984.
- Indrayana, Denny, *Indonesia Optimis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-28, 2010.
- Mujadid Naya, Achmad, dan Saddam Husein, *Pesantren Di Wilayah Minoritas Muslim (Suatu Tinjauan Kultur Pada Pondok Pesantren Assalam manado)*, LP2M IAIN Ambon, 2018.
- Naszir, Nasrullah, *Struktur Sosial Dan Struktural Fungsional*, Bandung: Widya Pajajaran, Cet. I. 2008.
-Kerakyatan dan Kebudayaan, Yogyakarta: UST-PRESS, Cetakan pertama, 214.
- Qardhawiy, Yusuf, *Fiqh Negara*, Jakarta: Robbani Press, Cetakan ke 1, 1997.
- Ritze, George – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Moder*, Edisi ke VI, Jakarta: Kencana, 2008.
- R.Suyoto Bakri, *Kamus lengkap bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Pondok Cabe Ciputat Tangerang, 2009.
- Salis, Edwar, *Total Quality Manajemnt In Education Manajemen Mutu Pendidikan*, Jogjakarta: Cet. Ke 15, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV. AlfaBeta, Cetakan ke 7, 2009.
- Saragen, Lyman Tower & A.R. Henry Sitanggang, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer sebuah Analisis Komparatif*, Edisi keenam, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Sartono Kartodirjo dalam Firdaus Syam, *Renungan Bachraddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Pertama, 2009.
- Syam, Firdaus, *Renungan Bachruddin Jusuf Habibie membangun Peradaban Indonesia Setelah 10 Dasawarsa Kebangkitan nasional, 10 Windu Sumpah Pemuda, dan 10 Tahun Reformasi*, Jakarta: Erlangga, 1984.

- Siswasono, Sri Edi, *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*, Yogyakarta: UST-PRESS, Cetakan pertama, 2014.
- Triwibowo, Darmawan, Editor, *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, Cetakan pertama, 2006.
- Thomas Hyllad Eriksen, dalam Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya
- UUD. 1945
- UU SISDIKNAS (Sistim Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003
- Qanun Asasi Qanun Dakhili, Pedoman Kerja, Rencns Jihad 2o15-2o2o, Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam {PERSIS}, 2015-2020.
- Anjar, Febra Kusuma dkk.dlam *Jurnal Studi Sosial*, Vol 3, No. 4, 2015 FKIP Universitas lampung.
- Febra Anjar Kusuma dkk.dlam *Jurnal Studi Sosial*, Vol 3, No. 4, 2015 FKIP Universitas lampung.
- Wawan Wahyuddin dalam Saintifika Islamica: *Jurnal Kajian keislaman*, Volume 3 No. Januari-Juni 2016.
- Ismail Arianto dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri*, Editor: Dasim Budimansyah, Bandung: Laborotorium PKn FPIPS-UPI, 2006, h. 207.
- Ismail, Faisal, *Islam Transformasi Sosial Dan Kontinuitas Sejarah*, Yogyakarta: Cet. I, PT. tiara wacana, 2001.
- C.S.T. Kansil & Juliantono, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- ST. Sulatro (ed), *Dialog Dengan Sejarah; Soekarno Seratus Tahun*, Jakarta, Kompas, 2001.
- Swasono, Sri Edi, *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Cet. 2 Mei, 2014.

George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosilogi Modern*, Edisi Keenam, Cetakan ke- 1 Januari 2004, Jakarta: Prenada media Group, 2004.

Judistira K. Garna, *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas pajajaran, 1992.

Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Cetakan Keempatg, Jakarta: 2003.

Lihat Reproduksi Sosial Sinau Bareng kaconkminan.blogspot.com diungga tanggal 3 Februari 2020.

Moleong, Alexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, CV. Alfabeta, t.tp. 2009.

John W, Creswell,, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2010.

<https://kunjungi.wordpress.com>.

<https://kunjungi.wordpress.com>.

<https://seputarilmu.com,2019/04>

<https://bestudi.wordpress.com>

Lihat Pahlawan Perintis Pejuang Kemerdekaan, <https://www.tokopedia.com> dan <https://m.detik.com>

<https://nasional.kompas.com>

¹Lihat ThungJun Lan, *lipi.go.id* Memaknai Nasionalisme dalam Sudut Pandang Millennial.

Antara *Lipi.go.id* diungga tanggal 26 Februari 2020.

<https://m.mediaindonesia.com>

Lihat <https://www.konfrontasi.com,ker.>,

Lihat <https://www.konfrontasi.com,tokoh>

Lihat Sartono Kartodirjo dalam Firdaus Syam Op.Cit. h. 114.

Lihat Reproduksi dalam Wikipedia <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

<https://medium.com,pengantar-teo>. Tanggal 2 Februari 2020 dan lihat, Ringkasan dari Agen dan Struktur dalam Pandangan Bourdieu” Biokultur, Vol.1/No2/Juli-Desember 2012, hal 91. Oleh Muhammad Adib). Di download dari <https://medium.com,pengantar-teo>. Tanggal 2 Februari 2020

BAB V

PERSENTUHAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN PERSIS DENGAN NILAI-NILAI NASIONALISME KULTURAL INDONESIA

A. Titik Temu Pendidikan Islam Pesantren Persis dengan Nilai-Nilai Nasionalisme Kultural Indonesia

Pada bagian terdahulu telah dibahas nilai-nilai nasionalisme kultural Indonesia yang perlu dirawat dan dikembangkan dalam kerangka menuju perwujudan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, ber peradaban tinggi, sejahtera dan berkeadilan sosial. Demikian juga halnya konsepsi pendidikan Islam pesantren Persis yang dikembangkan beserta nilai-nilai pendidikan Islam yang diobsesikan bagi siswa (santri) yang ingin dihasilkan agar kelak tumbuh dan berkembang menjadi muslim yang kaffah sekaligus menjadi anak bangsa yang baik dan berkepribadian unggul.

Dengan membaca bagian ini, pembaca diharapkan resfek terhadap ikhtiar baik setiap komponen bangsa (Persis) yang telah menunjukkan rasa tanggung jawab, perhatian serius dan kerja kerasnya dalam membangun masyarakat yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak terpuji, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sesuai amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus mengingatkan kepada bangsa ini bahwa kecenderungan membangun prasangka buruk, menjutsifikasi, memufuk pertentangan (konflik) antara sesama komponen anak banga dengan beragam isu-isu “pro – kontra”, radikalisme dan nasionalisme, politik identitas dan kebangsaan, Aku Pancasila dan Aku Indonesia” yang tak jarang berujung pada terjadinya kerawanan sosial dan disharmoni kehidupan berbangsa dan bernegara, fenomena tersebut dan semacamnya menunjukkan adanya sesuatu yang salah (keliru) dalam hal kita berbangsa dan bernegara, bahwa Negara kebangsaan ini dibangun atas rasa bersama untuk kepentingan dan kemajuan berama. Apalah artinya membanggakan jabatan dan kekuasaan kalau sekedar untuk popularitas, menumpuk harta dan memperlebar jurang pemisah di antara anak bangsa sementara jabatan dan kewenangnya tidak bisa mengantarkan bangsa ini mampu meraih cita-cita nasional

yang dituju, sehingga boleh jadi otoritas yang ada hanya akan menjadi belenggu sosial dan beban pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Olehnya itu, semua pihak harus merenung dan mawas diri, tidak penting apakah ia penguasa atau rakyat biasa, TNI, POLRI atau sipil, politisi, pengusaha atau rakyat kecil, pendeknya saat ini Indonesia butuh kejujuran dan keteladanan, kesejahteraan dan keadilan, demokrasi substansial bukan sekedar demokrasi procedural, nasionalisme kultural bukan sekedar nasionalisme politik dan radikal, Pancasila yang membumi dan mewujudkan dalam tindakan dan perilaku bukan Pancasila yang sekedar verbalistik atau pemanis bibir, nasionalisme yang religious atau religious nasionalis, bukan religious Vs nasionalisme atau sebaliknya. Inilah kiranya tantangan dan PR besar yang dihadapi bangsa saat ini, sebagaimana yang ditegaskan Mochtar Pabottinggi, bahwa ada tiga cita-cita yang telah hidup sejak zaman pergerakan nasional, dan sampai saat ini masih merupakan agenda politik yang masih jauh dari selesai yaitu;

Pertama; Tuntutan untuk menciptakan bangsa yang benar-benar terintegrasi dalam politik dan ekonomi, politik kesejahteraan atau politik yang memberdayakan bukan politik yang eksploitatif dan memperdayakan masyarakat, dan ekonomi yang membuat politik demokrasi berkeadaban. *Kedua*; adalah tugas berat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjamin dan memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas bagi semua warga Negara di seluruh wilayah tanah air Indonesia. *Ketiga*; Adanya kepastian dan jaminan Negara terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara secara adil tanpa diskriminasi.¹

Tugas dan tantangan yang dihadapi bangsa ini memang berat tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak. Kalau dulu bangsa ini bisa merajut nasionalisme dan dengannya bisa mangatarkan Indonesia merdeka, maka kita pun harus yakin dan percaya bahwa sebesar apapun tantangan yang dihadapi saat ini, kita pasti bisa selesaikan asal ada rasa resfonsibilitas, pengakuan dan penghargaan terhadap karya positif dan produktif setiap komponen bangsa. Walaupun sudut pandang dan pendekatan yang berbeda dalam merespon

¹ Lihat Mochtar Pabottinggi, dalam Firdaus Syam, h. 64.

beragam persoalan sosial dan kebangsaan, selama itu dilakukan sesuai tuntunan agama yang benar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dipastikan karya-karya produktif komponen bangsa semisal Persis dan termasuk ormas serta civil society lainnya tentu akan sangat memperkaya hasanah dan kekuatan bangunan nasionalisme kebangsaan Indonesia. Peran Pendidikan Islam pesantren Persis dalam konteks ini terlihat amat jelas memiliki titik singgung dengan nilai-nilai nasionalisme kultural Indonesia seperti terlihat pada bagan berikut;

Bagan Titik Singgung Nilai-Nilai nasionalisme dengan Pendidikan Islam Ponpes Persis



Titik singgug yang diperlihatkan bagan tersebut di atas tidak berlebihan bila dilihat perspektif historis menyatakan bahwa kontribusi terbesar terhadap kebangkitan kesadaran kebangsaan Indonesia adalah dilatari oleh bangkitnya kesadaran beragama yang disponsori oleh para kiyai, ulama dan pesantren-pesantren yang menyerukan penegakan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan seruan suci agama jihad fi sabilillah, pilihannya hanya satu yaitu hidup mulia dan mertabat sebagai bangsa yang merdeka, atau mati syahid, dengan jaminan di sisi Allah adalah surga.

Jadi agama Islam, para kiyai dan pesantren memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi kebangkitan nasional Indonesia hingga kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang dimulai dari menyatukan umat Islam yang tersekat-sekat menjadi satu kesatuan akidah; kemudian untuk kepentingan kemerdekaan kesadaran akan kesatuan muslim dalam satu akidah berkembang dalam kesatuan bangsa sebagai satu bahasa dan satu tanah air yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk kepentingan merwat Indonesia, maka pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama oleh umat beragama (umat Islam) sebagai warga Negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak dan fondasi bagi terciptanya stabilitas nasional dan pembangunan bangsa.

B. Peran Pesantren Persis Dalam Membangun Wawasan Diniyah dan Kebangsaan

Untuk memahami bahwa pesantren Persis memiliki peran strategis dalam membangun wawasan diniyah dan kebangsaan setidaknya dapat dilacak dari visi, misi, latar historis dan orientasi pesantren Persis itu sendiri. Secara umum visi pesantren Persis adalah “ingin membentuk generasi yang tafakahu fiddin, sebagai wahana proses memanusiakan manusia untuk mengembangkan kompetensi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, dalam arti melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi, dan hukum-hukum Allah itu ada yang sabit, qati' tidak berubah, dan ada yang khairu sabit, mutasabih bisa berubah sesuai illat dan tuntutan perubahan zaman. Karena itu hukum Islam itu dinamis dan selalu cocok dengan perkembangan zaman.

Misi gerakan Persis dan pesantren Persis sejak awal keberadaanya adalah pengembangan gagasan dan pemurnian pemikiran Islam baik menyangkut soal aqidah, ibadah, dan muamalah yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Visi dan misi tersebut kemudian diadaptasi menjadi tujuan pesantren Persis sebagaimana tujuan awal didirikannya pesantren Persis oleh A. Hasan adalah mendidik dan mempersiapkan santri untuk menjadi ulama dan mubalig (dai') yang benar-benar paham dan kuat ilmu agamanya agar bisa merespon kebutuhan masyarakat saat itu, bisa berdakwah, bisa mengajar ilmu agama dan mengembangkan pemikiran Persis sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi di tengah masyarakat.²

KH. Muhammad Romli, mengibaratkan pesantren Persis itu bagaikan lumbung padi, padi yang disimpan di lumbung itu makin lama padinya makin bagus, makin enak, makin berkualitas. Artinya pesantren Persis itu mengusung konsep pendidikan Islam yang mengacu pada landasan pokoknya adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk memurnikan dan mentransformasi ajaran Islam sesuai sunah Nabi dengan tujuan untuk melahirkan santri yang mutafakahu fiddin. Karena itu kurikulumnya tersendiri dengan sebaran mata pelajaran agama yang dominan dan sedikit penyesuaian dengan mata pelajaran umum. Santri yang masuk di sini harus memenuhi standar yang ditentukan, kalau tidak maka harus mengikuti kelas persiapan/I'idad (kelas khusus/takhasus).³

Menurut Imam Setiawan, belakangan ini ada kecenderungan peningkatan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap pesantren Persis. Terbukti setiap tahun penerimaan santri baru selalu melampaui kuota yang ditentukan. Jauh sebelum pendaftaran masuk di buka banyak orang tua telah menitipkan anaknya dengan harapan kelak diterima di pesantren Persis, sehingga para ustaz kebingungan antara menerima anak-anak yang membutuhkan pendidikan Islam dengan kuota atau daya tampung pesantren yang terbatas. Pada masa dulu, orang mau masuk pesantren kalau tidak diterima di sekolah paporit umum pilihannya, atau sebaliknya kalau anak itu nakal lalu orang tuanya mau menyekolahkan

Ust. Jeje Jaenuddin, dan ust. Dede Rosiddin, **wawancara.**, Maret... 2020.

³ Ust. KH. Muhammad Romli, Pimpinan Popes Persis Cibegol Soreang Wawancara...,Maret 2020.

di pesantren, seolah-olah pesantren itu tempat buangan (penampungan) anak-anak nakal dan gagal, sekarang berubah justru pesantren menjadi pilihan utama.⁴

Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pemicu banyaknya orang tua muslim mau memasukan anak-anak mereka ke pesantren? *Pertama*; Adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan fungsi pesantren yang dipandang cocok dengan tantangan zaman dalam membekali anak dengan pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang baik, tanpa mengabaikan pengetahuan umum dan keterampilan. *Kedua*; Adanya pengakuan masyarakat terhadap kemampuan dan kepribadian anak-anak santri dan alumni pesantren Persis di masyarakat, mereka terlihat siap pakai paling tidak mereka bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik, memberikan tuntunan agama dengan dalil-dalil yang cukup baik. *Ketiga*; berubahnya cara pandang orang tua saat ini, bagi anak-anak mereka terutama harus menjadi anak yang baik, anak yang shaleh, cerdas itu nomor. kesekian, asal sudah saleh insya Allah pintar dan trampil itu kelak akan menyusul.⁵

Harapan terbesar yang ingin diwujudkan bagi santri di pesantren Persis adalah Untuk menanamkan adab, kesetiaan dan kedisiplinan maka setiap satu minggu anak-anak/santri dibai'at dengan butir-butir kalimat seperti “ Ubayiu Ustadi saya berberbaiyat akan setia kepada guru , An utia' Ustazi saya akan taat kepada ustaz, (2) an abirra walidaya; saya akan berbakti melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tua. Dengan dua butir ini yang menjadi dasar yang pertama ditanamkan jalinan ketaatan santri dengan ustaz akan lahir kasih sayang secara timbal balik antara ustaz dan santri. Dengan kasih sayang ini barulah muncul keihlasan, dan dengan begitu Ustaz ikhlas mengajar tanpa pamrih dan santri pun bersungguh-sungguh dalam belajar.⁶

Penanaman keimanan dan keislaman pola yang diterapkan di pesantren Persis yang diutamakan pertama-tama adalah akhlak. Akhlak itu bukan sekedar ucapan/perkataan tetapi mencakup perilaku sehari-hari, cara bertutur, berpakaian, cara bergaul, berkomunikasi, cara hidup yang patut, kedisiplinan dan hal ini semua dimulai dari para ustaz, para asatiz sampai

⁴ Ust. Imam Setiawan (Ketua PW Persis Jawa Barat, wawancara, tanggal 18 Maret 2020.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ust. KH. Muhammad Romli Wawancara, tanggal 17 Maret 2020.

kepada sesama santri sebagai misal penyebutan kamu itu diganti dengan antum dan sebagainya. Jadi santri/murid itu harus dibuat agar bisa menghormati dan memuliakan dirinya sendiri demikian pula orang lain.⁷ Sehingga penanaman keimanan dan akhlak itu amat membekas, karena yang dikedepankan di sini adalah kejujuran, satunya kata dan tindakan, jadi santri tidak hanya dituntut untuk cerdas intelegensinya, pandai berbicara dan berdebat tetapi juga adalah kecerdasan emosional dan spritual mampu mengaktualisasikan diri di tengah-tengah kehidupan sosial secara patuh serta mampu menjunjung dan melaksanakan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan di dalam kehidupannya.

Jadi keinginan Persis untuk melahirkan santri yang berwawasan diniyah dan sekaligus juga berwawasan kebangsaan sebenarnya adalah utama (pinal) sama dengan ketika orang berbicara tentang NKRI, bagi Persis itu adalah persoalan yang sudah final (selesai) karena para founding father termasuk yang menyusun Dasar Negara kita itu, sebetulnya tidak ada perbedaan mendasar mengenai soal-soal kebangsaan dengan tokoh Persis dan secara kejamiiyahan kita sudah mafhum dengan NKRI itu sudah final, dan pancasila itu sendiri merupakan hasil kompromi para ulama dengan para pendiri bangsa lainnya jadi di dalamnya termasuk pemikiran-pemikiran ulama yang banyak-banyak merepresentasi spirit dari ajaran Islam itu sendiri.

Ustat Jeje Jaenuudin menjelaskan bahwa keinginan mewujudkan santri yang berwawasan diniyah dan kebangsaan, maka sinkronisasi kurikulum kita lakukan dengan memasukan mata pelajaran umum sesuai kurikulum nasional Diknas dan Kemenag seperti PKn, pancasila, matematika, sejarah, bahasa dan lain-lain. begitupula kesadaran tentang nasionalisme kebangsaan, toleransi. Pola pembelajarannya terintegrasi, tidak dipisahkan dalam arti walaupun setiap mata pelajaran terorganisasi dalam jadwal, tetapi dalam penerapannya selalu terpadu dan memperhatikan aspek substansi dari pencapaian visi pendidikan pesantren Persis, misalnya ada mata pelajaran matematika, tetapi bersamaan

⁷ *Ibid.*

dengan itu ada juga pelajaran ilmu alat (nahu, Syarf) . Jadi tidak dipisahkan pelajaran umum di pagi hari misalnya sedangkan agama pada malam hari.⁸

Karena di pesantren Persis itu basis pemikirannya adalah al-Qur'an dan hadits, sehingga dalil-dalil alqur'an dan hadis itu justru dijadikan dasar untuk membuktikan dan memperkuat nilai-nilai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, jadi dengan materi agama seperti aqidah dan akhlak tafsir serta semacamnya kita yakin bahwa didalamnya telah terintegrasi dengan nilai-nilai kebaikan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara baik itu dapat dibangun dengan berislam secara benar, berakidah yang benar, berakhlak dan bermuamalah secara benar. Jadi kita ingin membuktikan bahwa radikal dalam beragama tidak berarti radikal dalam berpoltik, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan tindakan kekerasan dan intoleran. Radikalisme yang benar dalam beragama itu adalah berpikir yang kritis tentang nilai-nilai agama yang kontekstual dalam kehidupan kita karena nilai alqur'an dan hadits diyakini sejalan dengan tuntutan kehidupan masyarakat.⁹

Bagaimana menerapkan konsep pendidikan Islam pesantren persis untuk mempersiapkan santri sebagai muslim yang kaffah? Pertama yang dilihat dan diperhatikan adalah Kurikulumnya harus memperhatikan dan memahami benar tiga aspek yaitu; aspek ilahiyahnya dengan sebarannya yang tepat, yang berikut aspek kauniyahnya dan aspek aspek insaniyahnya serta memperhatikan kitab-kitab rujukannya. Makanya kalau saya sarankan supaya ikutilah pola yang diajarkan oleh A. Hasan Ust. Abdurahman, Ust. Abdulah, nanti mereka akan kuat agamanya tapi umumnya pun mereka tidak ketinggalan. jadi aplikasinya mulai penyusunan dan penggunaan kurikulum, kemudian gurunya harus benar-benar kompeten, kuat agamanya dan terpercaya sesuai bidangnya, dan terakhir ketepatan dalam memilih dan menggunakan kitab-kitab rujukan. Kalau pola ini diterapkan secara istiqamah insya Allah dalam waktu tertentu akan lahir santri (generasi) muslim yang

⁸ Ustat Jeje Jaenuddin, *Wawancara* tanggal 15 Maret 2020

⁹ Ustat Jeje Jaenuddin, *Wawancara* tanggal 15 Maret 2020.

kaffah, kuat agamanya, luas wawasan sosial kebangsaanya. Tentu hasilnya tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang dekat¹⁰.

Langkah strategi dan treatment pesantren Persis dalam membangun kesadaran dan keterampilan, agar santri hidup secara baik taat dan patuh dalam beragama bermasyarakat berbangsa dan bernegara seperti apa? kan kalau Kita memegang prinsip pada teori imam Al- Ghazali bahwa setiap santri (anak) itu memiliki mutiara, mutiara itu adalah hati, hati itu akan berkembang baik apabila dibiasakan dengan kebaikan. Apabila dibiasakan dengan keburukan maka hati juga akan menjadi buruk maka untuk memelihara Al- Ghazali memberikan modelnya dimana tarbiyah itu adalah induknya, lalu parian di bawahnya ada yang namanya ta'dib (pendidikan sejak dini) termasuk dalam hal ini adalah penanaman aqidah harus sejak dini yang berkaitan dengan kesadaran beragama kesadaran sosial kesadaran bernegara nah kalau ta'zib nanti untuk tingkat selanjutnya nanti disana ada pelurusan, perbaikan pengawasan kalau ta'lim itu pengkajian ilmunya yang mendalam. Tapi itu semua menurut Nasi Ulwa itu akan dipengaruhi oleh syakil makanya pembentuknya mesti baik-baik, jadi model pendidikannya ta'dib, ta'zib, ta'lim ta'dib untuk tingkat dasar, ta'zim untuk tingkat lanjut ta'lim untuk tingkat yang lebih lanjut lagi nah dari sana akan syakil yang mesti bagus seperti dalam arti bahwa setiap orang itu akan berperilaku sesuai dengan siapa yang membentuknya.¹¹

Jadi nilai-nilai pendidikan Islam yang ditransformasi dalam kehidupan sehari-hari santri adalah meliputi nilai-nilai; 1) nilai aqidah, 2) nilai akhlak, 3) nilai ibadah, 4) nilai muamalah, 5) nilai kecerdasan, 6) nilai kejujuran, 7) nilai kebenaran, 8) nilai keteladanan, 9) nilai kepercayaan (amanah), 10) Nilai keikhlasan dan ketulusan, 11) nilai cinta kasih; 12) nilai kesetiaan; 12) nilai kejuangan, 13) nilai kebangsaan; 14) nilai pengorbanan; 15) nilai kerukunan; 16) nilai persatuan; 17) nilai solidaritas, 18) nilai kepedulian; 19) nilai tanggung jawab, 20) nilai ketanggapan dan resposibilitas, 21) nilai kemajuan, 22) nilai peradaban, 22) nilai kestiakawanan, 23) nilai kebersamaan, 24) nilai kesetaraan, 25) nilai kesederhanan, 26) nilai kesabaran, 27) nilai kebersamaan, 28) nilai kemandirian. Jadi simpelnya ada nilai

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ust. KH. Dr. Dede, *wawancara*, tanggal 18 Maret 2020.

Ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kemasyarakatan (musyawarah), dan ada nilai keadilan sosial.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, maka tidak berlebihan bila disebutkan bahwa pendidikan Islam pesantren Persis dapat menjadi salah satu alternative yang bisa merespon kebijakan operasionalisasi pendidikan yang terkesan cenderung dikotomik dan parsial terhadap pendidikan rohaniah dan pendidikan jasmaniah atau pendidikan agama di satu sisi dengan pendidikan umum di sisi lain secara diametral, yang oleh Nurcholish Madjid menyebutkan pola pendidikan dikotomik secara tak sadar telah menggiring peserta didik pada konsep nilai *scientism* dan *mechanism*. Konsep itu telah menempatkan peserta didik sebagai “mesin-mesin” yang harus diawasi dan dimanipulasi lewat kekuatan fisis-kimiawi dan alat-alat teknologi.¹²

Akibatnya terpisah nilai-nilai kewahyuan dari pribadi peserta didik yang lebih mengandalkan kekuatan rasional semata. Keadaan ini menimbulkan kecenderungan pikiran yang tak memiliki dimensi ilahiyah yang menjiwai konsep pendidikan yang ditawarkan yang berdampak pada lahirnya berbagai bentuk tindakan amoral, seperti kekerasan, KKN dan sebagainya.

Arnold J. Toynbee sebagaimana dikutip Khursid Ahmad, dalam Samsul Nizar,¹³ menjelaskan bahwa setidaknya ada dua hal yang melanda peserta didik dari nilai-nilai spiritual dan tegarnya dimensi materialistik (kebendaan) pada kehidupan manusia modern dewasa ini, yaitu kosongnya jiwa peserta didik dari nilai-nilai spiritual dan tegarnya dimensi materialistik (kebendaan) pada kehidupan manusia modern atau sebaliknya lebih dominan aspek spiritual dan melepaskan aspek material (ilmu pengetahuan dan teknologi). Untuk melepaskan diri dari kedua hal tersebut maka peserta didik memerlukan nilai spiritual dan memahami ajaran agamanya secara totalitas. Dalam hal mana spirit Islam dengan nilai-nilai moralnya yang sangat tinggi untuk kebahagiaan kehidupan peserta didik sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

¹² Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Pedaban*, Jakarta: paramadina, 1992, h. 30.

¹³ Samsul Nizar, *Dasar-Dasar Pemikiran pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media pratama, 2001, h. 4.

Menanggapi persolan tersebut Neong Muhadjir sebagaimana dikutip Samsul Nizar, berpendapat bahwa sudah saatnya program pendidikan saat ini ditinjau kembali, sehingga benar-benar mampu berfungsi untuk menumbuhkan daya kreativitas peserta didik yang menunjang kualitas pendidikan, sekaligus melestarikan nilai-nilai Ilahiyah dan insaniah serta membekalinya dengan kemampuan yang produktif dan berkualitas. Alternatif lain dikembangkan Higgins dan Roger adalah dengan jalan menanamkan kembali pendidikan rohani (spiritual) dan keimanan (*faith*), serta menempatkan pendidikan al-insaniah sebagai upaya mengangkat kembali nilai-nilai fitri peserta didik yang potensial pada posisinya yang ideal.¹⁴

Jadi optimalisasi pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik pada pengembangan peserta didik secara total dengan materi pembelajaran secara multidisipliner yang selaras dengan kehendak dan kemampuan peserta didik, serta terformulasi dengan aspek spiritual, moral, intelektual, imajinasi, emosi dan fisikal. Dengan konsep ini diharapkan muncul perilaku bijaksana dan kedewasaan dalam mengemban fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.

Persis sejak keberadaanya telah menunjukkan konsistensinya dalam memelopori dan membangkitkan semangat untuk menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai cahaya yang menerangi landasan ideal dan konstitusional dalam mendidik hidup berjamaah, berimamah, dan berimarah, tunduk taat pada satu nidham yang dilandasi nilai-nilai Islam serta dalam berbangsa dan bernegara di bumi nusantara ini.

Sejarah telah membuktikan kemajuan dan kontribusi umat Islam pada dunia dalam membangun kebudayaan dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam, telah menghasilkan rumusan, teori, serta keteladanan dalam mengelola dan memimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Persis melalui tokoh-tokoh pendirinya KH. Zam-Zam, KH. Muhammad Yunus, M. Natsir, A. Hasan telah ikut serta berperan aktif dalam memberikan arah dan dasar-dasar berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memberikan keteladanan

¹⁴ *Ib id.*, h. 5.

kepada umat agar kembali kepada al-Qur'an' dan as- Sunnah dalam segala aspek kehidupan melalui gerakan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.¹⁵

¹⁵ Lihat *Qanun Asasi Qanun Dakhili Persis* tahun 2015 –n 2020.

BAB IV.

PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN PERSIS DAN PERANNYA BAGI NKRI

A. Pengertian Pendidikan Islam

Secara etimologi, istilah pendidikan Islam terdiri dari dua kata yakni 'pendidikan' dan Islam. Dalam Islam, istilah pendidikan sering disebut dengan *al-ta'lim*, *al-tarbiyyah* dan *al-ta'dib*. Setiap istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Hal ini karena disebabkan konteks kalimatnya yang berbeda dalam penggunaan istilah itu. Akan tetapi, dalam konteks pendidikan, ketiga istilah tersebut sesungguhnya memiliki makna yang sama, yakni pendidikan. Berikut di jelaskan ketiga makna tersebut dengan konteksnya yang berbeda-beda pula.

1. *al-ta'lim*

Kata dasar *al-ta'lim* secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir dalam Dedeng Rosidin, bahwa makna '*allama al-'ilma* berarti mengajar dan '*allamahu* berarti *hadzdzabahu* yang artinya mendidik.¹ Kata '*alama* yang bentuk masdarnya *al-i'lam* bermakna memberitahu. Sedangkan *ta'lm* berarti *talqinu al-dars* bermakna pengajaran. Dan dapat pula bermakna *al-tahzib* yakni pendidikan. Sementara itu, Al-Zubaidi dalam Dedeng Rosidin mengatakan bahwa *al-ta'lim* dan *al-i'lam* adalah satu makna, yakni pemberitahuan.²

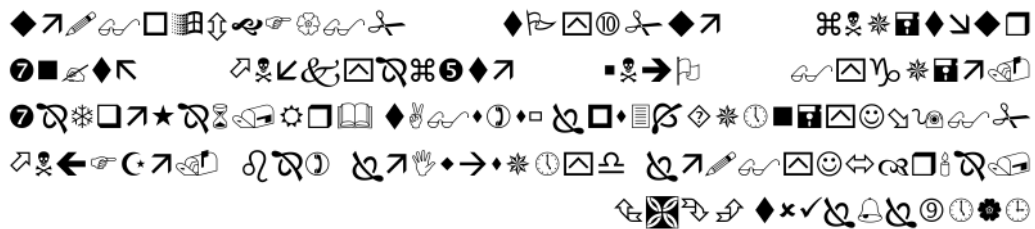
Berbeda halnya dengan Zakiah Daradjat, ia mengatakan bahwa kata '*allama* memberi pengertian pada sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, ia tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, sebab sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan oleh pemberian pengetahuan.³ Itu sebabnya, kata *ta'lim* yang bermakna pengajaran lebih mengarah kepada aspek kognitif yang mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keteampilan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik. Relevan dengan itu, seperti dikatakan

¹Lihat Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dalam Al-Quran (Kajian Tematik Dan Semantik)*, (Cet. I; Bandung: Insan Rabbani, 2015), hlm. 40.

²Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dal Al-Quran (Kajian Tematik dan Semantik)*, hlm. 40.

³Lihat Zaliah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 97.

al-Raghib dalam Dedeng Rosidin bahwa *al-ta'lim* yang bermakna pengajaran yakni pemberitahuan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sering, sehingga berbekas pada diri *muta'allim* atau anak didik. Atau dalam kata lain bahwa *ta'lim* adalah menggugah untuk mempersepsikan makna dalam pikiran.⁴ Makna ini biasanya menyandarkan pada firman Allah swt:



Terjemahnya:

Dan Dia **mengajarkan** kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda-benda itu jika kamu mamang orang-orang yang benar!" (QS. Al-Baqarah: 31)

Muhammad Rasyid Ridha dalam Ahmad Tafsir mengartikan *ta'lim* sebagai proses transmisi pelbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.⁵ Sementara Abdul Fattah Jalal dalam Ridwan Nasir mengartikan *ta'lim* sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga penyucian diri manusia itu berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala sesuatu yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.⁶

Bertolak dari pengertian di atas, *al-ta'lim* berarti usaha yang dilakukan secara terus menerus manusia sejak lahir sampai mati untuk menuju dari posisi tidak tahu menjadi ke posisi tahu. Hal ini seperti terdapat dalam al-Quran surah an-Nahl ayat 78:

⁴Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dal Al-Quran (Kajian Tematik dan Semantik)*, h. 41.

⁵Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), h 47.

⁶Lihat Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.



Terjemahnya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nhl: 78).

Dari ayat tersebut menandakan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak mengetahui apa-apa. Akan tetapi, melalui pengetahuan yang diilhamkan oleh Allah swt kepada manusia berupa pengetahuan untuk mengetahui jenis-jenis yang telah diciptakan beserta zat, sifat, dan nama-namanya, seperti tertera pada QS. Al-Baqarah ayat 31, manusia bisa menguak misteri alam raya. Itulah sebabnya, melalui *ta'lim* itulah manusia dapat menjangkau aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidupnya serta sebagai pedoman perilaku yang baik, sebagai upaya untuk mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia untuk lebih maju lagi dan kehidupannya menjadi lebih mulia, hingga terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. Hal ini dikarenakan manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Meski demikian, ia dibekali dengan berbagai potensi untuk membangun keterampilannya tersebut agar dapat memahami ilmu serta memanfaatkannya dalam kehidupan.

Pengajaran mencakup aspek teoretis dan praktis sehingga peserta didik memperoleh kebijaksanaan dan menjauhi kemudharatan. Pengajaran itu, juga mencakup ilmu pengetahuan dan *al-hikmah*. misalnya guru matematika akan berusaha dan berupaya mengajarkan *al-hikmah* matematika, yaitu pengajaran nilai kepastian dan ketepatan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam bersikap menjalani kehidupannya, yang dilandasi oleh pertimbangan yang rasional serta perhitungan yang matang dan cermat.

2. *al-tarbiyyah*

Dalam bahasa Arab, kata *al-tarbiyyah* memiliki tiga akar kata, yakni:

1. *Rabba – yarubbu* yang memiliki makna tumbuh, bertambah, berkembang. Dan dalam kamus Mahmud Yunus kata *rabba-yarubbu* bermakna mengasuh, dan memimpin.⁷
2. *Rabbi-yarba*, yang memiliki makna tumbuh dan menjadi besar atau dewasa.
3. *Rabba – yarubbu* yang memiliki makna memperbaiki, mengatur, mengurus, dan mendidik, menguasai dan memimpin, menjaga dan memelihara.⁸

Menurut Musthafa al-Ghalayani dalam Ridwan Nasir bahwa *al-tarbiyyah* adalah penanaman etika yang mulia pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasehat sehingga ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik cinta akan kreasi, dan berguna bagi tanah airnya.⁹ Akan tetapi, jika *term al-tarbiyyah* dihubungkan dengan bentuk *madhi*-nya seperti pada kata *rabbayany* yang tertera dalam QS al-Isra: 24 (*kama rabbayany soghiran*) dan dalam bentuk *mudhari*-nya *murabbi* seperti pada QS as-Syu'ara: 18 (*alam nurabbika fina walydan*) maka kalimat tersebut memiliki beberapa makna, diantaranya memelihara, mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, membesarkan, memproduksi, dan menjinakkan. Akan tetapi, menurut Muhaimin dalam Heri Gunawan bahwa pada konteks surat al-Isra tersebut cakupannya lebih luas, yaitu mencakup semua aspek jasmani dan rohani. Sedangkan dalam konteks surat as-Syu'ara, hanya mencakup aspek jasmani saja.¹⁰

Dengan demikian bahwa *al-tarbiyyah* merupakan proses transformasi pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau dari orang tua kepada anaknya. Transformasi pengetahuan tersebut dilakukan dengan penuh keseriusan agar peserta didik memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang baik. Dengan

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hlm. 136.

⁸Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, h. 10-11.

⁹Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, hlm. 47.

¹⁰Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 2-3.

terbentuknya individu seperti itu maka tujuan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan terwujud adanya.

Dalam *al-tarbiyah* itu mencakup pelbagai aspek, yani aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah ini harus dimiliki oleh peserta didik atau setiap individu. Karenanya, setiap institusi pendidikan secara kelembagaan harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang telah dicanangkannya itu. Untuk itu pendidik dalam mendidik harus memiliki keseriusan, kesungguhan, keikhlasan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan profesional.

Peserta didik juga diharapkan untuk dapat belajar dengan baik dan penuh kesungguhan hingga pengetahuannya dapat bermanfaat bagi pribadinya dan masyarakat sekitarnya. Dalam pengertian *al-tarbiyah* tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak sekedar menitikberatkan pada kebutuhan jasmani semata, melainkan juga menitikberatkan pada kebutuhan rohani, sosial, akhlak, dan agama untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pendidikan Islam yang dilakukan harus mencakup proses transformasi kebudayaan, nilai dan ilmu pengetahuan yang mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki peserta didik agar melahirkan peserta didik kearah insan kamil, yakni manusia sempurna yang sadar akan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi.

3. *al-ta'dib*

Kata *ta'dib* secara etimologi adalah bentuk masdar yang berasal dari kata *addaba* yang artinya membuat makanan, melatih dengan akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik.¹¹ Menurut Syed Naquib al-Attas dalam Ahmad Tafsir bahwa *ta'dib* berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan.¹²

Pengertian *ta'dib* di atas menegaskan bahwa pendidikan Islam itu adalah usaha agar manusia mengenali dan mengetahui suatu sistem pengajaran tertentu. Seperti halnya

¹¹Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, h. 44.

¹²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 29.

dengan mengajar, melalui mengajar itulah individu itu diharapkan untuk mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Misalnya, seorang pendidik memberikan teladan atau contoh yang baik agar ditiru atau di contoh oleh peserta didiknya, memberikan *reward*, memberikan pujian, hadiah dan sebagainya. Dengan demikian, akan membentuk individu muslim yang kaffah dan berakhlak mulia.

Pendidikan dalam sistem pendidikan dinilai penting fungsinya karena dalam sebuah komunitas masyarakat sudah pasti membutuhkan pendidikan, utamanya pendidikan akhlak mulia. Dari usaha pembinaan dan pengembangan itulah diharapkan manusia mampu berperan sebagai *Abdullah* dan *khalifah fil al-ardhi* dengan ketundukan dan ketaatan sepenuhnya semata kepada Allah swt. Ketundukan dan ketaatan itu terejawantahkan pada semua dimensi hidupnya, sehingga mewujud dalam bentuk sosok manusia yang sempurna.

Dalam konsep *ta'dib* mengandung tiga unsur, yakni pengembangan iman, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan amal.¹³ Hubungan antara ketiga unsur tersebut sangat penting karena untuk tujuan pendidikan itu sendiri. Iman merupakan suatu pengakuan terhadap yang menciptakan, yakni Allah swt di dunia ini yang direalisasikan dengan ilmu. Konsekuensinya adalah amal perbuatan yang baik.

Ilmu harus dilandasi dengan iman. Ilmu harus mampu berbentuk amal karena ilmu itu harus diamalkan kepada setiap orang yang belum mengetahuinya. Dengan terealisasinya unsur tersebut akan tewujud tujuan pendidikan. Dalam sosok pribadi individu yang beriman dan beramal soleh tersebut dapat digambarkan bahwa mereka memiliki jati diri sebagai hamba atau pengabdikan kepada Allah swt, serta ikut dalam berkreasi dan berinovasi guna kepentingan kesejahteraan hidupnya. Itu sebabnya, atas dasar keimanan ia mampu memelihara hubungan baiknya dengan Allah swt. dan antara dirinya dengan sesama manusia. Selain itu, realisasi dari keimanan itu terlihat dari kemampuannya untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi yang berguna bagi kehidupan bersama.

Ta'dib sebagai upaya dalam pembentukan adab, dapat di bagi menjadi empat jenis, yakni:

¹³Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, hlm. 52-53.

1. *Ta'dib* adalah *al-haqq*, yakni pendidikan akhlak dan spiritual dalam kebenaran yang di dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran dan dengannya segala sesuatu diciptakan.
2. *Ta'dib* adalah *al-khidmah*, yakni pendidikan tata krama spiritual dalam pengabdian
3. *Ta'dib adab al-syar'iah* yakni pendidikan tata krama yang tata caranya telah digariskan oleh Allah swt. melalui wahyu.
4. *Ta'dib adab al-shuhbah*, yakni pendidikan tata krama dalam persahabatan.¹⁴

Syed Naquib al-Attas mengatakan bahwa konsep *al-ta'dib* yang lebih tepat untuk disematkan pada konteks pendidikan Islam ketimbang kedua konsep lainnya, yakni *al-tarbiyah* dan *al-ta'lim*. Mengapa, karena konsep *al-ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur ilmu dan instruksi (*al-ta'lim*) serta pembinaan yang baik (*al-tarbiyah*).¹⁵ Akan tetapi, bahwa pada prinsipnya ketiga istilah tersebut yakni *al-ta'lim*, *al-tarbiyah*, dan *al-ta'dib* kesemuanya bermuara pada pembinaan manusia yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik.

Selain diketengahkan *term* pendidikan Islam secara bahasa, berikut diketengahkan pula pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, diantaranya adalah:

Ahmad Tafsir, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna Islam. Sedangkan pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasar Islam. Nila-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai atau mendasari proses pendidikan.¹⁶

Menurut Haidar Putra Daulay, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta.¹⁷

M. Yusuf al-Qardhawi dalam Azyumardi Azra, mengartikan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dan baik

¹⁴Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 20-21.

¹⁵Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*, hlm. 7.

¹⁶Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, hlm. 23.

¹⁷Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, h. 3

dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.¹⁸

Sementara Hasan Langgulung dalam Azyumardi Azra, pendidikan Islam adalah sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.¹⁹

Jika dilihat dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ialah suatu proses kegiatan yang menjadikan manusia sebagai objeknya dengan membimbing seluruh potensi dasarnya untuk menuju kesempurnaan akhlaknya, baik akhlak kepada Allah swt. akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitarnya.

B. NilaiNilai Pendidikan Islam Di Pesantren Persis

Pesantren Persatuan Islam, sebagaimana lazimnya pesantren lainnya di Indonesia, memiliki tujuan untuk membentuk *insan yang tafaqquh fi al-dien* dan berakhlak mulia dengan dilandasi al-Quran dan Sunnah. Atas dasar itu, maka secara garis besar nilai-nilai pendidikan Islam di pesantren Persis meliputi *pertama* nilai ibadah, *kedua* nilai akhlak dan *ketiga* nilai sosial.²⁰

Pesantren Persis sebagai lembaga pendidikan Islam terus berupaya menjaga nilai-nilai luhur agama yang telah mengkristal di kalangan umat Islam. Kuatnya pesantren Persis dalam melakukan pembaruan pemikiran keagamaan melalui para ulama-ulama Persis hampir semuanya berbasis di pesantren-pesantren Persis. Itu sebabnya, Persis di kenal sebagai ormas kaum puritan yang begitu getol melakukan pembaruan dan *tajdid*, terutama di bidang pemikiran keagamaan, meskipun dalam keberadaannya tidak mengabaikan aspek yang lain seperti dakwah, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Dalam hal ibadah, santri Persis di pondok pesantren Persis sejak awal ditanamkan tentang bagaimana beribadah dengan benar sesuai petunjuk Quran dan Sunnah. Itu artinya bahwa para santri harus memiliki akidah yang lurus (*salimul 'aqidah*). Sebab, dari akidah yang benar dan lurus itulah akan melahirkan ibadah yang benar (*sahihul ibadah*).

¹⁸Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung: Rosda Karya, 2000, h. 5

¹⁹Azyumardi Azra, *Ib Id.*,

²⁰Dedeng Rosidin, Pimpinan Pondok Pesantren Persis 01 dan 02 Pajagalan, "Wawancara", Bandung: ...Maret 2020.

Karenanya, dalam hal ibadah ini para santri di Pesantren Persis sejak awal ditanamkan prinsip untuk beribadah dengan benar. Artinya, bahwa dalam hal beribadah harus merujuk pada al-Quran dan Sunnah. Ayat yang sering dirujuk sebagai dalil, diantaranya QS. Al-Maidah ayat 3.



Terjemahnya: ... pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu...(QS. Al-Maidah: 3).²¹

Demikian juga pendapat Imam Malik dalam A. Zakaria bahwa “siapa saja yang mengada-ada suatu bid’ah dalam Islam serta memandangnya baik sungguh ia telah mengira, menyangka bahwa Muhammad telah menghianati risalahnya, karena Allah swt telah berfirman: “pada hari ini, Aku telah sempurnakan untukmu agamamu..”Maka apa-apa yang saat itu (zaman nabi) bukan agama, saat ini pun tetap bukan agama.²² Selain itu, juga diketengahkan hadis Nabi “Aku tiada meninggalkan sesuatupun yang dapat mendekatkanmu kepada Allah swt. melainkan telah aku perintahkan kepadamu, (demikian pula) aku tiada meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkanmu dari Allah, melainkan aku telah melarangmu darinya”. (HR. Thabrani)

Paparan dalil tersebut oleh A. Zakaria disimpulkan bahwa *pertama* agama Islam itu telah sempurna, tidak perlu ditambah, dikurangi atau direkayasa, *kedua*, orang yang mengada-ada bid’ah dalam Islam sama dengan telah menuduh bahwa Nabi khianat dalam menyampaikan risalahnya, *ketiga*, tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru yang menyebabkan diri dekat dengan Allah telah diperintahkan oleh Nabi, *keempat*, tidak perlu meninggalkan sesuatu yang dibolehkan oleh agama dengan alasan untuk mendapatkan

²¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*,

²²Lihat A. Zakaria, *Al-Hidayah Edisi Kompilasi 1 2 3 4 Pembahasan Perbedaan-Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh Beserta Pemecahannya*, (Garut: Yayasan Ibn Azka, 2003), hlm. 2.

ridha Allah karena apapun yang membuat diri jauh dari Allah telah di larang oleh Nabi saw.²³

Acuan dalam beribadah di pesantren Persis bukan merujuk kepada guru, atau mazhab, tidak pula kepada tempat/ akal dan perasaan ataupun tradisi. Itu berarti dalam beragama hendaknya bertitik tolak dari dalil, yaitu al-Quran dan Sunnah. Dan sudah menjadi prinsip dalam ibadah di pesantren Persis, bahwa ibadah yang dilakukan niatnya hanya semata karena Allah, dan cara mengamalkannya pun benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi.²⁴ Jadi, dalam hal urusan ibadah pada asal/ dasarnya haram dikerjakan, kecuali ada keterangan/ dalil yang memerintahkan. Dengan demikian dalam urusan ibadah seyogyanya terlebih dahulu mencari dalil yang memerintahkan dan bukan sebaliknya, mencari dalil yang melarangnya.



Konsistensi prinsip dalam beribadah yang benar dengan di bawah landasan al-Quran dan Sunnah membuat pesantren Persis agak berbeda dengan pesantren kebanyakan di Indonesia. Bukan berarti pesantren lainnya tidak merujuk kepada al-Quran dan Sunnah, tetapi bagi pesantren Persis dalam soal ibadah harus jelas sumber dalilnya, dan tidak boleh sampai pada sikap taklid. Sikap ini melekat kuat disemua pesantren Persis dan lazimnya tidak dapat dibantah, selagi merujuk pada dalil yang kuat. Howard M. Federspiel, seorang

²³A. Zakaria, *Al-Hidayah Edisi Kompilasi 1 2 3 4 Pembahasan Perbedaan-Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh Beserta Pemecahannya*, hlm. 3.

²⁴A. Zakaria, *Al-Hidayah Edisi Kompilasi 1 2 3 4 Pembahasan Perbedaan-Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh Beserta Pemecahannya*, hlm. 4.

yang sangat konsen melakukan penelitian mengenai Persis, ia mengakui bahwa Persis sejak awal berdirinya sangat serius bergerak di bidang pendidikan melalui pesantren Persis yang telah banyak memberi warna bagi umat Islam di Indonesia. Dalam hal ibadah, lembaga pesantren Persis begitu kuat menanamkan sikap keagamaannya agar kaum muslimin menghilangkan semua kepercayaan dan praktik ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang oleh Federspiel disebut dengan tujuan agar Islam menjadi faktor dominan bagi bangsa Indonesia dan bagi kehidupan nasional Indonesia.²⁵ Melalui pesantren Persis nilai ini ditanamkan dengan baik dan benar kepada para santri agar memiliki pengetahuan yang kuat tentang Islam dan mengamalkan Islam secara benar sesuai petunjuk al-Quran dan Sunnah.

Relevan dengan hal tersebut, seperti dikemukakan pandangan Dedeng Rosidin bahwa komponen ibadah lebih dominan kalau dikategorikan kembali pada konsep pendidikan Luqman al-Hakim. Porsi pertama yang dilakukan Luqman dalam mendidik anaknya, yakni mengedepankan pendidikan aqidah (mengesakan Allah) sebagai pilar pertama dalam pendidikan. Materi pelajaran yang ditanamkan Luqman pertama kali kepada anaknya ialah keimanan kepada Allah swt. tidak menyekutukan-Nya dan ini merupakan pondasi awal untuk materi selanjutnya.²⁶ Selanjutnya, Rosidin menjelaskan bahwa Luqman memberi *mauidlah* (nasehat) kepada anaknya bahwa beribadahlah hanya kepada Allah swt dan melarang syirik. Syirik itu kezhaliman yang sangat besar, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dan menjadikan Allah pemberi nikmat disederajatkan dengan yang tidak memberi nikmat seperti patung dan berhala.²⁷ Beribadah yang baik dan lurus sesuai petunjuk al-Quran dan Sunnah menjadi pilar penting bagi terwujudnya pribadi yang taat dan tawadhu.

²⁵Lihat Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University, 1990), hlm. 186.

²⁶Lihat Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dalam Al-Quran Kajian Tematik dan Semantik*, hlm. 104.

²⁷ Lihat Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dalam Al-Quran Kajian Tematik dan Semantik*, hlm. 105.



Selanjutnya, nilai pendidikan Islam yang terus dijaga, yakni akhlak. Sebagaimana menjadi prinsip dasar dalam pendidikan pesantren Persis bahwa akhlak merupakan asas, prinsip yang demikian mengkristal dalam seluruh proses pendidikan dan pembelajaran di pesantren Persis. Secara spesifik terkait soal akhlak ini, dapat disimak dari *bai'at* santri yang setiap hari Sabtu diikrarkannya dihadapan seluruh asatidznya, yakni:

1. Ubaiyul' ustadi artinya aku (saya) berjanji kepada guruku
2. An utia' ustadi artinya aku akan taat kepada guruku
3. An abira walidaya artinya aku akan berbuat baik kepada kedua orang tuaku
4. An ajtahida biikhlashin artinya aku akan bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan
5. An aqra' Qur'ana kulla yaumin artinya aku akan membaca al-Qur'an setiap hari
6. Anla akziba artinya aku tidak akan berdusta
7. Anla atkhashama artinya aku tidak akan mencari-cari permusuhan
8. Anla akhkira ahdan aku tidak akan mencela, menghina seseorang
9. Anla ubdiya ziynati illa maazhahara minha artinya saya tidak akan menampakkan perhiasanku kecuali apa-apa yang Nampak
10. Anla adkhana aku tidak akan merokok
11. An atruka alfawakhisa ma zahara minha wama bathan artinya saya akan meninggalkan segala perbuatan yang jelek (kejelakan) yang Nampak maupun yang tgersembunyi
12. Ma yakunu min najwa tsalasatun illa hua rabiuhum artinya tiada pembicaraan antara tiga orang kecuali Allah yang keempatnya
13. Waala khamsatun illa hua saadisuhum artinya dan tidak ada pembicaraan antara lima orang kecuali Allah yang keenamnya

14. Wala adna min zaalika wala aktsaru illa hua ma'ahum aina maakaanu artinya dan tidak ada pembicaraan yang kurang dari itu atau lebih kecuali Allah bersama mereka di manapun mereka berada.²⁸

Dalam proses pembelajaran yang dikedepankan adalah akhlak, keteladanan, ketulusan/keikhlasan, kesopanan dan amanah. Karena itu setiap hari sabtu semua santri dibai'at dengan 14 aitem pernyataan tersebut. Penanaman nilai akhlak tersebut sebagai upaya pendidikan yang diarahkan untuk melatih para murid atau anak didik agar senantiasa berakhlak mulia, dan memiliki kebiasaan yang terpuji. Dengan demikian akhlak dan kebiasaan tersebut terbentuk menjadi karakter dan sifat yang tertancap kuat dalam diri santri. Dengan karakter dan sifat yang tentunya baik, para santri diharapkan mampu meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta terbebas dari akhlak yang buruk.

Ibnu Qayyim dalam Yanuar Arifin mengatakan bahwa sumber pendidikan *khuluqiyah* itu ada dua, yakni *pertama* kitabullah/ al-Quran, yaitu sebuah kitab yang menjadi panduan, pedoman, dan tuntunan dalam pendidikan umat yang telah disifati Allah swt. sebagai umat terbaik. *Kedua* hadis atau Sunnah rasulullah saw. Inilah sumber mata air yang menjadi penyiram bagi ladang pendidikan *khuluqiyah*. Sebab, Rasulullah saw merupakan teladan akhlak yang terbaik bagi umat manusia.²⁹

Selanjutnya, Ibn Qayyim mengatakan bahwa pendidikan akhlak bertujuan untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah swt. yang menjadi sebab utama bagi kebahagiaan manusia. Allah swt. menciptakan manusia, memuliakan, dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Tentunya, tiada kebahagiaan dan keberuntungan bagi manusia kecuali dengan memenuhi tanggung jawab kekhalfahannya melalui akhlak yang utama dan terpuji.³⁰

Bai'at santri di pesantren Persis itu akan berdampak pada pembentukan sifat dan karakter santri yang terwujud pada kepribadian mereka. Hal ini akan menjadi tugas yang

²⁸KH. Muhammad Romli, Pimpinan Pesantren Persatuan Islam Cibegol, "Wawancara", Bandung, Maret 2020.

²⁹Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam Dari Klasik Hingga Modern*, Cet.I; Yogyakarta: IRCiSod, 2018, h. 297.

³⁰Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam Dari Klasik Hingga Modern*, hlm. 298.

melekat pada santri yang harus ditunaikan dalam seluruh aktivitasnya di dalam pesantren. Karenanya, setiap santri diharapkan untuk;

Pertama, senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena belajar adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali dengan hati yang bersih, *kedua* tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat kemuliaan. *Ketiga* memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. *Keempat* setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya, *ke lima* peserta didik hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar.³¹

Selanjutnya, ditambahkan al-Abrasyi, bahwa diantara tugas dan kewajiban peserta didik, adalah *pertama* sebelum belajar ia hendaknya terlebih dahulu membersihkan hatinya dari segala sifat yang burk, *kedua* niat belajar hendaknya ditujukan untuk mengisi jiwa dengan berbagai fadilah, *ketiga* hendaknya bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air untuk mencari ilmu ke tempat yang jauh sekalipun, *keempat* jangan terlalu sering menukar guru kecuali dengan pertimbangan yang matang, *kelima* peserta didik wajib menghormati gurnya, *keenam* jangan melakukan sesuatu aktivitas dalam bentuk belajar kecuali atas petunjuk dan izin dari guru, *ketujuh* memaafkan guru apabila mereka bersalah, terutama dalam menggunakan lidahnya, *kedelapan* wajib bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan tekun dalam belajar, *kesembilan* peserta didik wajib saling mengasihi dan menyayangi diantara sesamanya, sebagai wujud untuk memperkuat rasa persaudaraan, *kesepluluh* bergaul dengan baik terhadap guru-gurunya, *kesebelas* peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajarannya dan menyusun jadwal belajar yang baik guna meningkatkan kedisiplinan belajarnya. *Keduabelas* menghargai ilmu dan bertekad untuk terus menerus menuntut ilmu sampai akhir hayat.³²

Semua bentuk tindakan yang dilakukan santri harus mencerminkan akhlak yang baik. Hal ini bertujuan untuk membangun karakter mereka, sebab dalam konteks saat ini

³¹Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet.I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hlm. 50.

³²Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, hlm.51.

apa yang telah dilakukan di pesantren itu bukan hal yang baru, sebab itu sudah dilakukan sejak lama dan kalau saja di negara kita baru dimulai mencanangkan soal pendidikan karakter itu, sebenarnya hal ini telah dilakukan sejak lama di dunia pesantren. Jadi ia bukan hal yang baru sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang disebut dengan pendidikan akhlakul karimah dan ini yang ditanamkan sejak awal. Jadi membangun kejujuran, akhlak, sikap, bakti pada orang tua, hormat pada guru, dan sayang terhadap sesama, dan lain lain, semuanya itu diajarkan di pesantren.

Dalam hal membantu terhadap sesama misalnya, sikap egaliter itu ditanamkan dan diamalkan oleh santri. Baik yang kaya atau pun miskin di pesantren itu, mereka semua diperlakukan sama. Contoh soal baju misalnya yang di bawa ke pesantren itu ada batas maksimalnya. Tidak boleh ada yang mencolok. Baju itu tidak boleh ada yang bergambar untuk laki-laki. Jadi santri itu diharapkan untuk memiliki solider yang kuat sampai-sampai dalam hal pakaian saja tidak boleh ada perbedaan yang mencolok. Hal ini dilakukan supaya jangan ada perbedaan diantara santri yang kaya atau pun yang miskin, semua mereka sama. Dan itu disatukan di satu ruangan beberapa orang begitu. Jadi mau dan tidak mau kan harus adaptasi kan diantara mereka baik yang kaya atau pun yang miskin itu tadi.³³

Penanaman akhlak yang baik di pesantren Persis sejak dini sudah dilakukan. Hal ini ditransformasikan melalui berbagai kegiatan sehari-hari, seperti hormat pada guru, berbakti pada kedua orang tua, sayang terhadap sesama dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain berdasarkan status sosial dan asal usul dan ini bertujuan untuk membangun sifat egalitarian. Hormat pada sesama telah ditanamkan sejak dini sehingga membentuk kepribadian mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Demikian pula, para santri di pesantren Persis selalu dituntut untuk menunjukkan perilaku jujur, baik ketika sendirian atau banyak orang. Sikap jujur yang ditampilkan menjadi karakter mereka, karena sudah tertanam kuat bahwa dimanapun mereka berada, selalu dalam pengawasan Allah swt.

³³Ihsan Setiadi Latief, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama Antar Lembaga Universitas Persatuan Islam (UNIPI), Mantan Ketua Bidang Jamiyyah PP Persis Masa Jihad 2015-2020 "Wawancara", Bandung, Maret 2020.

Apa yang kemudian dilakukan pesantren Persis dalam menumbuhkan nilai-nilai pendidikan Islam relevan dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁴

Selain itu, di Pesantren Persis juga ditanamkan nilai-nilai sosial. Sebagaimana organisasi induknya, yakni Persatuan Islam yang sangat kuat memegang prinsip hidup dalam *berjamiyyah* sebagai bentuk kekhasan Persis dalam hidup berjamaah. Itu sebabnya, sebagaimana yang diamanatkan tokoh Persis KH. Drs. Shiddiq Amien, MBA “setiap anggota dan calon anggota Persis harus memahami dengan baik dan benar tentang esensi dari hidup berjamaah, berimamah, dan berimarah, memahami dasar-dasar *naqli* dan *aqli* mengapa kita mesti berjam’iyyah, mengetahui sejarah singkat Persis dan pemikirannya, mengetahui struktur kelembagaan yang ada di Persis dengan peran dan fungsinya, sehingga bisa lebih menumbuhkan *mahabbah* dan menjadi anggota yang baik, taat, dan bertanggung jawab, sehingga semuanya memiliki nilai ibadah.³⁵

Selanjutnya, Siddiq Amien mengatakan bahwa menjadi anggota Persis tidak boleh karena paksaan atau sekedar pengaruh lingkungan, tetapi mesti benar-benar berangkat dari suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat dan benar, berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga tidak mudah goyah keyakinan, dan siap menunaikan tugas dakwah dengan ikhlas dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki.

Banyak pihak yang enggan masuk dalam *shaff* perjuangan Persis dengan berargumen, antara lain bagi saya yang penting mengikuti al-Quran dan as-Sunnah, tidak perlu berjam’iyyah. Ungkapan tersebut secara langsung atau tidak langsung telah menuduh

³⁴Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003) (Cet.I; Jakarta: Penerbit, Sinar Grafika, 2003), hlm. 5-6.

³⁵Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam’iyyah Persis*, (Edisi ke-IV; Bandung: Persis Pers, 2014), hlm. Iii.

hidup berjama'iyah bukanlah merupakan implementasi nilai-nilai al-Quran dan as-Sunnah, dan itu merupakan pemahaman parsial. Padahal begitu banyaknya ayat-ayat dan hadis nabi saw. yang menuntun kita ke arah itu. Selain itu, tidak jarang pula mereka yang sudah menjadi anggota Persis memiliki tingkat ketaatan dan loyalitas yang rendah, bahkan dengan mudahnya atau dengan alasan yang tidak jelas atau hanya karena ada satu kekecewaan, kemudian meninggalkan kehidupan berjamaah.³⁶

Dalam konteks pesantren Persis, kehidupan berjamaah mencakup semua dimensi kehidupan di dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran. Aktualisasi nilai-nilai sosial yang dimaksudkan dalam hal ini berupa kehidupan pesantren dengan sistem yang mengitarinya terdiri dari kiyai, ustadz-ustadzah, santri, dan unsur-unsur lainnya sebagai bagian dari komunitas pesantren. Sebagai satu kesatuan sosial, di dalamnya terdiri dari Kiai sebagai imam atau pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan pesantren, juga ada ustadz-ustadzah atau para guru yang melakukan proses bimbingan dan pembelajaran di dalam pesantren. Juga ada santri yang melakukan aktivitas belajar. Untuk mengendalikan jalannya sistem sosial di dalam pesantren Persis, mulai dari tingkat dasar dan muallimin, setiap jenjang memiliki organisasi ksantrian. Di tingkat dasar (MTs) terbagi atas dua, yakni untuk putra di kenal dengan RG dan putri dikenal dengan UG.

Melalui organisasi ksantrian ini, para santri belajar berorganisasi dan mengelola dan menjalankan program kerja setiap divisi yang telah diprogramkannya. Tingkat pencapaian setiap program menjadi tujuan dari mereka yang telah tertuang pada rumusan program kerja selama masa kepengurusan. Melalui lembaga ksantrian inilah, terjalin interaksi sosial dalam komunitas pesantren Persis. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi sosial tersebut terbangun tidak semata melalui organisasi ksantrian, akan tetapi juga terjadi secara alamiah di lingkungan pesantren Persis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua elemen dalam pesantren Persis memiliki peran dan tanggung jawab dalam membina dan membangun relasi sosial sebagai bagian dari komunitas pesantren mewujudkan cita meraih masa depan, yakni masyarakat pesantren sebagai miniatur dari komunitas masyarakat bangsa.

³⁶Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah Persis*, hlm. iv

C. Visi, Misi, Tujuan dan Keberadaan Pesantren Persis

Sebagaimana Persis, keberadaannya di Indonesia telah menunjukkan eksistensinya sebagai ormas begitu konsen dalam gerakan dakwah dan pembaruan pemikiran keagamaan serta pendidikan melalui lembaga pesantren Persis. Persis sebagai sebuah *jam'iyah* dengan visi “terwujudnya Al-Jama'ah” sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah, terus melakukan *jihād* melalui berbagai kegiatannya, diantaranya bidang pendidikan. Demikian pula misi *jam'iyah* Persis, yakni *pertama* mengembalikan umat kepada al-Quran dan as-Sunnah, *kedua* menghidupkan ruhul jihād, ijtihād, dan tajdid, *ketiga* mewujudkan muwahid, mujtahid, dan mujaddid, *keempat* meningkatkan kesejahteraan umat.³⁷

Demikian pula dengan tujuan *jam'iyah* Persis adalah terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan.³⁸ Begitu pula dengan program jihād *jam'iyah* Persis yaitu meliputi;

Pertama; Ishlahul Aqidah dengan jalan membasmi khurafat, takhayul, dan syirik di kalangan umat Islam, *kedua; Ishlahul Ibadah* dengan jalan membasmi bid'ah dan taqlid serta membimbing umat dengan tuntunan al-Quran dan As-Sunnah, *ketiga; Ishlahul Muamalah* yaitu dengan jalan membimbing umat dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya atas dasar al-Quran dan as-Sunnah. *Keempat; Ishlahul Khuluqil Ummat*, yaitu dengan jalan memperbaiki akhlak masyarakat.³⁹

Dalam kerangka mewujudkan visi dan misi jamiyyah Persis tersebut di atas, maka melalui pesantren Persis terus diwujudkan dengan berbagai aksi nyata, yakni melalui proses pendidikan dan pembelajaran kepada para santri untuk melahirkan santri yang memiliki kekuatan aqidah, melaksanakan ibadah dengan benar sesuai al-Quran dan as-Sunnah, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang muamalah sesuai al-Quran dan as-Sunnah dan berakhlak mulia. Tercapainya visi dan misi *jam'iyah* Persis itu selaras

³⁷Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah Persis*, hlm. 94.

³⁸Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah Persis*, hlm. 95.

³⁹Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah Persis*, hlm. 95.

dengan visi pendidikan Persis, yakni terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.⁴⁰

Pencanangan visi pendidikan Persis tersebut mengacu pada al-Quran surah al-Baqarah ayat 30. Dan dalam konteks ini manusia diposisikan sebagai makhluk yang paling mulia dibanding makhluk-Nya yang lain. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan bentuk raga yang sebaik-baiknya (QS. At-Tiin/95:4) dan rupa yang seindah-indahnya (QS. At-Taghabun/64:3) dilengkapi dengan berbagai organ psikofisik yang istimewa seperti panca indra dan hati (QS. An-Nahl/6:78) agar manusia bersyukur kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan keistimewaan-keistimewaan itu.⁴¹

Selanjutnya, secara lebih rinci Nizar menjelaskan bahwa manusia itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang meliputi kemampuan berpikir untuk memahami alam semesta (QS. Arra'd/13:3) dan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri (QS. Ar-Ruum/30:20-21), akal untuk memahami tanda-tanda keagungan Allah swt (QS. Al-Hajj/22:46), nafsu yang paling rendah (QS. Yusuf/12:53) sampai yang tertinggi, kalbu untuk mendapat cahaya tertinggi (QS. Al-Fajr/ 89: 27-30), dan ruh yang kepadanya Allah swt. mengambil kesaksian manusia (QS. Al-A'raf/7: 72-74). Allah swt. menciptakan manusia bukan secara main-main (QS. Al-Mu'minun/23:115) melainkan dengan suatu tujuan dan fungsi.⁴²

Secara garis besar tujuan itu dikategorikan pada dua bentuk, yakni sebagai *pertama* khalifah dan, *kedua* 'abd (hamba). Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah swt. sebagai pengemban amanat (QS. Ar-Rum/33:72). Diantara amanat yang dibebankan kepadanya, yakni memakmurkan kehidupan di muka bumi (QS. Hud/11:16). Karena amat mulianya manusia sebagai pengemban amanat Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS. Al-Baqarah/2:30). Menurut Mustafa al-Maraghi, kata khalifah dalam ayat di atas memiliki dua makna, *pertama* adalah pengganti, yaitu pengganti Allah swt. untuk melaksanakan titah-Nya di muka bumi, *kedua* manusia adalah

⁴⁰Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam Tahun 2002, hlm. 51.

⁴¹Lihat Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Cet.I: Jakarta, Ciputat Pers, 2002), hlm. 17.

⁴²Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, hlm. 17.

pemimpin yang kepadanya diserahkan tugas untuk memimpin dirinya dan makhluk lainnya serta memakmurkan dan mendayagunakan alam semesta bagi kepentingan manusia secara keseluruhan.⁴³

Salah satu implikasi terpenting dari kekhalfahan manusia di muka bumi ini adalah pentingnya kemampuan untuk memahami alam semesta tempat ia hidup dan menjalankan tugasnya. Manusia memiliki kemungkinan untuk hal ini, dikarenakan kepadanya dianugerahkan Allah swt. berupa berbagai potensi seperti yang telah disebutkan di atas yang secara panjang lebar telah terurai dalam al-Quran. Disamping itu, alam semesta yang tebetang luas ini diperuntukan Allah swt. kepada manusia secara keseluruhannya. Itu sebabnya menjadi tanggung jawab moral manusia untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber-sumber yang tersedia di alam ini guna kepentingan dan kemaslahatan hidupnya.

Demikian pula perlu disadari bahwa kewenangan manusia untuk memanfaatkan alam semesta harus didasarkan kepada garis yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan tidak boleh menyalahinya, seperti tidak boleh merusak alam, tidak boleh mengeksploitasinya untuk kepentingan individu atau golongan, tidak boleh memanfaatkannya secara berlebihan dan hal-hal yang destruktif lainnya. Karenanya, manusia diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai khalifah Allah swt. di muka bumi yang hanya tunduk dan patuh kepada-Nya dan tidak boleh tunduk kepada alam semesta. Konsep inibermakna bahwa orientasi hidup seorang muslim hanyalah semata-mata ditujukan kepada Allah swt. penguasa alam semesta.

Pada konteks manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang dalam pendidikan Persis menjadi visi besarnya, maka hal ini ditransformasi melalui prinsip hidup dalam *berjamiyyah* di berbagai lembaga pendidikan Pesantren Persis, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Aktualisasi kekhalfahan ini diwujudkan melalui upaya dengan mendidik anggota Persis itu sendiri, dan kaum muslimin pada umumnya untuk menjadi hamba Allah swt yang mengamalkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, dengan penuh

⁴³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jus 1 dan 2* (Semarang: Toha Putra, 1985), hlm. 131.

tanggung jawab, serta menjadi *uswatun hasanah* bagi keluarga dan masyarakat sekelilingnya, baik dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah dengan tujuan agar semuanya menjadi *'ibadurrahman* yang mempunyai karakteristik seperti yang dilukiskan Allah swt. dalam QS. Al-Furqan:63-77.⁴⁴

Karenanya, visi mewujudkan khalifah Allah di muka bumi, menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan Persis. Akan tetapi, khalifah dalam konteks ini ialah melaksanakan hukum-hukum Allah sesuai manhaj hukum Allah,⁴⁵ Oleh karena itu, dalam pendidikan Pesantren Persis dalam hal manhaj itu ini ada dua yang terpenting; bahwa yang sabit yang tetap tidak boleh berubah dalam kondisi apapun. Yang kedua khairu sabit yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman.

Sementara itu, misi pendidikan Persis adalah pemanusiaan insan *ulul albab* selaku muslim *kaffah* yang *tafaqquh fi-al-din*.⁴⁶ Dalam berbagai referensi dijumpai pemakaian *ulul albab* demikian banyak dan beragam, walaupun sesungguhnya mengacu pada beberapa ayat al-Quran diantaranya QS. Al-Imran: 190-191 akan tetapi pada intinya kata *ulul albab* mengandung arti berfikir dan berzikir dimana keduanya berjalan sama beriringan. Melahirkan manusia yang memiliki pengetahuan yang luas dan menggunakan akal pikirnya untuk membaca, menelaah, menganalisis berbagai pengetahuan, baik secara tersirat maupun tersurat. Membaca alam raya sebagai ciptaan Allah dan berbagai fenomena sosial masyarakat melalui penalaran, telaah, dinalar dan diwujudkan Misi tersebut diimplementasikan pada sikap dan perilaku setiap insan Persis dalam mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar sesuai tuntunan al-Quran dan as-Sunnah.

Pengamalan ajaran Islam yang benar dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pengetahuan agama yang luas. Itu sebabnya, setiap individu selalu dituntut untuk terus belajar menggali pengetahuan agama diberbagai lembaga pendidikan Persis, baik formal, non formal dan informal. Pada lembaga pendidikan formal, hal ini di jumpai di

⁴⁴Shiddiq Amien, *Panduan Hidup Berjamaah di Jam'iyah Persis*, hlm. 109.

⁴⁵Dedeng Rosidin, *Pimpinan Pesantren Persis Nomor 01 dan 02 Pajagalan Bangung, Wawancara*, Bandung, Maret 2020.

⁴⁶Lihat Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam Tahun 2002, hlm.51.

pesantren-pesantren persis, mulai dari taman kanak-kanan hingga perguruan tinggi. Pada lembaga pendidikan non formal dapat di jumpai di berbagai kegiatan pengajian-pengajian Persis, mulai dari lingkungan masjid, mushollah, rumah, halaqah-halaqah, dan pengajian di tingkat pengurus mulai dari level jamaah, pimpinan ranting, kecamatan, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, sampai pimpinan pusat. Tidak kalah pentingnya pula di lingkungan pendidikan informal, yakni setiap keluarga Persis terus melakukan berbagai upaya guna mewujudkan keluarga yang taat dan tunduk pada ketentuan syariat Allah swt. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan Persis, yang pada awalnya lebih menekankan pada mencetak *muballigin* dengan penekanan bahwa setiap muballig yang *faqih*, yakni memahami agama secara mendalam.⁴⁷ Seiring waktu, tujuan pendidikan Persis tidak hanya melahirkan mubalig yang *faqih*, akan tetapi juga memiliki kepribadian muslim yang *tafaqquh fi al-din*.⁴⁸

Pendidikan Persis memang lebih berorientasi pada penciptaan generasi pelanjut yang memiliki pengetahuan agama yang kuat dan kokoh sehingga menjadi *fuqaha*. Dari generasi ini kemudian diharapkan mereka menjadi ahli agama yang mumpuni. Mereka menjadi tempat bertanya umat dalam perkara-perkara agama. Mereka seperti oase di tengah padang sahara yang menjadi tempat musafir melepas dahaga. Kemampuan lembaga pendidikan Persis melahirkan *fuqaha* sebagai generasi penerus sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, sebut saja misalnya, KH. Endang Abdurrahman, KH. Muhammad Isa Ansory, KH. Siddiq Amien, KH. Solehuddin Usman, KH. Maman Abdurrahman, KH. A. Zakaria dan sederet ulama besar lainnya. Sejalan dengan lahirnya generasi yang memiliki kepribadian muslim yang *tafaqquh fi al-din* sejalan dengan pendapat Zakiah Daradjat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam itu yakni membentuk *insan kamil* dengan pola takwa.⁴⁹

⁴⁷Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dalam Persatuan Islam*, Makalah disampaikan pada seminar Pendidikan Persatuan Islam di Bandung: Tahun 2005 hlm. 21.

⁴⁸Dedeng Rosidin, *Pendidikan Dalam Persatuan Islam*, Makalah disampaikan pada seminar Pendidikan Persatuan Islam di Bandung: Tahun 2005 hlm. 21.

⁴⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 31.

Artinya, bahwa hasil dari produk pendidikan Islam itu mereka yang memiliki iman yang kuat, pengetahuan yang luas, pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekalipun di sadari bahwa orang yang sudah takwa dalam bentuk insan kamil masih perlu untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya pemeliharaan supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dari firman Allah swt. QS. Ali Imran/3: 102. Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.⁵⁰

Relevan dengan tujuan pendidikan Persis dalam mewujudkan kepribadian muslim yang *tafakkuh fi al-din* seperti dikemukakan Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Armai Arief bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah swt. sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. Tujuan utama khalifah Allah adalah beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh secara total kepada-Nya.⁵¹

Selain itu, pendidikan formal Persis adalah pendidikan yang berorientasi pada Islam, bersistem, berlandaskan pada teori ilmu pendidikan dan tujuan nasional, serta mengacu pada komponen-komponen pendidikan. Tujuan membentuk generasi yang *tafaqquh fi al-din* dalam pendidikan Persis dilakukan melalui upaya *tanmiyat* (pengembangan) dan *tajdid* (pembaharuan).⁵² Itu sebabnya, *tafaqquh fi al-din* merupakan ciri khas tujuan pendidikan Persis, karena ingin melahirkan *fuqaha*. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penekanan pada pengkajian agama yang mendalam (*tafaqquh*) mendapat perhatian yang besar di pesantren-pesantren Persis. Jika tidak demikian, akan sulit untuk melahirkan *fuqaha*

⁵⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 32.

⁵¹Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 19.

⁵²Dedeng Rosidin *Pendidikan Dalam Persatuan Islam*, Makalah disampaikan pada seminar Pendidikan Persatuan Islam di Bandung: Tahun 2005 hlm. 21.

sebagai generasi pelanjut. Demikian kuatnya pendidikan Islam di pesantren Persis untuk melahirkan generasi *fuqaha* maka keberadaannya sangat diharapkan oleh *jam'iyah* Persis dan kaum muslimin pada umumnya di Indonesia.

D. Sistem Pendidikan di Pesantren Persis

Secara historis harus diakui bahwa keberadaan pesantren Persis di Indonesia telah lama ada, dan telah memberikan kontribusi yang tidak terbilang bagi kemerdekaan dan pembangunan bangsa dan negara republik Indonesia di segala bidang. Keberadaannya pun sampai sekarang masih tetap eksis. Pesantren Persis telah berjasa besar dalam melahirkan kader-kader ulama dan kemudian menjadi orang-orang yang sangat agresif dalam mendakwahkan agama Islam, serta melakukan pembaharuan di bidang pemikiran keagamaan. Dengan visi terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, pesantren Persis terus bergelut dengan waktu dalam melakukan berbagai aktivitas pendidikan dan pengajaran untuk mewujudkan manusia yang akan mengemban tugas mulia melaksanakan perintah Allah swt. memakmurkan bumi sebagai kahlifah.



Khalifah dalam konteks ini disebutkan oleh KH. Jeje Zainuddin dengan membangun masyarakat Islam yang benar-benar mampu mencerminkan dan menjalankan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan baik akidahnya, ibadahnya, maupun

muamalahnya.⁵³ Selanjutnya KH. Jeje Zaenuddin mengatakan bahwa pada konteks pendidikan Persis, untuk memperkuat posisi dan kedudukan khalifah Allah. maka melalui *tarbiyah* pesantren Persis itu adalah untuk memanusiakan manusia dalam kedudukannya sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi.⁵⁴ Itu sebabnya, secara historis keberadaan pesantren Persis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari latar sosio-historis bangsa Indonesia, apalagi ketika membincang soal sistem pendidikan pesantren Persis itu sendiri.

Pendidikan pesantren Persis agak berbeda dengan sistem pesantren pada umumnya di Indonesia, sebab dari segi penamaan, pesantren Persis dilekatkan dengan nama organisasi induknya, yakni Persatuan Islam (Persis). Sistem pendidikan Pesantren Persis memiliki kurikulum pendidikan sendiri dan berlaku bagi pendidikan Persis mulai dari tingkat atau jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Karena itu sistem pendidikan di pesantren Persis agak khas dan partikelir.

Dengan menggunakan istilah pesantren bagi nama lembaganya, yang pada hakikatnya tidak berbeda dengan sistem madrasah yang dikelola secara klasikal, Persis berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap berada dalam koridornya, yakni menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berjiwa pesantren. Akan tetapi, berbeda dan berada di luar jangkauan birokrasi pendidikan pemerintah.

A. Latief Muchtar mengatakan bahwa Persatuan Islam sejak 1950 sampai sekarang tampaknya tidak seperti Muhammadiyah, tidak ada gagasan untuk mendirikan Sekolah Dasar, SLTP, dan SMU atau model-model sekolah agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama atau Kementrian Agama. Karena dalam pandangan Persis, bahwa tujuan pendidikan bukan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Karenanya, Persis tetap mempertahankan model madrasah dengan jiwa pesantren, sesuai dengan garis kebijakan yang didengungkan pada 1936. Kebijakan ini berlaku mula dari tingkat pusat sampai tingkat cabang. Kurikulum pendidikannya sama, mereka tidak teikat oleh kurikulum sekolah-sekolah Departemen Agama (Kementerian Agama). Demikian pula dengan guru-

⁵³KH. Jeje Zaenuddin, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, "*Wawawncara*", Bandung, Maret 2020

⁵⁴KH. Jeje Zaenuddin, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam, "*Wawawncara*", Bandung, Maret 2020

gurunya, hampir sebagian besar adalah alumni tingkat muallimin dari pesantren Persis itu sendiri.

Relevan dengan pernyataan A. Latief Muchtar tersebut bahwa Persis bukanlah organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikuti sistem pendidikan pemerintah. Ini berbeda dengan pendidikan yang dikelola NU dan Muhammadiyah. NU, misalnya telah menyelenggarakan pendidikan Islam yang disebut dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang menurut Imam Chuseno, bahwa lembaga pendidikan ini belum memiliki sistem dan kurikulum yang diproduksi sendiri oleh mereka. Sistem dan kurikulum pendidikan yang dipakai Lembaga Pendidikan Ma'arif ini masih menggunakan sistem dan kurikulum pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, sedikit di tambah muatan ke-NU-an dan mata pelajaran agama yang berciri aswaja.

Demikian pula dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Menurut Achmadi bahwa Muhammadiyah telah membentuk madrasah dan sekolah yang secara institusional berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama (Kementerian Agama). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah senantiasa mengikuti dan disesuaikan dengan corak dan susunan lembaga pendidikan pemerintah. Pokok pengajaran madrasah-madrasah Muhammadiyah sejalan dengan pokok pengajaran madrasah di bawah Kementean Agama. Begitu juga dengan lembaga sekolahnya disesuaikan dengan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kecenderungan mengikuti sistem pendidikan pemerintah ini telah membuat tidak relevannya pendidikan Muhammadiyah dengan cita-citanya.

Mencermati kiprah lembaga pesantren Persis ini jika melihat kotribusinya bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia. Walaupun oleh Federspiel menilainya sebagai organisasi Islam di Indonesia yang *small and loosely knit* sebab tidak menjadi mainstream bagi arus perpolitikan Islam di Indonesia, namun semenjak berdirinya sampai saat ini, Persis termasuk organisasi yang begitu serius dan konsen menyelenggarakan pendidikan Islam di Indonesia.

Hal ini dipertegas lagi di dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Persatuan Islam pada 1984 dan 1996 yang disebutkan bahwa “lembaga pendidikan *jam'iyah* Persatuan Islam ini dinamakan pesantren Persatuan Islam. Pesantren Persatuan Islam merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan, komponen, dan kegiatan pendidikan Persatuan Islam dari jenjang pendidikan prasekolah hingga jenjang pendidikan tinggi.

Pendidikan Persatuan Islam dengan sistem kepesantrenan ini berusaha memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan umum sesuai dengan sifat kekhususannya. Dengan kata lain bahwa di pesantren Persis tidak dikenal dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Sebegitu kuatnya Persis menisbatkan dirinya dengan lembaga pesantren ini, sehingga disebutkan Persatuan Islam adalah pesantren sebelum menjadi *jam'iyah*. Karena itu sifat pesantren tidak akan lepas dari Persatuan Islam, sejak dahulu, sekarang, dan akan datang.

Lebih jauh lagi disebutkan, keterkaitan Persatuan Islam dengan lembaga pesantrennya menunjukkan bahwa eksistensi Persatuan Islam itu sendiri tergantung pada lembaga pendidikannya. Istilah pesantren Persis untuk pertama kali diperkenalkan atau dipergunakan pada 1936, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan saat itu dibentuk lembaga pendidikan yang diberi nama Pesantren Persatuan Islam pada 4 Maret 1936 yang dalam Qanoen Pesantren Persatuan Islam Bandoeng, pesantren ini didirikan sebagai upaya melaksanakan keputusan “Converentie Persatuan Islam 1935” yang menuntut Pengurus Besar atau sekarang Pimpinan Persatuan Islam untuk mengadakan “Cursus Muballigh” yang dalam Qanoen itu bahwa tujuan diselenggarakannya Pesantren Persatuan Islam itu adalah “semata-mata hendak menelorkan muballigh-muballigh dengan mengadakan bahasa Arab dan alat-alatnja dan ilmu agama Islam yang perlu, dan sedikit-sedikit dari peladjaran agama-agama, dan sedikit-sedikit dari ilmu menghitung, biografi, ilmu ‘alam, dan lain-lain ilmu keduniaan yang akan menolong seorang muballigh di dalam pekerjaannja bertabligh”.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dibentuklah nazhir-nazhir atau para pengurus pesantren Persatuan Islam yang dipilih oleh Pimpinan Pusat Persis yang bertugas untuk mengubah, menambah, mengurangi isi “Qanoen Pesantren” sehingga sesuai dengan keadaan dan perubahan zaman.

Adapun pengurus Pesantren Persatuan Islam tersebut antara lain, Ahmad Hassan (ketua), H. Zamzam (wakil ketua), Samsudin (sekretaris), dan Nastari (bendahara) dan dibantu oleh H. Azhari, E. Abdurrahman, H.M. Raml, Kemas Ahmad, dan Mohammad Natsir. Sedangkan guru-guru yang mengajar diantaranya adalah H. Zamzam, H. Azhari, H.M. Ramli, E. Abdurrahman, O. Qomaruddin, Mohammad Natsir, Fachruddin, Samsuddin, A.A. Bana Ama, Sulaiman Abu Su’ud, A. Hassan, dan Abdul Qadir Hassan.

Mengenai kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu-ilmu yang diperlukan untuk dapat mencetak santri menjadi muballigh Islam yang berdasarkan Quran dan as-Sunnah, yang mencakup mata pelajaran tauhid, fiqih, baca al-Quran, tajwid, sharaf, nahwu, tarikh, tafsir, hadis, khat, ushul fiqhi, bacaan, badi’, ma’ani, mantiq, bahasa Melayu, dan ilmu-ilmu umum lainnya meliputi ilmu hisab, ilmu alam, ilmu jurnalistik, dan ilmu-ilmu umum lainnya yang dianggap penting. Semua kurikulum ini disajikan kepada santri dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Arab sebagai penunjang yang digunakan saat-saat tertentu.

Dari Qanun Pesantren Persatuan Islam Bandoeng inilah yang kemudian diperkenalkannya pertama kali kata Pesantren Persatuan Islam dan dilakukannya pengelolaan pendidikan dengan cara-cara modern pada masanya ketika itu. Perpaduan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam kurikulumnya membuktikan bahwa pesantren Persatuan Islam kala itu sudah memperkenalkan model dan bentuk kurikulum integralistik dengan tidak mendikotomikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Apalagi telah diajarkan ilmu jurnalistik dan hal ini menandakan bahwa melalui pelajaran jurnalistik, diharapkan santri setamat di pesantren Persatuan Islam bisa menjadi seorang jurnalis atau penulis handal yang dapat membantu menyebarkan paham pembaharuan pemikiran keagamaan Islam, yaitu kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, yang

disebarkan melalui majalah-majalah dan ini sangat menunjang penerbitan. Dan melalui Qanoen ini pula yang menjadi embrio bagi penggunaan nama pesantren dalam perspektif Persatuan Islam berbeda dengan pesantren dalam pengertian sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia.

Istilah pesantren dalam Persatuan Islam sangatlah berbeda rumusannya dengan istilah pesantren dalam sistem pendidikan tradisional. Menurut Federspiel, pesantren dalam sistem pendidikan tradisional sering dipahami sebagai lembaga pribadi milik ulama, yang umumnya dikelola dengan bantuan keluarga mereka. Pada masa awal, pesantren merupakan fenomena pedesaan yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Pengajarannya didasarkan pada kitab klasik karya-karya para ulama terkemuka abad pertengahan (1250-1850M) yang biasanya dari mazhab hukum Syafii. Materi pengajarannya mencakup tata bahasa Arab, seperti nahwu dan konjungasinya (sharf), seni baca al-Quran (qiraah), tafsir al-Quran, tauhid, fiqh, akhlak, mantiq, sejarah, dan tasawuf. Semua mata pelajaran ini diajarkan dengan menggunakan metode weton atau halaqah dimana para pelajar duduk melingkar di depan kiai yang duduk dan menyuruh para pelajar secara bergantian untuk membaca kitab kuning.

Masuk abad ke-20, pesantren tradisional mendapatkan tekanan dari masyarakat dan pemerintah agar mengadopsi teknik-teknik baru dan memasukan beberapa beberapa mata pelajaran umum. Tentang hal ini, banyak pesantren memberikan respon positif, sehingga berubah menjadi pesantren modern, pesantren madrasah, atau pesantren sekolah yang mengikuti sistem pemerintah. Kemudian secara antropologis, Zamakhsyari Dhofier menyebutkan lima elemen bagi lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren, yaitu adanya pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab kuning, dan kiai.⁵⁵ Akan tetapi *terma* psantren oleh Persatuan Islam tidaklah seperti pada pendapat seperti tersebut, melainkan sebagai pesantren yang dinamis dan modernis, yaitu pesantren yang berusaha mengubah dan merombak citra negatif pesantren itu sendiri, bukan pesantren yang menampilkan wajah kejumudan, keterbelakangan, sekularisme, atau sikap fatalisme. Itulah mankna pesantren bagi Persatuan Islam sehingga lembaga pendidikannya disebut pesantren

⁵⁵Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm.

Persatuan Islam, sebuah pesantren dengan gaya baru, yang berbeda dengan pesantren gaya lama.

Oleh sebab itu, bagi Federspeil, yang menjadi pembeda antara pesantren dalam pengertian lembaga pendidikan tradisional dengan pesantren dalam pengertian Persatuan Islam adalah masalah metodenya. Jika para ulama (kiai) melalui pesantren tradisionalnya menerapkan metode pengajaran dengan pendekatan *master-student* (kiai-santri) atau yang disebut dengan *weton*, maka Persatuan Islam dengan pesantrennya menggunakan metode klasikal atau *class rooms*.

Melihat perbedaan ini, Deliar Noer berpendapat bahwa model pendidikan yang dilakukan di Persatuan Islam lebih merupakan perpaduan antara sistem pendidikan model Barat yang menekankan pelajaran umum dengan sistem pendidikan agama yang tetap berlandaskan Islam. Sistem ini, tidak ada bedanya dengan sistem madrasah pesantren. Sementara itu Jusuf Amir Feisal mengatakan bahwa sistem pendidikan Persatuan Islam merupakan *simbiosis* antara pesantren dan sekolah Islam. Kurikulumnya berkarakteristik agama, akan tetapi pengelolaan administrasinya mengikuti model sekolah Islam.

Berbeda halnya dengan pandangan ke dua tokoh tersebut, Azyumardi Azra justru menyebut sistem pendidikan Persatuan Islam dengan sebutan *sekolah Islam*. Alasannya, karena pendidikan di sekolah-sekolah Persatuan Islam lebih menekankan pada aspek keagamaan yang pada dasarnya tidak ada bedanya antara sekolah Islam dengan sekolah umum negeri.⁵⁶ Model kelembagaan pendidikan madrasah dengan jiwa pesantren inilah yang coba diterapkan oleh Persatuan Islam, ketika organisasi-organisasi pembaruan lainnya seperti Muhammadiyah hanya mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan model Barat, tetapi dengan muatan Islam.

Muhammadiyah dengan tampilan model ini telah menggunakan sistem klasikal yang berarti juga telah meninggalkan metode *wetonan* dan *sorogan* yang dalam sistem pendidikan tradisional masih sangat kuat dipertahankan. Pendirian lembaga Muhammadiyah yang oleh Steenbrink disebut dengan model sekolah gubernemen dan ini

⁵⁶Azyumardi Azra, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2005), hlm.

merupakan kepedulian KH. Ahmad Dahlan dalam mengimbangi dan menandingi sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah Belanda kala itu. Ia merasa terkesan dengan kerja para misionaris Kristen yang mendirikan sekolah dengan fasilitas yang lengkap, sementara pendidikan Islam sungguh jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang dibangun kaum misionaris Kristen.

Dengan mencontoh itu, Ahmad Dahlan kemudian mendirikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai sekolah yang mengajarkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib, ilmu bahasa, dan ilmu pasti disampaikan dalam Muhammadiyah sebagai mata pelajaran yang mengimbangi mata pelajaran agama seperti akidah, al-Quran, tarikh, dan akhlak. Selain sekolah model gubernemen, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah model madrasah yang tujuan utamanya adalah mengganti dan memperbaiki pengajaran al-Quran yang saat itu masih bercorak tradisional.

Berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren yang mengenal metode wetonan dan sorogan, dan berbeda dengan madrasah Muhammadiyah yang lembaganya tetap disebut madrasah, Persatuan Islam tetap menyebut lembaga pendidikannya dengan dengan istilah pesantren, meskipun dari segi substansinya tidak lain adalah madrasah dengan jiwa pesantren. Disebut madrasah karena dilaksanakan secara klasikal, dan disebut pesantren karena mengambil manfaat dari keunggulan-keunggulan pesantren sehingga disebut pesantren gaya baru.

Model ini dipertahankan Persatuan Islam yang merupakan ciri khasnya, sehingga memiliki keunikan tersendiri, yang dapat membedakannya dengan dari pesantren tradisional dan sekolah Muhammadiyah. Dengan lembaga pendidikannya yang disebut pesantren Persatuan Islam, lembaga ini melaksanakan kegiatan pendidikannya melalui tiga jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan pesantren, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar pesantren dan luar sekolah.⁵⁷

Jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara klasikal, berjenjang, dan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan yang masuk jalur luar

57

pesantren dan luar sekolah ini adalah pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, pengajian, tadarusan, dan sejenisnya yang ditujukan untuk meningkatkan akidah, syariah, akhlak mulia serta nilai budaya dan keterampilan tertentu.⁵⁸

Oleh karena itu jalur pendidikan pesantren dan jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara klasikal, berjenjang, berkelanjutan dan berkesinambungan, maka jenjang-jenjang pendidikan yang ada pada ke dua jalur tersebut adalah *pertama* pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bentuk satuan pendidikan prasekolah ini meliputi Taman Kanak-Kanak Islam atau disebut RA (raudhatul Athfal), Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak, yang kesemuanya berada di bawah naungan Persatuan Islam Isteri (Persistri). Bentuk satuan pendidikan dasar ini meliputi pendidikan ibtidaiyah, diniyah wustha, pendidikan ibtidaiyah, diniyah ula diselenggarakan 6 (enam) tahun setara dengan SD, sedangkan pendidikan Tajhiziyah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebagai persiapan memasuki Tsanawiyah bagi yang berasal dari tamatan SD. Adapun pendidikan Tsanawiyah dan Diniyah Wustha dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun setara SMP.

Kemudian bentuk satuan pendidikan menengah hanya mencakup pendidikan Muallimin dan Aliyah yang dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun setara SMA. Satuan ini memiliki tiga program pengembangan khusus, yaitu ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial dan bahasa.⁵⁹ Jenjang pendidikan dasar dan menengah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah (Bidgar Dikdasmen) Pimpinan Pusat Persatuan Islam, sementara bentuk satuan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab dan wewenang Bidang Garapan Pendidikan Tinggi (Bidgar Dikti) Pimpinan Pusat Persatuan Islam dalam pengelolaannya.

E. Penerapan Pendidikan Islam di Pesantren Persis

58

59

Sebagaimana tujuan pendidikan Persatuan Islam, yakni terwujudnya kepribadian muslim yang *tafaqquh fi al-din*, maka untuk mencapai tujuan yang demikian mulia tersebut berbagai langkah dan upaya strategis dilakukan di lingkungan pendidikan pesantren Persatuan Islam. Pesantren Persis, begitu konsen berpegang kuat pada Quran dan Sunnah, sebab anak didiknya diharapkan untuk menjadikan al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidupnya dalam kehidupannya. Hal ini seperti dijelaskan Dr. Tiar Anwar Bachtiar, M.Hum, bahwa:

Visi pendidikan di Persis itu supaya murid-murid itu nanti dia menjadi orang yang landasan kehidupannya itu adalah Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Kenapa, sebab agama itu sebenarnya disitu, di Quran dan di sunnah Nabi Muhammad saw. Sebab, menjadi orang yang beragama dalam konteks hari ini setelah ditinggalkan Nabi Muhammad saw itu adalah orang yang punya komitmen terhadap sumber agama itu supaya nanti kita bisa membedakan mana yang sumbernya berasal dari agama dan mana yang bukan. Nah ini yang nanti diharapkan melahirkan ketaatan yang mutlak terhadap agama dan kepada Allah swt. melalui pengajaran sehingga pribadi muslim yang terbentuk nanti adalah pribadi muslim yang pertanggungjawabannya itu secara langsung penuh kepada Allah swt karena dia mengikrarkan dirinya kepada yang diajarkan yaitu Quran dan Sunnah, dan inilah yang



menjadi visi utamanya.⁶⁰ Komitmen berpegang kuat pada al-Quran dan Sunnah menjadi prinsip dasar pada pendidikan pesantren Persis. Sebab, dari sini kemudian diturunkan pada terciptanya anak didik yang memiliki kepribadian Islami, dan memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya itu, juga dituntut untuk memiliki akhlak mulia.

Karenanya, secara filosofis pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk *al-insan al-kamil* atau manusia paripurna. Beranjak dari konsep di atas, maka setidaknya, pendidikan Islam

⁶⁰Dr. Tiar Anwar Bachtiar, M.Hum, Pengurus PP Persis, *Wawancara*, Bandung: Maret 2020.

seyogyanya diarahkan pada dua dimensi, yakni *pertama* dimensi dialektika horizontal terhadap sesamanya, *kedua* dimensi ketundukan vertikal kepada Allah swt.⁶¹

Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkrit dalam konteks dirinya, sesama manusia dan alam semesta. Akumulasi berbagai pengetahuan, keterampilan dan sikap mental merupakan bekal utama pemahaman terhadap makna kehidupan. Sementara pada dimensi kedua, memberikan arti bahwa pendidikan sains dan teknologi, selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara dan



melestarikan sumber daya alami, dirinya juga menjadi jembatan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan sang pencipta. Untuk itu, maka pelaksanaan ibadah dalam arti seluas-luasnya adalah merupakan sarana yang dapat menghantarkan manusia ke arah ketundukan vertikal kepada Allah swt.⁶²

Pembentukan akhlak mulia menjadi prioritas pertama dan utama dalam pendidikan di pesantren Persis, selain mewujudkan santri atau anak didik yang *tafakkuh fi al-din*. Untuk mewujudkan terbentuknya akhlak mulia ini, tidak hanya para santri yang menjadi target, akan tetapi para asatidz yang terlebih dahulu memberi contoh terbaik, sehingga di contohi atau diikuti oleh para santri. Keempat; Pengajar (guru), memegang peranan penting yang

⁶¹A.M. Saefudin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm.126.

⁶²Samsul Nizar, *Seabad Buya Hamka Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 117.

cukup menentukan keberhasilan pendidikan. Faktor ini termasuk yang membuat pesantren Persis unggul dan diminati masyarakat. Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga memilih pesantren Persis, yakni *Pertama* memang karena kualitas pengajarnya, loyalitas, disiplin jihad tarbawinya, orientasi asatiznya memang benar-benar memandang dan menjadikan pesantren sebagai lahan jihad tarbawi bagi mereka, *Kedua*; adanya kesadaran yang tinggi dari asatiz untuk mengemban misi risalah mencetak mubalig berbasis Qurani dan mencontohi sunnah nabi. *Ketiga*; tuntunan (bimbingan) dan keteladanan yang mengalir dari para asatiz-asatizah; *Keempat*; suasana lingkungan pesantren yang tamadun mendukung terciptanya perilaku santri yang agamis, patuh dan berakhlak terpuji. *Kelima*; santri dibai'at setiap saat untuk diingatkan dan dituntun agar selalu taat kepada Allah dan Rasul, taat dan berbakti kepada kedua orang tua, taat dan hormat kepada guru, berakhlak yang terpuji dan lain-lain. *Keenam*; pola pembelajarannya diaawali dengan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai akhlak, seperti kejujuran, kedisiplinan, kesetiakawanan, kepatuhan melaksanakan perintah agama, kesederhanaan, dan lain-lain.



Jadi kalau disimpulkan bahwa pendidikan Islam pesantren Persisi memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan yakni untuk mewujudkan insan sebagai muslim yang kaffah dan anak bangsa yang berkepribadian baik dan unggul. Hal ini adalah karena dilatarbelakangi oleh; 1) ideologi jam'iyah, visi pesantren Persis

dan karakter gerakannya yang konsisten pada pemurnian pemikiran Islam (aqidah, ibadah, muamalah) kepada sumbernya yang asasi yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi dengan istiqamah menjadikannya sebagai dasar pijakan dalam kehidupan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. 2) Penggunaan kurikulum yang cocok dengan kekhasan pesantren yang dipadu dan dikorelasikan dengan perkembangan zaman yang dibarengi oleh kemampuan asatiz-asatizah dalam menjadikan (menerapkan) kurikulum sebagai *roadmap* proses pembelajaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai pesantren, 3) Kualitas guru (asatiz) loyalitas, disiplinnya, ororientasi jihad tarbawinya, kemauan yang kuat untuk mengemban misi risalah mencetak mubalig berbasis qur'ani dan mencontohi Sunnah Nabi, tuntunan dan keteladanan, bai'at santri, pembiasaan dengan akhlak terpuji, dan lingkungan pesantren yang tamaddun, humanis dan toleran.

Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dan proses pendidikan di pesantren Persis merupakan cermin dari proses pendidikan Islam itu sendiri. Sebab, pendidikan Islam itu adalah proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani dan akal peserta didik ke arah terbentuknya kepribadian muslim yang baik (insan kamil).⁶³ Selain itu, Ramayulis menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian menurut ukuran Islam.⁶⁴ Merujuk pada pandangan tersebut di atas tampak bahwa proses bimbingan dan arahan yang dilakukan di pesantren Persis telah mengarah pada rangkaian proses pendidikan Islam. Karena semua aktvitasnya mengarah pada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan ukuran-ukuran dalam ajaran agama Islam. Jika pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani serta menumbuhs suburkan hubungan yang harmonis kepada setiap individu dengan Allah swt. manusia dan alam semesta, maka kesemuanya itu telah termanifestasi pada pesantren Persis. Hal ini seperti dikemukakan Dr. KH. Dedeng Rosidin, M.Ag bahwa visi pesantren Persis adalah “ingin membentuk generasi yang tafakahu fiddin, sebagai wahana proses memanusiakan manusia

⁶³Lihat Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 14.

⁶⁴Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 36.

untuk mengembangkan potensi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, dalam arti melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi.⁶⁵

Visi pesantren Persis tersebut relevan dengan pendidikan Islam yang melekat pada cita-cita dan tujuan jangka panjang agama Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia (QS. Al-Anbiya' (21):107. Jadi, pendidikan Islam itu sebagai pranata yang kuat, berwibawa, efektif dan kredibel dalam mewujudkan cita-cita ajaran Islam. Dengan visi tersebut maka seluruh komponen pendidikan Islam diarahkan pada tercapainya visi yang harus dijamin oleh semua unsur. Pada tahap selanjutnya, visi tersebut akan menjiwai seluruh pola pikir (*mindset*) tindakan dan kebijakan pengelolaan pendidikan. Dan pada tahap selanjutnya, visi akan menjadi budaya (*culture*) yang hidup dan dirasakan manfaatnya oleh semua, yang tercermin pada prinsip pendidikan Islam, yakni *pertama* pendidikan Islam adalah bagian dari proses *rububiyah*, *kedua* pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya, *ketiga* pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama, *keempat* pendidikan Islam merupakan pendidikan yang terpadu, *kelima* landasan pijaknya adalah berlaku universal.

⁶⁵Dedeng Rosidin, *Pimpinan Pondok Pesantren Persis 01 Pajagalan*, Wawancara, Bandung: 21 Maret 2020.

Buku

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	alif.id Internet Source	6%
2	www.republika.co.id Internet Source	2%
3	islamstudy-w-ceeda.blogspot.com Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
5	arnimabruria.blogspot.com Internet Source	1%
6	stitpgripasuruan.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
8	www.bedanews.com Internet Source	1%
9	talimulquranasror.blogspot.com Internet Source	1%

10

id.scribd.com

Internet Source

1 %

11

web.unmetered.co.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On